



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 70 A / KEP/HK/2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyediakan sarana informasi ketahanan dan kerentanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akurat dan komprehensif, perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Februari, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	F
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 704/KEP/HK/2024

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2024

**TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

BAB 1 PENDAHULUAN



Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kepulauan yang terbentang seluas 48.718,10 km² pada posisi 8-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. NTT termasuk dalam kategori wilayah *semi-arid* dengan curah hujan yang tercatat di tahun 2018 antara 675 – 3.141 mm dan suhu udara antara 15,4 dan 32,5°C. Provinsi NTT terdiri atas 21 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah kecamatan sebanyak 315 dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.353. Jumlah penduduk di tahun 2022 tercatat sebanyak 5.481.790 jiwa yang terdiri dari 2.741.463 laki-laki dan 2.740.327 perempuan. Kepadatan penduduk di NTT di tahun 2022 sebesar 199 jiwa per km² dan persebaran penduduk tergolong belum merata. Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi daerah dengan persentase penduduk terbanyak (8,53%), disusul Kota Kupang (8,36%) dan Kabupaten Kupang (6,81%). Namun jika ditinjau dari segi kepadatan penduduk, Kota Kupang berada posisi teratas dengan kepadatan sebesar 2.583 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk NTT per tahun tercatat sebesar 3,3% pada tahun 2022 dengan laju tertinggi berada di Kabupaten Sumba Tengah.

Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2021 tumbuh sebesar 2,51 persen dan pada tahun 2022 ekonomi NTT tumbuh sebesar 3,05 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 18,40 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Ekonomi NTT triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 3,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Dari sisi pangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan Perdagangan Besar dan

Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,68 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 3,26 persen. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ekonomi NTT pada triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,52 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,51 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,63 persen. Struktur Ekonomi NTT pada tahun 2022 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontri busi sebesar 29,60 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 70,43 persen.

Pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan menjadi agenda penting pembangunan di Provinsi NTT. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin NTT mengalami penurunan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Semester II tahun 2021 mencatat persentase penduduk miskin di NTT sebesar 20,44%, penurunan ini terjadi karena adanya perbaikan ekonomi masyarakat dengan adanya program-program pemerintah antara lain Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dan Pengembangan Tanaman Kelor yang dilaksanakan diberbagai daerah di seluruh NTT serta Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah dan Belu. Namun berdasarkan data tersebut, masih terdapat lebih dari 1 juta penduduk NTT masih hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 2022.

Pertumbuhan penduduk dan situasi pembangunan yang dinamis mendorong keseriusan semua pihak dalam mengatasi permasalahan pangan dan gizi dan mendorong upaya-upaya penurunan kerentanan masyarakat terhadap kerawanan pangan. Secara global, Indonesia berada pada peringkat 63 dari 113 negara berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI) tahun 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit. Di skala nasional, sebanyak 3 kabupaten di NTT masuk dalam prioritas rentan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Indonesia tahun 2021 yang diproduksi oleh Badan Ketahanan Pangan, yaitu Sumba Barat Daya, Alor dan Sabu Raijua. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan kondisi ketahanan di NTT perlu untuk terus dilanjutkan.

Kerentanan terhadap kerawanan pangan berpotensi diperburuk oleh beberapa stresor yang berasal dari kondisi geografis wilayah dan iklim yang memicu kerentanan terhadap kerawanan pangan transien. Provinsi NTT memiliki 15 gunung api yang masih aktif yang mendorong adanya kewaspadaan terhadap bencana alam. Di sisi lain, FAO (2016) menyatakan bahwa perubahan iklim berdampak negatif bagi produktivitas pertanian yang kemudian mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, WFP (2014) melihat perubahan iklim sebagai faktor pengganda risiko terhadap kerawanan pangan. Bencana alam dan perubahan iklim berkontribusi dalam meningkatkan risiko terjadinya kerawanan pangan transien.

1.1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketahanan Pangan menurut UU No. 18 tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

FSVA NTT tahun 2023 juga mengacu pada pemahaman dan konsep ketahanan pangan dan gizi sesuai dengan Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu Ketersediaan Pangan (*Food Availability*), Akses Pangan (*Food Access*) dan Pemanfaatan Pangan (*Food Utilization*), serta mengintegrasikan gizid dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

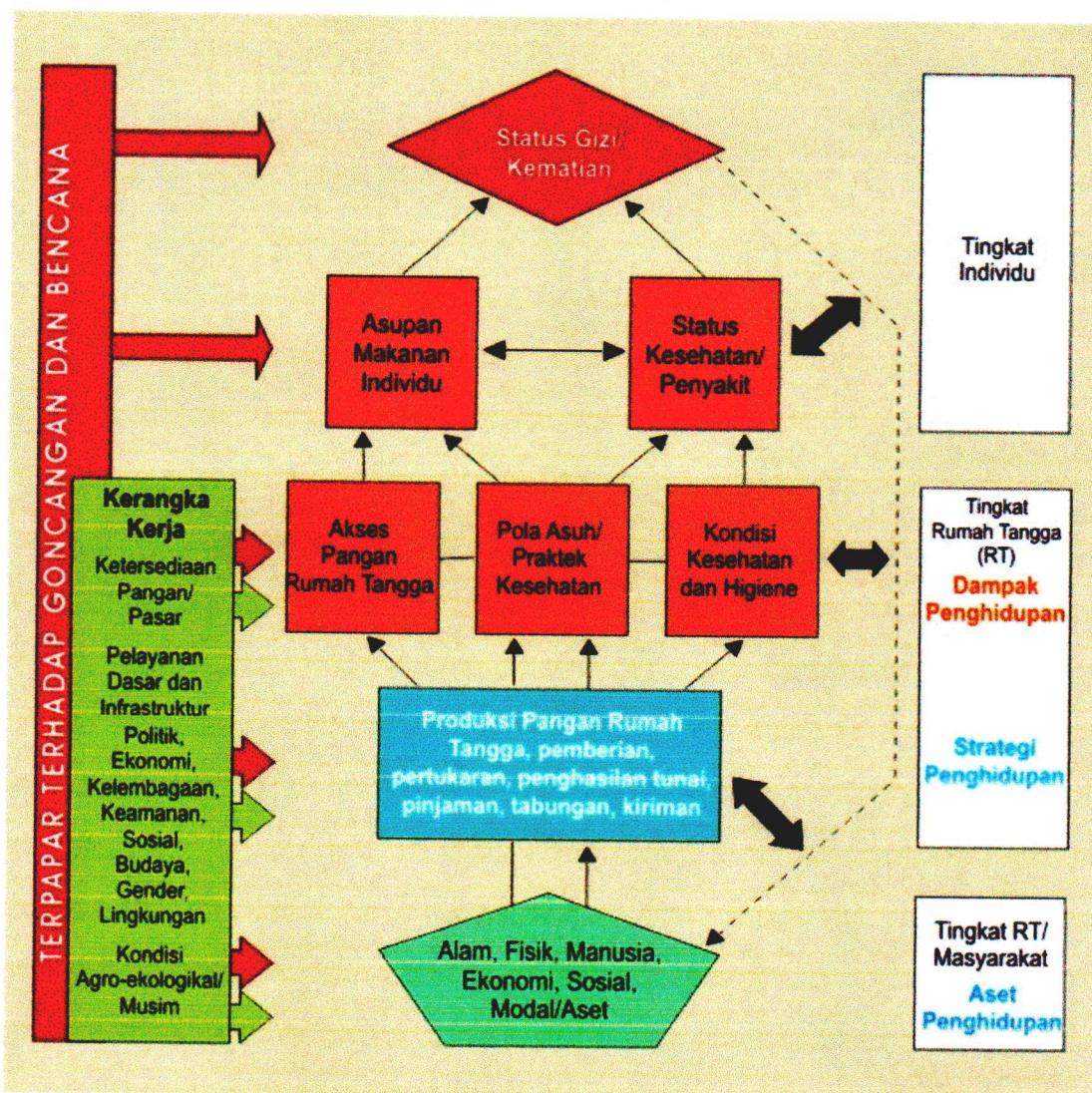
Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin

tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proksi untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

FSVA memberikan informasi kepada pengambil kebijakan mengenai daerah-daerah yang memiliki kondisi tahan pangan atau rentan terhadap kerawanan pangan dari aspek dan indikator yang bersifat kronis, atau pada kondisi jangka panjang, sehingga diharapkan dapat menjadikan rujukan intervensi untuk pemuliharaan ataupun tindakan penanganan yang lebih komprehensif dan terarah.

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi



Sumber : WFP (2009a) dan WFP (2009b)

Kerawanan pangan (*food insecurity*) dibagi menjadi dua jenis berdasarkan durasinya: kerawanan kronis (*chronic*) dan transien (*transitory*). Menurut WFP (2009a), kerawanan pangan kronis didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dalam jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, kerawanan pangan transien didefinisikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dalam jangka waktu singkat.

Kerawanan pangan kronis umumnya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dan sosial budaya atau adat istiadat. Kerawanan pangan transien berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.2. Metodologi

Kerawanan pangan dan gizi merupakan masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah indikator berbeda yang berada di luar cakupan masalah produksi pangan semata, dengan tidak ada satu ukuran yang langsung dapat mengukur masalah ini. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator proksi ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Analisis FSVA NTT 2023 menggunakan 9 indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis (Tabel 1.1), sedangkan indikator kerawanan pangan transien akan dibahas dalam bab tersendiri namun tidak menjadi indikator dalam perhitungan indeks komposit ketahanan pangan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA 2023 merupakan turunan dari tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara berkala.

Tabel 1.1. Indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan NTT 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data	Tingkat
Ketersediaan Pangan			
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih "beras + jagung + ubi jalar + ubi kayu"	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar). Konsumsi normatif serealia adalah 300 gram/kapita/hari. Ketersediaan juga mengikutisertakan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) NTT 2021	Kecamatan
Akses Pangan			
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan nonpangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021	Kabupaten/Kota
Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan lebih dari 65% dibandingkan dengan total pengeluaran rumah tangga (makanan dan nonmakanan).	Data SAE (2021)	Kecamatan
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik dari PLN dan/atau non-PLN, misalnya generator.	Data SAE (2021)	Kecamatan
Pemanfaatan Pangan			

Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.	Data SAE (2021)	Kecamatan
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	Persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m.	Data SAE (2021)	Kecamatan
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	Total jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapiannya fisik, dan tenaga keteknisian medis) dibandingkan dengan kepadatan penduduk.	Dinas Kesehatan 2021	Kecamatan
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)	Anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO, 2005).	Dinas Kesehatan 2021	Kecamatan
Angka Kesakitan	Angkakesakitan atau persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatanadalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.	Data SAE (2021)	Kecamatan

Kelompok indikator kerawanan pangan kronis meliputi rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar), persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*), dan angka kesakitan (*morbidity*).

Secara umum, sumber data terbagi menjadi 2 yaitu data yang bersumber dari instansi pemerintah di tingkat provinsi dan data yang bersumber dari hasil *Small-Area Estimation* (SAE) terhadap beberapa indikator yang berasal dari data SUSENAS guna mendapatkan data yang representatif di tingkat kecamatan. Daftar indikator yang digunakan pada FSVA NTT 2021 beserta definisi, sumber data dan tingkat datanya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Metode Analisis

A. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris atau mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan aturan nasional atau internasional yang berlaku. Penetapan *range* delapan indikator mengikuti pola sebaran empiris. Satu indikator yaitu persentase balita stunting mengikuti aturan *World Health Organization* (WHO). *Cut-off point* indikator tercantum pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Titik potong(*cut-off point*) indikator individu

Indikator	Titik Potong
Ketersediaan Pangan	
Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia	$\geq 1,50$ 1,25 - < 1,50 1,00 - < 1,25 0,75 - < 1,00 0,50 - < 0,75 < 0,50
Akses Pangan	
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	≥ 35 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20

Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran	10 - < 15 < 10 ≥ 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10 ≥ 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10
Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7
Pemanfaatan Pangan	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7
Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7
Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7
Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kapadatan penduduk	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7
Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (<i>stunting</i>)	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7
Angka Kesakitan (<i>Morbidity</i>)	≤ 6,0 > 6,0 - 6,5 > 6,5 - 7,5 > 7,5 - 8,5 > 8,5 - 9,0 > 9,0 ≥ 70 60 - < 70 50 - < 60 40 - < 50 30 - < 40 < 30 ≥ 30 20 - < 30 15 - < 20 10 - < 15 5 - < 10 < 5 ≥ 40 35 - < 40 30 - < 35 25 - < 30 20 - < 25 < 20 ≥ 17 14 - < 17 12 - < 14 10 - < 12 7 - < 7

B. Analisis Indeks Komposit Ketahanan Pangan

Berdasarkan kesepakatan dalam Kelompok Kerja Teknis FSVA, pendekatan metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan bahwa jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit sebagai berikut:

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0 – 100)
 2. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

Yj : Skor komposit kecamatan di kab/kot ke-j

: Bobot masing-masing indikator ke-i

Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kecamatan di kab/kot ke-j

i : Indikator ke 1, 2, ..., 9

: Kecamatan di kabupaten ke 1, 2, ..., 303 : Kecamatan di kota ke 1, 2, ..., 6

Besaran bobot masing-masing indikator berdasarkan rekomendasi para ahli (*expert judgement*) yang berasal dari akademisi dan pemerintah (Tabel 1.3). Khusus untuk analisis kecamatan di wilayah kota (Kota Kupang) hanya menggunakan delapan indikator dari pilarakses pangan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, pada perhitungan komposit wilayah perkotaan indikator rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih tidak digunakan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada 8 (delapan) indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Bobot setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.3. Bobot Indikator Individu (*Expert Judgement*)

No	Indikator	Kota	Kab
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih serealia	0,3	-
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	0,15	0,20
3	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan > 65 persen	0,075	0,125
4	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075	0,125
5	Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun	0,05	0,08
6	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,15	0,18
7	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk	0,05	0,08
8	Prevalensi Balita Stunting	0,05	0,08
9	Angka Kesakitan	0,10	0,13
	Total	1,00	1,00

3. penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* in Mengelompokkan kabupaten/kota ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil dikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

Dimana:

K_j : Cut-off point komposit ke-J

ai : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut-off point* indikator ke-*i* komposit ke-*j*

i: indikator ke 1,2,3,.....9

j: komposit ke 1,2,3,.....6

Tabel 1.4. Titik Potong (Cut-off Point) Indeks Komposit Ketahanan Pangan

Prioritas Penanganan	Kecamatan di Kabupaten	Kecamatan di Kota
Prioritas 1	$\leq 40,21$	$\leq 15,80$
Prioritas 2	$> 44,19 - 51,56$	$> 15,80 - 31,94$
Prioritas 3	$> 51,56 - 60,53$	$> 31,94 - 44,57$
Prioritas 4	$> 60,53 - 69,50$	$> 44,57 - 57,20$
Prioritas 5	$> 69,50 - 78,51$	$> 57,20 - 69,70$
Prioritas 6	$> 78,51$	$> 69,70$

Pada analisis FSVA NTT 2022, parameter dan titik potong indeks komposit disesuaikan dengan titik potong berdasarkan analisis tahun dasar (*baseline*) tahun 2021. Data FSVA NTT 2023 dianalisis kembali menggunakan metode analisis tahun 2021. Titik potong hasil analisis tersebut yang digunakan untuk FSVA NTT 2023. Analisis tahun dasar dilakukan untuk dapat membandingkan hasil tahun tertentu dengan tahun sebelumnya guna memungkinkan fungsi monitoring tahunan.

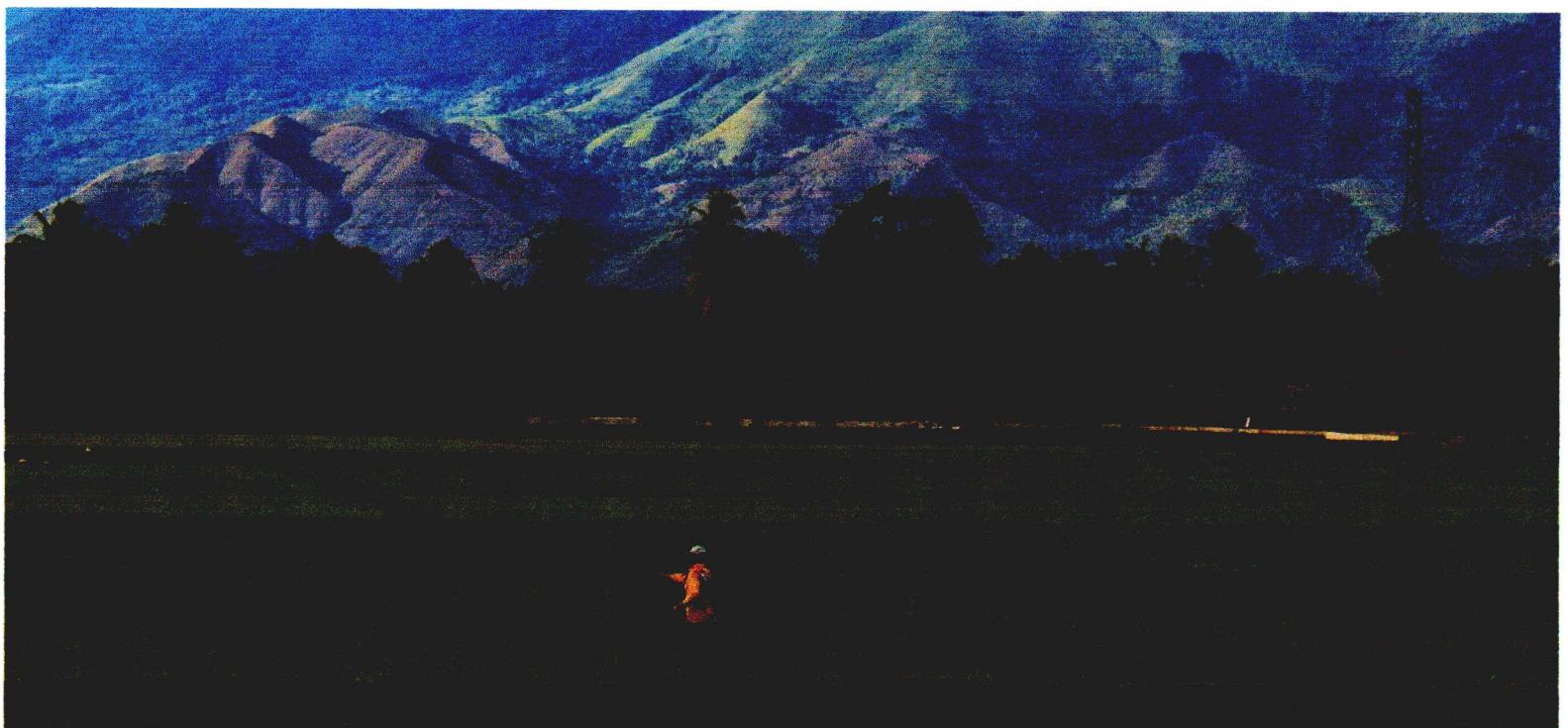
Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 adalah kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kecamatan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kecamatan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kecamatan yang diidentifikasi relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua desa serta penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua desa serta penduduk di kabupaten Prioritas 1-3 tergolong rentan rawan pangan. Untuk dapat mengidentifikasi daerah mana yang benar-benar rentan pangan pada level desa, disarankan adanya tindak lanjut berupa pembuatan peta kabupaten.

C. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menunjukkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN



Pilar pertama yang membentuk ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan (*food availability*). Undang-Undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Di sisi lain, WFP (2009b) mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan secara fisik di suatu area tertentu yang berasal dari produksi domestik, impor maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh empat faktor yaitu produksi, perdagangan, stok dan transfer (makanan yang disuplai dari pemerintah atau lembaga bantuan). Ketersediaan pangan dapat diukur melalui statistik produksi pangan, informasi musiman, statistik impor dan ekspor, serta informasi terkait kebijakan nasional atau daerah (WFP, 2009a).

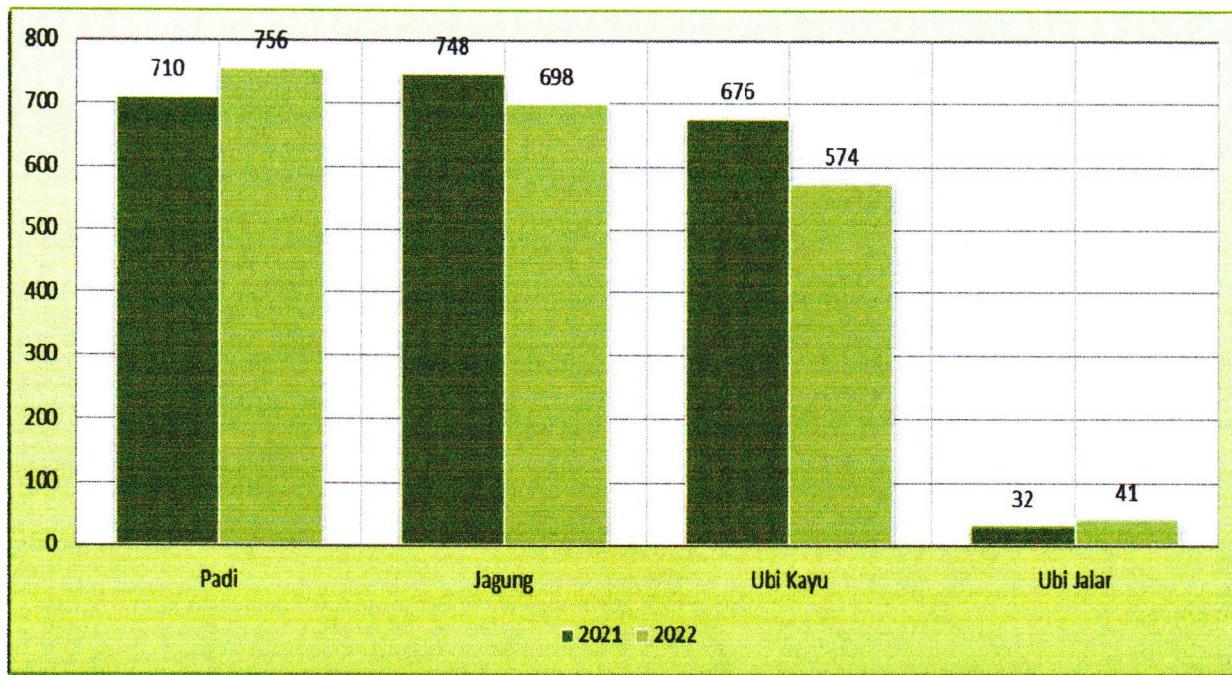
Produksi bergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis dan kualitas/kesuburan tanah, curah hujan, sarana pertanian (irigasi, sarana produksi pertanian dan teknologi), kebijakan perdagangan pemerintah, serta insentif bagi petani untuk memproduksi tanaman pangan. Bab ini akan memuat informasi mengenai kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditinjau dari perkembangan produksi beberapa komoditas tanaman pangan yang meliputi serealia dan umbi-umbian. Selain itu, pada bab ini akan dimuat hasil analisis ketersediaan pangan tingkat provinsi hingga ke level kecamatan.

FSVA Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2023 hanya menggunakan satu indikator untuk menggambarkan situasi ketersediaan pangan di tingkat kecamatan, sama seperti FSVA NTT tahun 2018 sampai dengan 2022. Indikator yang digunakan adalah rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih pangan atau umum disebut NCPR (*Normative Consumption to Production Ratio*). Komoditas pangan yang digunakan yaitu komoditas serealia dan umbi-umbian yang meliputi empat tanaman pangan yaitu padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Konsumsi normatif serealia adalah 300 gram/kapita/hari. Analisis ketersediaan pangan mencakup 309 kecamatan di wilayah kabupaten di NTT. Analisis ketersediaan pangan memiliki beberapa keterbatasan yaitu: i) indikator NCPR digunakan untuk mengukur jumlah produksi tanaman pangan yang kaya energi, namun tidak melihat dari sisi ketersediaan pangan lokal yang kaya gizi, dan ii) analisis ini juga tidak memperhitungkan sumber pangan hewani, kacang-kacangan, buah-buahan dan komoditas lainnya yang dihasilkan pada tingkat kecamatan.

2.1. Perkembangan Produksi Serealia dan Umbi-Umbian Utama

Gambar 2.1. menunjukkan secara umum, produksi padi di Provinsi NTT mengalami peningkatan dibanding tahun 2021, produksi padi naik dari 710 ribu ton pada tahun 2021 menjadi 756 ribu ton pada tahun 2022. Produksi jagung mengalami penurunan dari 748 ribu ton pada tahun 2021 menjadi 698 ribu ton pada tahun 2022. Selain itu, produksi umbi-umbian utama yaitu ubi kayu juga mengalami penurunan dari 676 ribu ton pada tahun 2021 menjadi 574 ribu ton pada tahun 2022, sedangkan ubi jalar mengalami kenaikan produksi yaitu dari 32 ribu ton di tahun 2021 menjadi 41 ribu ton di tahun 2022.

Gambar 2.1. Perkembangan produksi serealia dan umbi-umbian utama, 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) (Dalam ribu ton).

Tabel 2.1 menunjukkan variasi spasial produksi serealia dan umbi-umbian utama per kabupaten dan kota. Semakin gelap warna hijaunya maka semakin besar produksinya. Produksi padi paling besar terdapat di Kabupaten Manggarai Barat dengan produksi sebesar 124.087 ton pada tahun 2022, disusul oleh Manggarai dan Manggarai Timur. Produksi jagung tersentral di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan produksi sebesar 170.737 ton, disusul oleh Sumba Barat Daya dan Malaka. Berbeda dengan padi dan jagung, variasi produksi ubi kayu lebih kecil dan tersebar di beberapa kabupaten. Namun, produksi terbesar tercatat di Kabupaten Sikka, Timor Tengah Selatan dan Belu. Terakhir, produksi ubi jalar tercatat paling besar di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 10.673 ton disusul Sumba Barat Daya dan Sikka.

Tabel 2.1. Produksi serealia dan umbi-umbian utama per kabupaten/kota, 2022 (ton)

No.	Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Sumba Barat	30.180	9.569	4.538	612
2	Sumba Timur	52.284	24.611	18.639	1.139
3	Kupang	61.255	40.829	8.448	730
4	Timor Tengah Selatan	15.616	170.737	50.131	1.692
5	Timor Tengah Utara	25.924	44.548	53.828	614
6	Belu	23.239	48.980	40.279	1.073
7	Alor	3.556	26.916	35.751	1.885
8	Lembata	201	25.318	33.048	934
9	Flores Timur	7.517	18.426	37.026	528
10	Sikka	11.346	29.416	67.922	3.525
11	Ende	21.882	11.961	45.217	2.518
12	Ngada	48.062	21.062	18.563	1.443
13	Manggarai	88.359	4.979	6.246	1.354

14	Rote Ndao	28.835	7.868	2.781	1.023
15	Manggarai Barat	124.087	6.978	43.946	10.673
16	Sumba Tengah	24.187	19.347	4.640	1.034
17	Sumba Barat Daya	49.435	99.832	57.189	6.142
18	Nagekeo	27.527	11.499	3.809	629
19	Manggarai Timur	77.979	6.860	13.335	2.372
20	Sabu Raijua	7.205	8.038	61	150
21	Malaka	25.806	59.109	28.519	1.124
22	Kota Kupang	1.568	1.141	497	-
Nusa Tenggara Timur		756.050	698.023	574.413	41.194

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022.

2.2. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Selain dari produksi pangan dari dalam wilayah, ketersediaan pangan juga dapat diukur dari stok atau cadangan pangan yang tersedia di wilayah tersebut. Menurut WFP (2009a), analisis ketahanan pangan sangat baik jika dapat mengkombinasikan antara pola produksi dengan stok, cadangan, perdagangan domestik, serta bantuan pangan. Dalam FSVA NTT tahun 2023, cadangan pangan pemerintah merupakan salah satu komponen perhitungan indikator NCPR. Cadangan pangan yang dimaksud adalah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) di tingkat kabupaten/kota, yang kemudian diestimasi di tingkat kecamatan menggunakan pendekatan konsumsi masyarakat.

Menurut data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi NTT, hanya terdapat 6 (enam) kabupaten yang mengalokasikan CPPD pada tahun 2022, yaitu: Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Manggarai Barat dan Nagekeo. Besaran CPPD tiap kabupaten tersedia di Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) kabupaten di NTT tahun 2022

No	Kabupaten	CPPD (ton)
1	Sumba Barat	2,5
2	Sumba Timur	40
3	Timor Tengah Utara	27,8
4	Alor	5
5	Manggarai Barat	10,5
6	Nagekeo	40,6

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

2.3. Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita terhadap Ketersediaan Pangan

Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia (*Normative Consumption to Production Ratio-NCPR*) merupakan indikator yang mewakili aspek ketersediaan pangan dalam analisis komposit ketahanan pangan. Indikator ini mengindikasikan situasi suatu daerah terkait surplus atau defisit dalam produksi pangan. Indikator ini juga digunakan dalam FSVA sebelumnya. Namun, pada FSVA NTT 2023, perhitungan NCPR mengikuti sertakan cadangan pangan pemerintah (beras) di tingkat kabupaten yang diestimasi ke tingkat kecamatan melalui pendekatan konsumsi.

Tabel 2.2. Sebaran jumlah kecamatan menurut kategori indikator NCPR

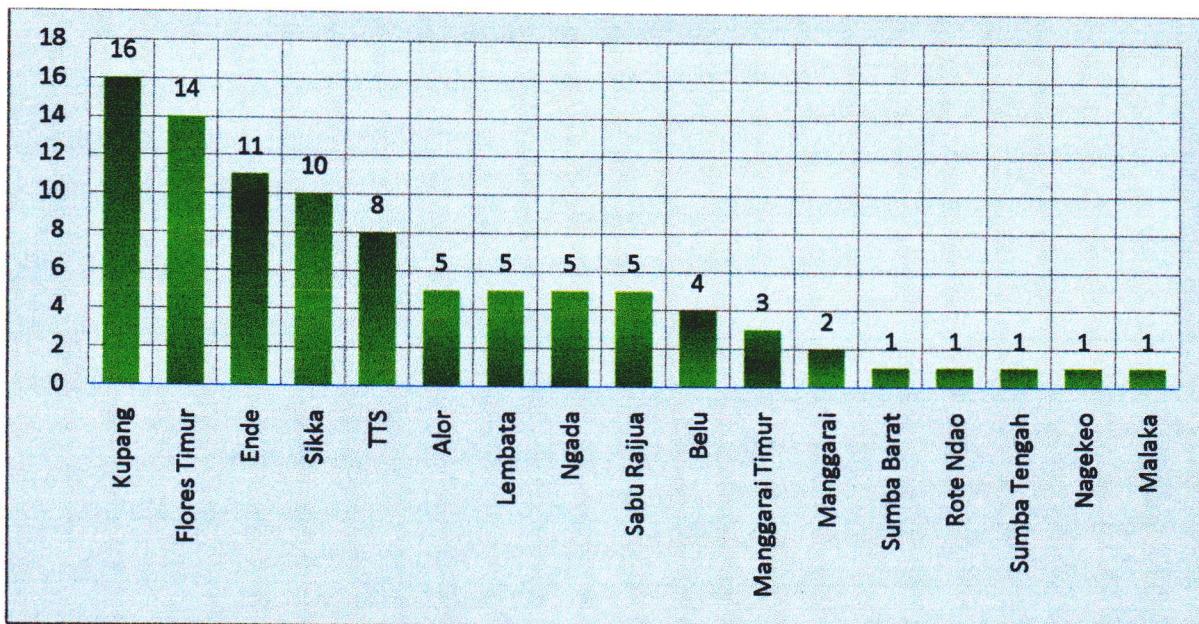
No	Prioritas	NCPR	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Prioritas 1	≥ 1,50	Defisit Tinggi	53	16,83
2	Prioritas 2	1,25 - < 1,50	Defisit Sedang	17	5,40
3	Prioritas 3	1,00 - < 1,25	Defisit Rendah	23	7,30
4	Prioritas 4	0,75 - < 1,00	Surplus Rendah	36	11,43

5	Prioritas 5	0,50 - < 0,75	Surplus Sedang	59	18,73
6	Prioritas 6	< 0,50	Surplus Tinggi	121	38,41
Total Jumlah Kecamatan			303	100	

Sumber: Hasil analisis 2023

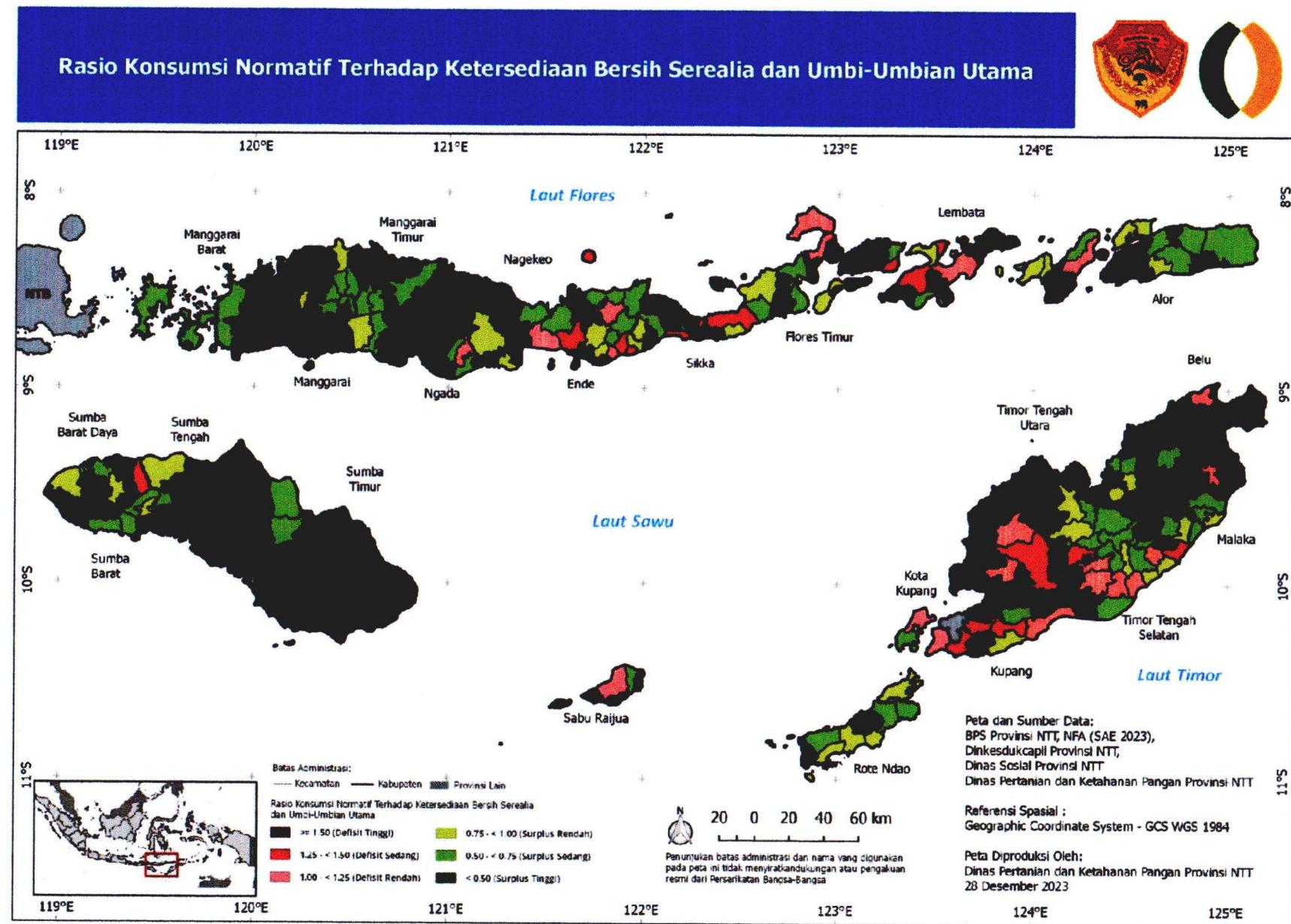
NCPR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung indeks komposit ketahanan pangan di tingkat kecamatan. Produksi serealia dan umbi-umbian utama dihitung dengan mengambil rata-rata produksi padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar tahun 2022. Data rata-rata produksi bersih serealia dihitung dengan menggunakan faktor konversi standar (benih, pakan dan tercecer). Khusus rata-rata produksi bersih ubi kayu dan ubi jalar dibagi dengan 3 (nilai kalori 3 kg ubi kayu atau ubi jalar setara dengan 1 kg beras atau jagung) untuk mendapatkan nilai yang ekuivalen dengan serealia. Selanjutnya dihitung total produksi serealia dan umbi-umbian utama yang tersedia untuk dikonsumsi. Ketersediaan bersih serealia per kapita dihitung dengan membagi total produksi serealia di kabupaten/kota tertentu dengan perkiraan jumlah penduduk tahun 2022, kemudian dihitung rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih serealia dan umbi-umbian utama. Berdasarkan profil konsumsi Indonesia, konsumsi normatif serealia dan umbi-umbian total per kapita per hari sekitar 300 gram.

Gambar 2.2. Sebaran jumlah kecamatan defisit pangan menurut kabupaten/kota



Sumber: Hasil analisis 2023.

Dari total 309 kecamatan di wilayah kabupaten, lebih dari setengahnya dikategorikan surplus ketersediaan pangan menurut analisis NCPR. Sebanyak 216 kecamatan (69,90%) dikategorikan surplus serealia dan umbi-umbian utama. Namun, masih terdapat 93 kecamatan (30,10%) yang dikategorikan defisit serealia (Tabel 2.2). Kecamatan-kecamatan defisit pangan tersebar di 17 kabupaten dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kupang 16 kecamatan di ikuti Flores Timur 14 kecamatan, Ende 11 Kecamatan, Sikka 10 Kecamatan, TTS 8 Kecamatan, (lihat Gambar 2.2). Sebaliknya, jumlah kecamatan defisit terendah berada di Kabupaten Sumba Barat, Rote Ndao, Sumba Tengah, Nagekeo dan Malaka (masing-masing 1 kecamatan).



BAB 3

AKSES PANGAN



Akses pangan (*food access*) merupakan salah satu dari tiga pilar ketahanan pangan. WFP (2009a) mendefinisikan akses pangan sebagai kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan makanan secara teratur melalui satu atau kombinasi produksi rumah dan stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan makanan. Konsep 3 (tiga) pilar ketahanan pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak berhenti hanya pada peningkatan ketersediaan pangan, namun juga perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengaksesnya. Ketahanan pangan tidak dapat tercapai bila suplai pangan tercukupi namun masyarakat tidak mampu untuk mendapatkannya dengan sumber daya yang ada (WFP, 2009b). Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya:

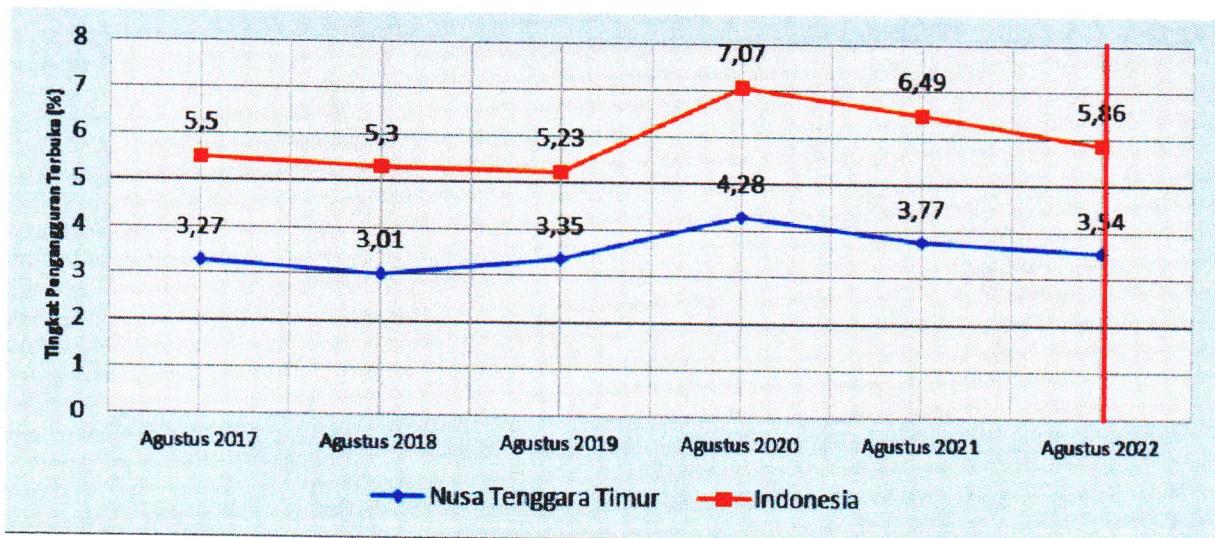
- a. Akses fisik: infrastruktur pasar, akses untuk mencapai pasar dan fungsi pasar
- b. Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang cukup dan bergizi
- c. Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan mekanisme dukungan informal seperti barter, meminjam atau adanya program dukungan sosial.

Bab ini akan membahas tentang kondisi akses pangan di Provinsi NTT ditinjau dari beberapa indikator dan data-data yang tersedia. Sama seperti FSVA tahun sebelumnya, FSVA NTT 2022 menggunakan 3 (tiga) indikator yang mewakili aspek akses pangan (ekonomi) untuk memperoleh indeks komposit ketahanan pangan, yaitu: i) persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, ii) persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen dari total pengeluaran rumah tangga, dan iii) persentase rumah tangga tanpa akses listrik.

3.1. Kemiskinan dan Pengangguran

Akses pangan, secara ekonomi, berkaitan erat dengan daya beli (*purchasing power*) masyarakat terhadap pangan yang tersedia di pasar. Daya beli tersebut ditentukan oleh pendapatan rumah tangga dan harga pangan (WFP, 2009a). Salah satu indikator yang erat kaitannya dengan aksesibilitas terhadap pangan dan daya beli masyarakat terhadap pangan adalah kemiskinan (FAO, 2008). Kerawanan pangan dan gizi dapat muncul sebagai konsekuensi dari beberapa faktor, dan salah satunya adalah kemiskinan (FAO, 2015). Oleh karena itu, upaya-upaya mereduksi angka kemiskinan secara global telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan dunia.

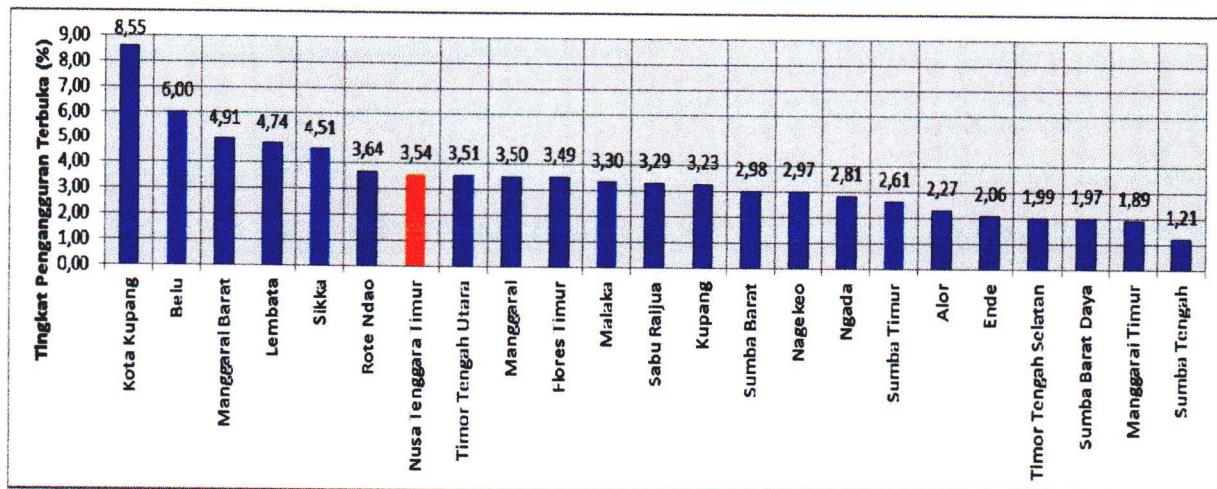
Gambar 3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Aspek penghidupan berperan dalam membentuk kerentanan rumah tangga terhadap kerawanan pangan. FAO (2009) menjelaskan bahwa kerawanan pangan dapat muncul sebagai konsekuensi dari rendahnya pendapatan dan meningkatnya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi secara umum lebih rendah dibandingkan angka di tingkat nasional namun pergerakannya cenderung mengikuti pola perubahan di tingkat nasional. TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 tercatat sebesar 3,54%. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,77% (lihat Gambar 3.1). Penurunan terjadi diduga karena masyarakat kembali beraktifitas karena berakhirnya pandemi COVID-19 serta adanya pembangunan dari berbagai aspek yang semakin berkembang di NTT.

Gambar 3.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota, 2022



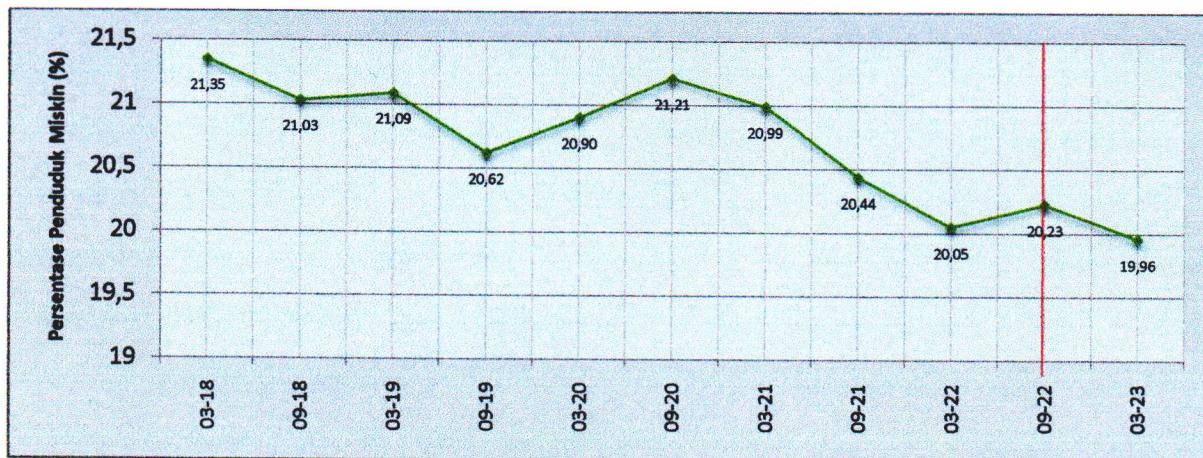
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Secara umum, terdapat 6 kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas angka provinsi. TPT tertinggi terdapat di Kota Kupang (8,55%), disusul oleh Kabupaten Belu (6%) dan Kabupaten Manggarai Barat (4,91%), Kabupaten Lembata (4,74), Sikka (4,51%) dan Rote Ndao (3,64%). Sebaliknya, TPT terendah berada di Kabupaten Sumba Tengah (1,21%).

Perkembangan Kemiskinan di Provinsi NTT

Di Indonesia, penentuan penduduk miskin dilakukan dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 (semester II) sebesar Rp535.547,00 per kapita per bulan. Di Provinsi NTT, pada tahun 2022 (semester II) garis kemiskinan sebesar Rp460.823,00 per kapita per bulan.

Gambar 3.3. Persentase penduduk miskin di Provinsi NTT, 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sejak tahun 2015, persentase penduduk miskin di Provinsi NTT terus mengalami penurunan yang stabil tiap tahunnya. Provinsi NTT berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 22,61% pada Maret 2015 menjadi 20,62% pada September 2019. Akibat pandemi COVID-19 angka kemiskinan NTT pada tahun 2020 ke angka 21,21% pada September 2020 atau naik sebesar 0,59 poin persentase dari September 2019. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami penurunan ke angka 20,99% pada Maret 2021 atau turun sebesar 0,22 poin dari September 2020 dan pada September 2021 turun lagi ke angka 20,44% atau turun sebesar 0,77 poin dari September 2020. Pada Maret 2022 angka kemiskinan menurun menjadi 20,05% dari 20,44% pada September 2021, namun pada September 2022 angka kemiskinan mengalami sedikit kenaikan menjadi 20,23% dari 20,05% pada Maret 2022.

Tabel 3.1. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota, 2021 vs 2022

No	Kab/Kota	2021	2022	Perubahan
1	Sumba Barat	28,39	27,47	-0,92
2	Sumba Timur	29,68	28,22	-1,46
3	Kupang	22,98	21,70	-1,28
4	Timor Tengah Selatan	26,64	25,45	-1,19
5	Timor Tengah Utara	22,62	21,50	-1,12
6	Belu	15,68	14,84	-0,84
7	Alor	21,09	20,25	-0,84
8	Lembata	26,21	25,18	-1,03
9	Flores Timur	11,14	10,75	-0,39
10	Sikka	13,35	12,61	-0,74
11	Ende	24,13	23,00	-1,13
12	Ngada	12,58	11,93	-0,65
13	Manggarai	20,48	19,84	-0,64
14	Rote Ndao	28,08	27,45	-0,63
15	Manggarai Barat	17,92	17,15	-0,77
16	Sumba Tengah	34,27	32,51	-1,76
17	Sumba Barat Daya	28,18	27,16	-1,02
18	Nagekeo	12,91	12,05	-0,86
19	Manggarai Timur	26,50	25,35	-1,15
20	Sabu Raijua	30,13	28,73	-1,40
21	Malaka	16,33	15,26	-1,07
22	Kota Kupang	9,17	8,61	-0,56
Nusa Tenggara Timur		20,99	20,05	-0,94

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tingkat kabupaten dan kota di Provinsi NTT, semua kabupaten/kota tercatat mengalami penurunan angka kemiskinan antara periode Maret 2021-2022. Namun, bila ditinjau dari angka kemiskinannya, Kabupaten Sumba Tengah berada di urutan teratas

dengan angka kemiskinan sebesar 32,51% di tahun 2022. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan terendah tetap berada di Kota Kupang (8,61% di tahun 2022).

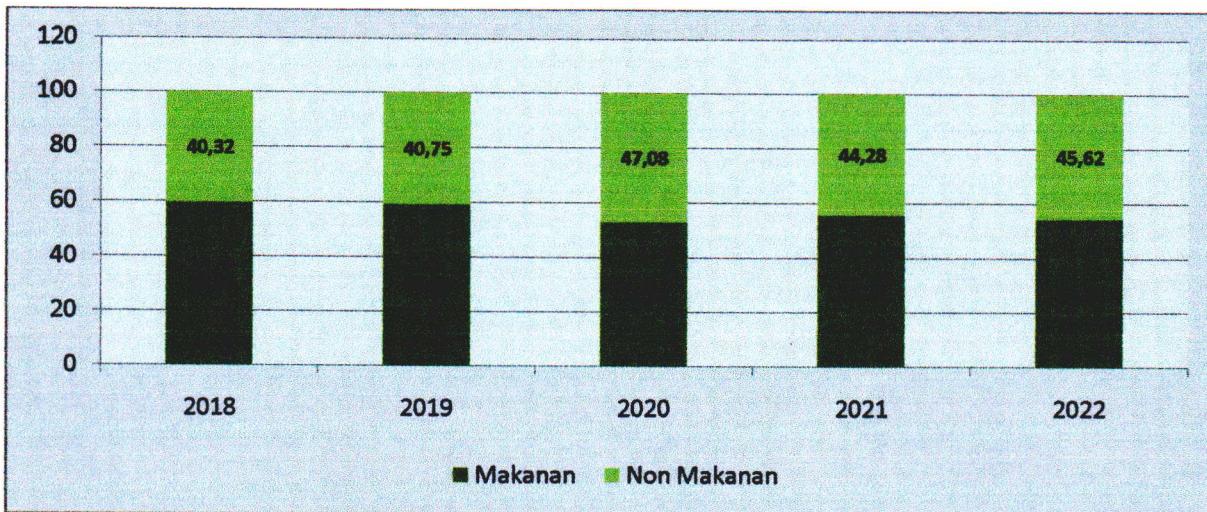
3.2. Pangsa Pengeluaran Pangan

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat ditinjau melalui pengeluaran rumah tangga, terutama dengan melihat pangsa pengeluaran untuk makanan dan non-makanan (IFPRI, 2019). Pada rumah tangga miskin, menurut FAO (2011), mayoritas pengeluaran rumah tangga digunakan untuk membeli makanan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang rendah. Menurut BPS, pangsa pengeluaran pangan berbanding terbalik dengan kesejahteraan. Semakin rendah kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin besar. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat menggeser pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan-kebutuhan non-pangan.

Pengeluaran penduduk di Provinsi NTT masih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Menurut SUSENAS Maret 2022, rata-rata total pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi NTT sebesar Rp884.102,00 per bulan dan mayoritas (54,38%) dari total tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Proporsi pengeluaran per kapita untuk makanan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 55,72% (Gambar 3.4).

Dilihat menurut tempat tinggalnya, penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan cenderung mengalokasikan proporsi yang lebih besar untuk makanan (56,39%) dibandingkan penduduk di wilayah perkotaan (47,40%). Sebaliknya, penduduk perkotaan mengalokasikan pengeluaran lebih banyak untuk kebutuhan non-makanan (58,82%) dibandingkan penduduk di perdesaan (41,18%).

Gambar 3.4. Proporsi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di NTT menurut jenis pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SUSENAS September

Selain persentase penduduk miskin, salah satu indikator Indeks ketahanan pangan komposit dari aspek akses pangan adalah persentase rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65%. Data indikator tersebut diperoleh melalui data SUSENAS Maret 2020 yang diestimasi di tingkat kecamatan menggunakan Estimasi Area Kecil atau *Small-Area Estimation* (SAE). Kecamatan dikelompokkan ke dalam 6 kelas dengan titik potong yang ditentukan oleh Tim FSVA Nasional.

Tabel 3.2. Sebaran jumlah kecamatan persentase Rumah Tangga dengan pengeluaran pangan > 65%

Prioritas	% Rata dengan Pengeluaran Pangan > 65%	Kategori	Jumlah	Persentase
Prioritas 1	≥ 70	Sangat Buruk	15	4,76
Prioritas 2	60 - < 70	Buruk	29	9,21
Prioritas 3	50 - < 60	Agak Buruk	42	13,33
Prioritas 4	40 - < 50	Agak Baik	54	17,14
Prioritas 5	30 - < 40	Baik	55	17,46

Prioritas 6	< 30	Sangat Baik	120	38,10
Total Jumlah Kecamatan			315	100

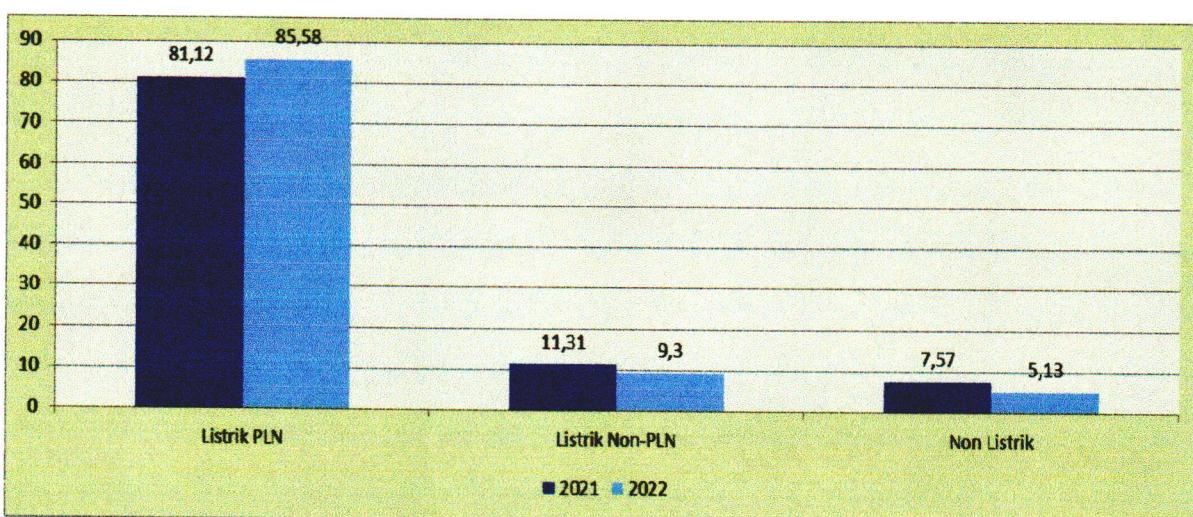
Sumber: Hasil analisis FSVA NTT 2023 menggunakan data SAE dari SUSENAS Maret 2022.

Sebanyak 86 kecamatan (27%) masuk dalam gradasi merah, sedangkan 224 (73%) kecamatan lainnya masuk dalam gradasi warna hijau (Tabel 3.2). Sebanyak 4,76% kecamatan di Provinsi NTT masuk dalam kategori sangat buruk (prioritas 1), yaitu kecamatan dengan proporsi rumah tangga dengan pengeluaran pangan >65% sebesar 70% ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa masih cukup banyak kecamatan di Provinsi NTT yang mayoritas rumah tangganya kurang sejahtera. Namun, terdapat pula 120 kecamatan (38,10%) yang masuk kategori sangat baik, yaitu kecamatan dengan proporsi rumah tangga dengan pengeluaran > 65% kurang dari 30%.

3.3. Akses Listrik

Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan. Semakin tinggi akses listrik suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini merupakan indikasi kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; Wiranthi *et al.* 2014; Sabarella 2005; dan Sofiati 2009).

Gambar 3.5. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan, 2021-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Pada Maret 2022, lebih dari 90% rumah tangga di Provinsi NTT telah memiliki akses listrik, di mana 85,58% rumah tangga menggunakan listrik yang berasal dari PLN, sedangkan 9,30% lainnya menggunakan listrik non-PLN. Namun, terdapat pula 5,13% rumah tangga yang belum memiliki akses listrik. Meskipun begitu, BPS mencatat adanya peningkatan akses listrik di NTT pada tahun 2022 dibandingkan 2021. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar 7,57% di tahun 2021 menjadi 5,13% di tahun 2022 (turun sebesar 2,44 poin persentase).

Tabel 3.3. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan dan kabupaten/kota, 2022

No	Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Non-Listrik
1	Sumba Barat	68.13	18.79	13.08
2	Sumba Timur	75.42	21.18	3.40
3	Kupang	87.12	5.53	7.35
4	Timor Tengah Selatan	77.78	12.69	9.53
5	Timor Tengah Utara	91.96	5.33	2.71
6	Belu	95.96	0.18	3.86
7	Alor	86.94	10.80	2.26
8	Lembata	97.58	0.32	2.10

No	Kabupaten/Kota	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Non-Listrik
9	Flores Timur	98.17	0.00	1.83
10	Sikka	90.06	4.71	5.24
11	Ende	95.66	3.45	0.89
12	Ngada	87.60	8.05	4.34
13	Manggarai	86.87	9.83	3.29
14	Rote Ndao	96.68	1.32	2.00
15	Manggarai Barat	82.10	14.24	3.67
16	Sumba Tengah	56.09	30.97	12.93
17	Sumba Barat Daya	55.61	23.86	20.53
18	Nagekeo	95.19	3.54	1.27
19	Manggarai Timur	62.62	31.09	6.29
20	Sabu Raijua	71.22	22.48	6.31
21	Malaka	93.32	1.91	4.77
22	Kota Kupang	99.99	0.00	0.01
Nusa Tenggara Timur		85.58	9.30	5.13

Sumber: Badan Pusat Statistik. SUSENAS Maret 2022.

Menurut distribusi spasialnya di tingkat kabupaten/kota, proporsi rumah tangga tanpa akses listrik tertinggi terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya (20,53%), disusul oleh Sumba Barat (13,08%) dan Sumba Tengah (12,93%). Persentase terendah terdapat di Kota Kupang dimana hanya 0,01% rumah tangga yang belum memiliki akses listrik dari 99,99% rumah tangga yang sudah teraliri listrik di Kota Kupang, seluruhnya menggunakan listrik yang bersumber dari PLN (Tabel 3.3).

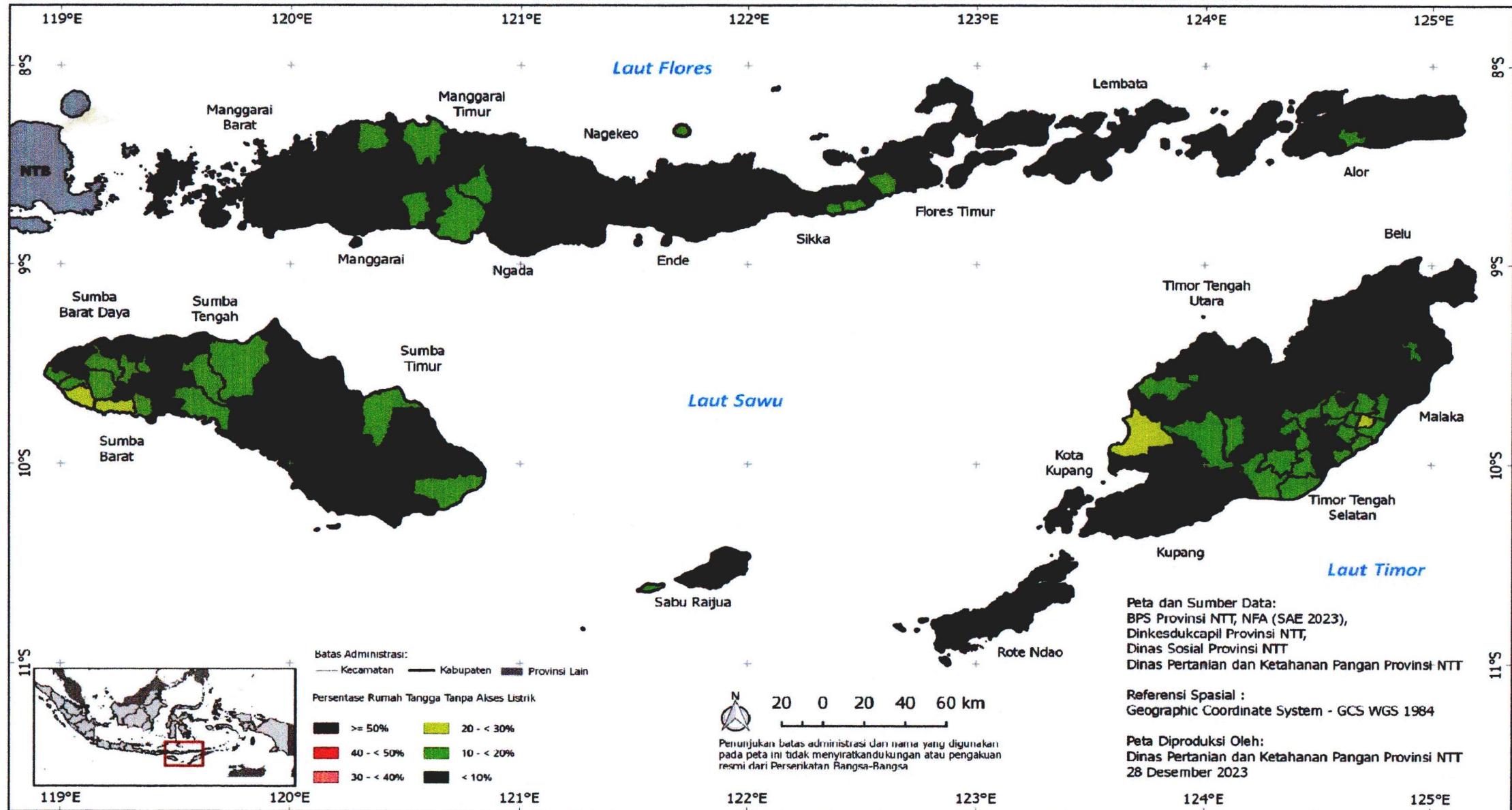
Tabel 3.4. Sebaran jumlah kecamatan persentase rumah tangga tanpa akses listrik

Prioritas	% Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	Kategori	Jumlah	Persentase
Prioritas 1	≥ 50	Sangat Buruk	1	0,32
Prioritas 2	40 - < 50	Buruk	0	0
Prioritas 3	30 - < 40	Agak Buruk	0	0
Prioritas 4	20 - < 30	Agak Baik	4	1,27
Prioritas 5	10 - < 20	Baik	43	13,65
Prioritas 6	< 10	Sangat Baik	267	84,76
Total Jumlah Kecamatan			315	100

Sumber: Hasil analisis FSVA NTT 2023 menggunakan data SAE dari SUSENAS Maret 2022.

Tabel 3.4 menunjukkan sebaran jumlah kecamatan di setiap kategori. Dari seluruh kecamatan di Provinsi NTT, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori sangat baik (prioritas 6) dengan persentase rumah tangga tanpa akses listrik kurang dari 10%. Namun, masih terdapat 1 kecamatan (0,32%) yang masih dalam kategori sangat buruk, yaitu kecamatan dengan persentase rumah tangga tanpa akses listrik sebanyak 50% ke atas yaitu kecamatan Kodi Utara yang berada pada kabupaten Sumba Barat Daya. Intervensi peningkatan akses listrik perlu diprioritaskan di kecamatan-kecamatan bergradasi merah, terutama pada kategori sangat buruk.

Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik



BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN



Pilar ketahanan pangan terakhir adalah pemanfaatan pangan (*food utilization*). Menurut WFP (2009), pemanfaatan pangan terkait dengan dua hal, yaitu: 1) pemanfaatan makanan yang dapat diakses rumah tangga dan 2) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi – pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. FAO (2008) menambahkan bahwa pemanfaatan pangan dapat dimaknai sebagai cara tubuh memanfaatkan berbagai nutrisi di dalam makanan. Asupan energi dan nutrisi yang cukup oleh individu merupakan hasil dari praktik pemberian makan yang baik, persiapan makanan, keragaman diet serta distribusi makanan dalam rumah tangga. Pemanfaatan makanan juga dapat dipengaruhi oleh penyakit endemik, air minum yang tidak aman, sanitasi yang buruk, atau kurangnya pengetahuan gizi yang sesuai (WFP, 2009). Oleh karena itu, pemanfaatan pangan juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan pendidikan.

Pemanfaatan pangan diukur melalui beberapa indikator dalam menghitung indeks komposit ketahanan dan kerentanan pangan, yaitu: indikator akses air bersih, lama sekolah perempuan, dan tenaga kesehatan. Bab ini secara umum membahas 3 (tiga) indikator tersebut melalui data yang tersedia di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan. Bab ini juga membahas tentang konsumsi pangan secara umum. Pembahasan konsumsi pangan meliputi pembahasan terkait dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) di tingkat provinsi dan per kabupaten/kota di Provinsi NTT.

4.1. Konsumsi Pangan

Menurut hasil SUSENAS 2022, rata-rata konsumsi energi harian di Provinsi NTT sebesar 1.974kkal/kapita/hari. Angka ini masih berada di bawah angka kecukupan energi (AKE) yang direkomendasikan yaitu 2.000 kkal/kapita/hari. Sedangkan rata-rata konsumsi protein harian di NTT dilaporkan sebesar 56,36gram/kapita/hari atau 99,41%. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan konsumsi protein per kapita per hari dari tahun 2022, sehingga konsumsi protein per kapita per hari di NTT berada di bawah angka kecukupan protein (AKP) yang direkomendasikan. Penurunan konsumsi protein di NTT mengindikasikan masih adanya pengaruh pemulihan dari pandemi COVID-19 yang besar pada pola konsumsi masyarakat di NTT.

Tabel 4.1. Konsumsi energi per kapita per hari menurut kabupaten/kota,2022

Wilayah	Kalori	Percentase	Protein	Percentase
	(kkal/kap/hari)	(%)	(gram/kap/hari)	(%)
Sumba Barat	1.776	88,80	50,04	80,44
Sumba Timur	1.961	98,05	55,86	89,79
Kupang	1.877	93,85	51,89	83,41
Timor Tengah Selatan	1.876	93,80	55,2	88,73
Timor Tengah Utara	1.938	96,90	57,12	91,82
Belu	2.010	100,50	55,12	88,60
Alor	1.792	89,60	57,22	91,98
Lembata	1.886	94,30	52,25	83,99
Flores Timur	2.045	102,25	57,27	92,06
Sikka	1.813	90,65	48,9	78,60
Ende	2.148	107,40	60,78	97,70
Ngada	2.081	104,05	61,65	99,10
Manggarai	2.230	111,50	64,73	104,05
Rote Ndao	1.662	83,10	45,16	72,59
Manggarai Barat	2.049	102,45	59,34	95,39
Sumba Tengah	1.735	86,75	50,13	80,58
Sumba Barat Daya	2.071	103,55	58,72	94,39
Nagekeo	1.901	95,05	53,32	85,71
Manggarai Timur	2.177	108,85	60,41	97,11
Sabu Raijua	2.131	106,55	60,76	97,67
Malaka	2.241	112,05	60,72	97,60
Kota Kupang	1.865	93,25	56,03	90,07
NTT	1.974	98,33	56,36	90,60

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten di NTT (50%) telah mencapai angka kecukupan energi yang direkomendasikan. Beberapa kabupaten sisanya masih berada pada angka 80-90%. Daerah dengan konsumsi energi per kapita per hari tertinggi adalah Kabupaten Malaka (2.241 kkal/kapita/hari), diikuti oleh Kabupaten Manggarai (2.230 kkal/kapita/hari) dan Kabupaten Ende (2.148 kkal/kapita/hari). Di sisi lain, Kabupaten Rote Ndao berada pada urutan terbawah dengan konsumsi energi terendah, yaitu sebesar 1.662 kkal/kapita/ hari atau hanya mencapai 83,10% dari AKE yang direkomendasikan.

Tabel 4.2. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi NTT, 2022

Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kapi/ hari)	Kalori (kkal/kap/ hari)	AKE (%)	Skor PPH	Skor PPH NTT
Padi-padian	363.0	1,335	63.6	25.0	25.0
Umbi-umbian	38.8	50	2.4	2.5	1.2
Pangan Hewani	86.4	141	6.7	24.0	13.4
Minyak dan Lemak	18.9	170	8.1	5.0	4.1
Buah/Biji Berminyak	3.1	16	0.8	1.0	0.4
Kacang-kacangan	14.7	44	2.1	10.0	4.2
Gula	18.8	69	3.3	2.5	1.7
Sayur dan Buah	223.3	107	5.1	30.0	25.4
Lain-lain	61.5	42	2.0	0,0	0,0
Total		1.974	94	100,0	75,3

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Tabel 4.3. Skor PPH dan konsumsi beras dan jagung menurut kabupaten/kota, 2022

Wilayah	Skor PPH	KonsumsiBeras (kg/kap/tahun)	KonsumsiJagung (kg/kap/tahun)
Sumba Barat	60,0	104	22,4
Sumba Timur	57,6	138	12,3
Kupang	61,4	115	9,2
Timor Tengah Selatan	71,1	105	25,3
Timor Tengah Utara	61,3	121	12,1
Belu	71,0	101	14
Alor	65,6	89	21,2
Lembata	64,7	91	21
Flores Timur	69,1	111	12,1
Sikka	61,8	109	8,7
Ende	68,5	132	9,1
Ngada	79,8	108	16,2
Manggarai	80,4	125	8,3
Rote Ndao	56,4	118	2
Manggarai Barat	73,2	126	6,4
Sumba Tengah	56,4	109	25,5
Sumba Barat Daya	63,8	103	35,8
Nagekeo	73,4	106	11,5
Manggarai Timur	65,2	135	13,6
Sabu Raijua	70,6	116	3,2
Malaka	68,2	106	16,5
Kota Kupang	76,6	103	4,8
NTT	75,3	112,3	14,1

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

BKP (2015) menjelaskan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) perlu diterjemahkan dalam satuan yang dikenal oleh para penyelenggara pangan menjadi volume bahan pangan atau kelompok pangan, dan Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi instrumen yang tepat untuk digunakan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa skor PPH Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 75,3. Angka ini merupakan kenaikan dari tahun 2021 namun masih diberada di bawah tahun 2019 yang mencapai 77,9. Dampak COVID-19 dan pemulihan setelah pandemi masih menjadi faktor utama yang mendisrupsi konsumsi pangan masyarakat kemungkinan berdasarkan dengan merosotnya skor PPH di tahun 2020 sampai 2022.

Ditinjau dari kelompok pangan, hanya terdapat 1 kelompok yang telah memenuhi skor PPH di tahun 2021, yaitu padi-padian. Skor pada kelompok lainnya masih berada dibawah skor yang diharapkan. Skor PPH untuk kelompok pangan hewani masih jauh dari target, yaitu 13,5 dari yang diharapkan sebesar 24,0. Begitu pula dengan konsumsi sayur dan buah.

Skor PPH terbesar berada di Kabupaten Manggarai (80,4), disusul oleh Ngada (79,8) dan Kota Kupang (76,6). Kabupaten Sumba Timur merupakan wilayah dengan konsumsi beras yang tinggi di Provinsi NTT (138,00 kg/kapita/tahun), namun cukup rendah dalam konsumsi jagung (Tabel 4.3). Sebaliknya, skor PPH terendah terdapat di Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Tengah, yaitu sebesar 56,4. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman pangan masyarakat Rote Ndao dan Sumba Tengah masih rendah dan masih diperlukan upaya-upaya peningkatan diversitas konsumi pangan.

4.2. Tenaga Kesehatan

Kondisi kesehatan yang buruk berdampak terhadap proses penyerapan gizi dari makanan. Hal tersebut yang memunculkan hubungan antara pemanfaatan makanan dengan kesehatan masyarakat. Menurut FAO (2008), permasalahan nutrisi seperti malnutrisi dapat muncul sebagai akibat dari kerawanan pangan, namun ada faktor nonmakanan yang juga dapat berkontribusi, yaitu: fasilitas kesehatan yang tidak memadai dan lingkungan yang tidak sehat. Pinstrup-Andersen (2011) menjelaskan bahwa status kesehatan yang buruk dapat mempengaruhi produktivitas kerja individu, yang akhirnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai menjadi salah satu aspek penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan makanan oleh masyarakat.

FSVA menggunakan indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk untuk mengukur komponen pemanfaatan pangan. Semakin tinggi rasio tersebut maka semakin buruk ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah tersebut. Rasio yang besar menunjukkan bahwa setiap tenaga kesehatan melayani wilayah yang luas dengan jumlah penduduk tertentu.

Berdasarkan hasil analisis tahun 2023, sebanyak 285 kecamatan (90,48%) telah masuk dalam kategori sangat baik atau kecamatan dengan rasio penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk <5 (Tabel 4.4). Mayoritas kecamatan di NTT (97,78%) telah memiliki rasio <15 atau gradasi hijau. Meskipun begitu, masih terdapat 2 kecamatan yang masuk dalam gradasi merah, yaitu kecamatan dengan rasio di atas 15. Kecamatan-kecamatan yang masuk dalam gradasi merah tersebut terdapat di Kabupaten Sumba Timur dan Kupang.

Tabel 4.4. Sebaran jumlah kecamatan indikator rasio tenaga kesehatan

Prioritas	Rasio Tenkes	Kategori	Jumlah	Percentase
Prioritas 1	≥ 30	Sangat Buruk	0	0
Prioritas 2	20 - < 30	Buruk	0	0
Prioritas 3	15 - < 20	Agak Buruk	2	0,63
Prioritas 4	10 - < 15	Agak Baik	3	0,95
Prioritas 5	5 - < 10	Baik	25	7,94
Prioritas 6	< 5	Sangat Baik	285	90,48
Total Jumlah Kecamatan			315	100

Sumber: Hasil analisis FSVA NTT 2023 menggunakan data Dinkesdukcapil NTT Tahun 2022.

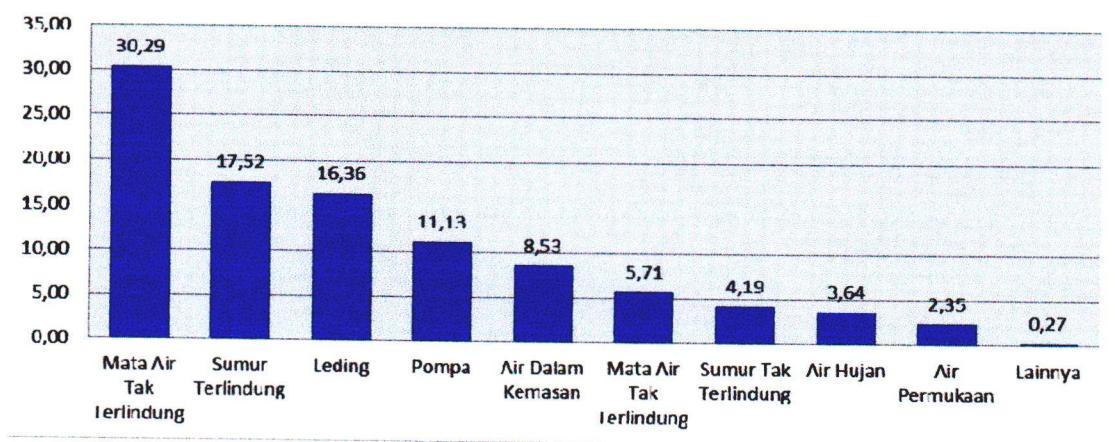
4.3. Akses ke Air Bersih

Air merupakan komponen esensial bagi sistem pangan (*food system*), baik untuk produksi pangan maupun pemanfaatan pangan. Akses terhadap air bersih merupakan aspek fundamental dalam ketahanan pangan dan gizi serta hubungannya dengan kesehatan manusia. Kualitas air bersih, khususnya yang digunakan untuk minum, mempengaruhi efektivitas penyerapan nutrisi oleh tubuh manusia (CFS, 2015). Rendahnya akses terhadap air bersih, sanitasi dan higiene dapat menurunkan status kesehatan individu melalui penyakit yang disebarluaskan melalui air dan infeksi usus kronis (HLPE, 2015), yang kemudian dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh tubuh.

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sumber air minum mayoritas rumah tangga di Provinsi NTT pada tahun 2022 berasal dari mata air terlindung (30,29%), disusul oleh sumur terlindung (17,52%) dan air leding (16,36%). Sumber-sumber tersebut masuk dalam salah satu kriteria sumber air minum bersih. Indikator yang digunakan dalam FSVA adalah persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, di mana sumber air bersih didefinisikan sebagai sumber air minum yang berasal dari leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung dan air hujan (tidak termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m.

Berdasarkan hasil analisis tahun 2023, sebanyak 111 kecamatan (35%) masuk dalam gradasi warna merah (Tabel 4.4), sedangkan 65% lainnya masuk dalam gradasi warna hijau. Di tahun 2023, mayoritas kecamatan di NTT (19,37%) masuk dalam kategori sangat buruk, yaitu kecamatan dengan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih sebesar 70% atau lebih.

Gambar 4.1. Persentase rumah tangga di NTT menurut sumber air minum utama



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). SUSENAS 2022.

Tabel 4.5. Sebaran jumlah kecamatan persentase rumah tangga tanpa akses air bersih

Prioritas	% Ruta Tanpa Akses Air Bersih	Kategori	Jumlah	Persentase
Prioritas 1	≥ 70	Sangat Buruk	61	19,37
Prioritas 2	60 - < 70	Buruk	16	5,08
Prioritas 3	50 - < 60	Agak Buruk	34	10,79
Prioritas 4	40 - < 50	Agak Baik	37	11,75
Prioritas 5	30 - < 40	Baik	37	11,75
Prioritas 6	< 30	Sangat Baik	130	41,27
Total Jumlah Kecamatan			309	100

Sumber: Hasil analisis FSVA NTT 2022 menggunakan data SAE dari SUSENAS Maret 2021.

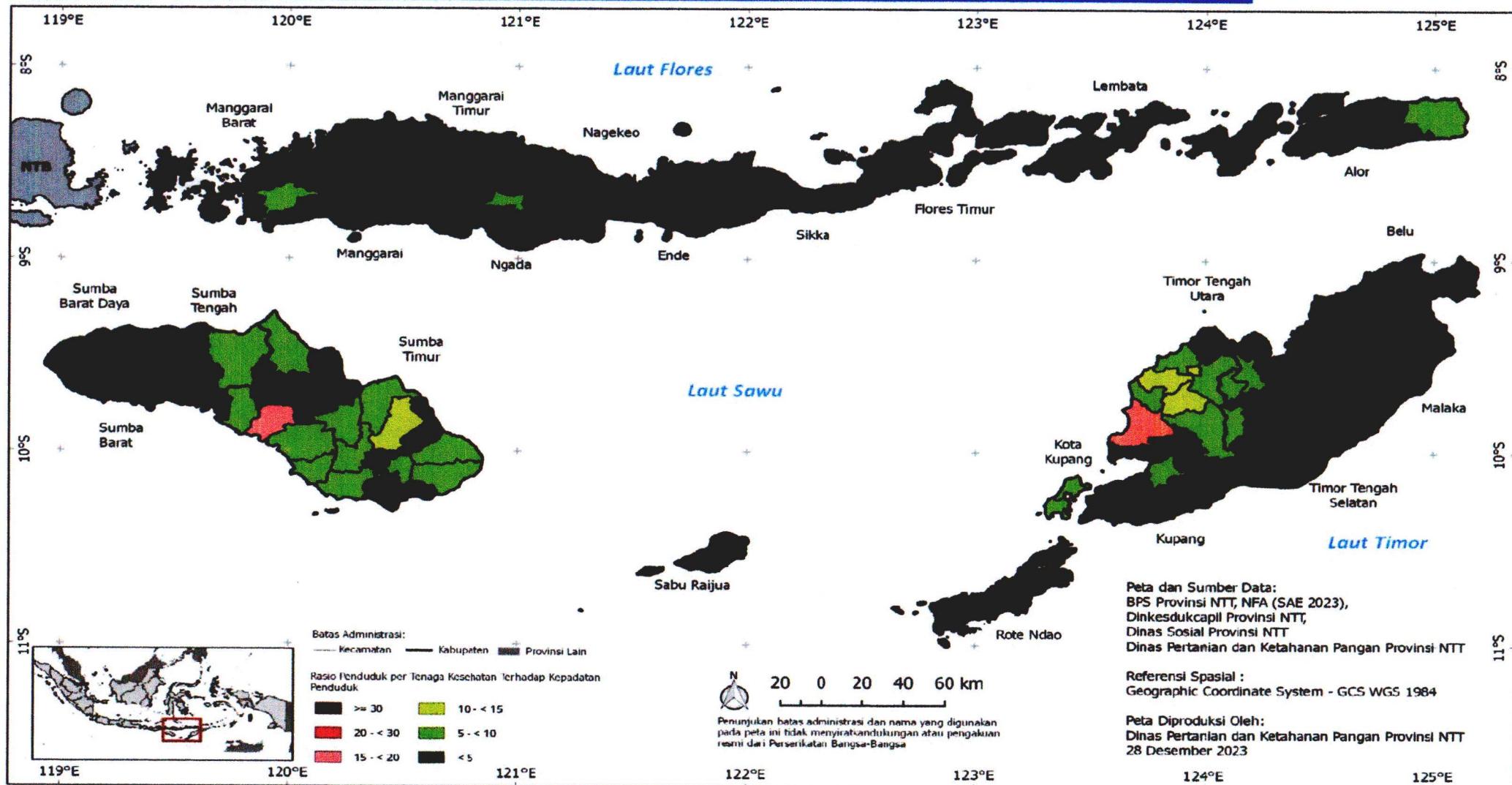
4.4. Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun

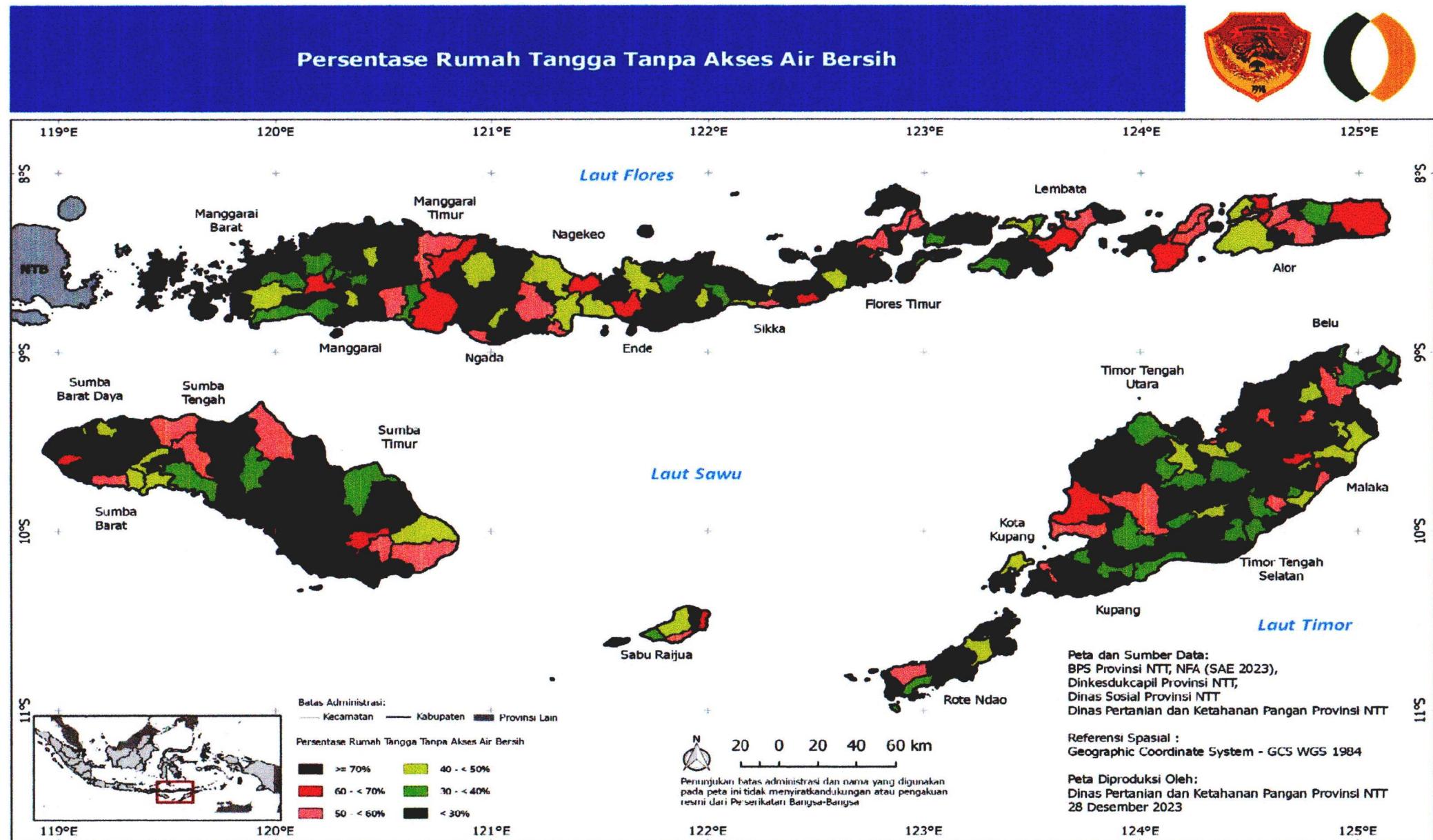
Pendidikan perempuan berasosiasi dengan pemanfaatan pangan di tingkat rumah tangga. Banyak studi yang telah menunjukkan bahwa perempuan punya peranan penting dalam memperbaiki ketahanan pangan rumah tangga, khususnya melalui pola konsumsi pangan. Penelitian Olumakaiye & Ajayi (2006) menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menyediakan makanan yang lebih bervariasi, yang kemudian berkontribusi dalam meningkatkan pola konsumsi pangan rumah tangga.

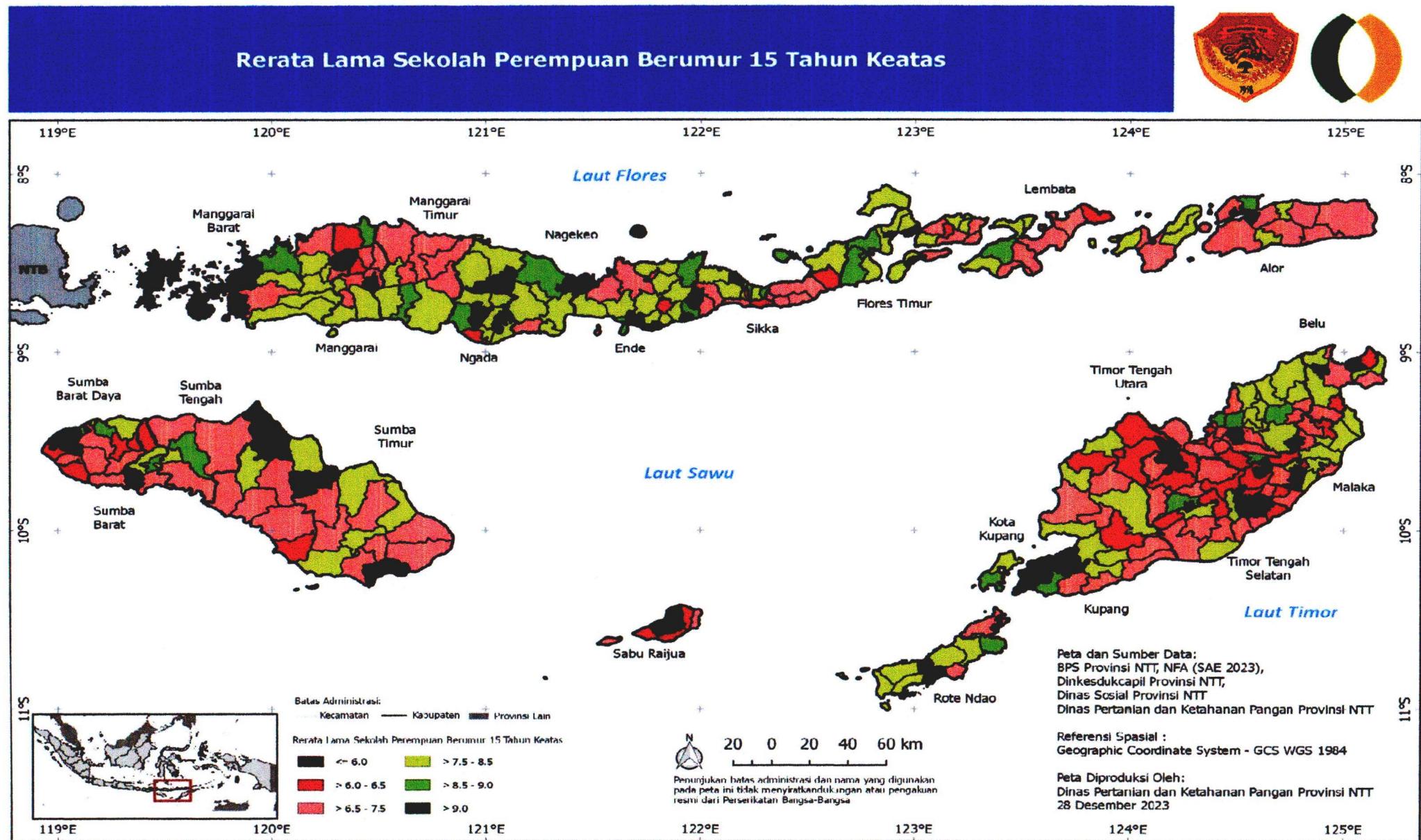
Selain itu, Asian Development Bank (2013) menyebutkan bahwa - melalui banyak studi di dunia - tingkat pendidikan perempuan berasosiasi dengan status kesehatan anak seperti tinggi badan, berat badan dan imunisasi. Perempuan memiliki peran krusial dalam menentukan kondisi kesehatan anak, melalui dua cara: 1) praktik pemberian makanan seperti pemberian ASI dan menyiapkan makanan yang sehat; dan 2) praktik hidup sehat (IFPRI, 1995).

Menurut BKP (2018), salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu di Indonesia adalah dengan meninjau durasi pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan ketersediaan data, durasi pendidikan tersedia untuk perempuan berusia di atas 15 tahun dan di atas 21 tahun. Usia 15 tahun dipilih karena berdasarkan data BPS tahun 2017 ada 25,71% perempuan berusia 20-24 tahun menikah pada saat mereka masih berusia di bawah 18 tahun.

Rasio Penduduk per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk







BAB 5

DAMPAK DARI STATUS GIZI DAN KESEHATAN



Status gizi dan kesehatan menjadi bagian terintegrasi dalam pembahasan terkait ketahanan pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) ikut melibatkan status gizi dan kesehatan dalam analisis ketahanan pangan komposit, yang direpresentasikan oleh beberapa indikator, yaitu: prevalensi anak di bawah 5 tahun yang memiliki tinggi badan di bawah standar (*stunting*) dan angka kesakitan (*morbidity*). Bab ini akan memberikan deskripsi terkait status gizi dan kesehatan dan asosiasinya dengan ketahanan dan kerentanan pangan.

5.1. Status Gizi

Status gizi dan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan pangan. Laporan terbaru dari FAO, IFAD, UNICEF, WFP dan WHO (2019) menjelaskan bahwa kondisi kerawanan pangan berasosiasi terhadap status gizi dan kesehatan di suatu populasi atau kelompok masyarakat. Status gizi dan kesehatan suatu populasi dapat direfleksikan oleh status gizi anak yang dimulai dari usia kandungan hingga 1000 hari kehidupan pertama atau usia 2 tahun. Status gizi anak dapat ditentukan oleh status kesehatan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak dapat diukur melalui 3 indikator:

- **Underweight:** rasio berat badan menurut umur -BB/U- di bawah - 2 standar deviasi dari median referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kekurangan gizi secara umum¹.
- **Pendek atau stunting:** rasio tinggi badan menurut umur -TB/U- di bawah - 2 standar deviasi dari median referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara terus-menerus, dalam jangka panjang dan kronis².
- **Kurus atau wasting:** rasio berat badan menurut tinggi badan -BB/TB- di bawah - 2 standar deviasi dari median referensi populasi WHO 2005, yang menggambarkan kurang gizi yang terjadi secara akut atau baru terjadi³.

Kondisi kerawanan pangan rumah tangga berasosiasi dengan risiko yang lebih tinggi terhadap masalah gizi dan kesehatan pada anak-anak dan remaja (Moradi *et al.*, 2018). Masalah ini menjadi krusial sebab kondisi kekurangan gizi (*undernutrition*) pada anak akan menyebabkan konsekuensi terhadap tumbuh kembang di fase setelahnya. Kurang gizi

¹ http://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_age/en/

² http://www.who.int/childgrowth/standards/height_for_age/en/

³ http://www.who.int/childgrowth/standards/weight_for_height/en/

berasosiasi dengan perkembangan kognitif yang lambat, pencapaian akademik yang rendah dan berakhir pada rendahnya produktivitas ekonomi pada usia remaja (Victoria *et al.*, 2008). Penelitian Dávila *et al* (2019) menunjukkan bahwa peluang terjadinya *stunting* pada anak 23 kali lebih besar di rumah tangga yang rawan pangan dibanding rumah tangga yang tahan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* pada anak-anak merupakan konsekuensi dari kerawanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan harus dapat mengatasi masalah akses pangan dan pemanfaatan pangan yang sehat dan bernutrisi untuk menjamin tumbuh kembang anak.

WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat di suatu negara, provinsi atau kabupaten berdasarkan prevalensi *underweight*, *stunting* dan *wasting* dalam populasi seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Klasifikasi WHO tentang prevalensi kurang gizi

Klasifikasi	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
Rendah	< 10%	< 20%	< 5% (Baik)
Sedang	10-19%	20-29%	5-9% (Kurang)
Tinggi	20-29%	30-39%	10-14% (Buruk)
Sangat Tinggi	≥ 30%	≥ 40%	≥ 15% (Sangat Buruk)

Sumber: WHO (2000)

Pada FSVA 2015 data *underweight* dan *stunting* tersedia, namun hanya data *stunting* yang disepakati untuk digunakan sebagai indikator ketahanan pangan komposit. Begitu pula pada FSVA 2019 sampai dengan 2023 data *stunting* disepakati untuk digunakan sebagai indikator untuk analisis indeks komposit ketahanan pangan. Pemilihan indikator tersebut dilakukan untuk memfasilitasi perbandingan dengan program-program pemerintah serta untuk memantau pengurangan angka prevalensi *stunting*, mengingat secara global *stunting* dipertimbangkan sebagai satu-satunya masalah gizi terpenting di Indonesia dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.2. Prevalensi kurang gizi pada balita menurut kabupaten, 2022

No	Kabupaten/Kota	<i>Underweight</i>	<i>Stunting</i>	<i>Wasting</i>
1	Sumba Barat	23,0	23,3	9,1
2	Sumba Timur	15,4	14,9	3,8
3	Kupang	24,2	19,9	11,3
4	Timor Tengah Selatan	29,9	28,3	10,9
5	Timor Tengah Utara	26,5	24,4	9,4
6	Belu	24,5	13,7	10,7
7	Alor	16,5	11,7	10,0
8	Lembata	20,1	16,0	11,8
9	Flores Timur	23,2	18,7	10,2
10	Sikka	21,8	13,8	10,6
11	Ende	15,4	8,9	6,9
12	Ngada	15,9	9,3	6,9
13	Manggarai	12,9	16,2	3,4
14	Rote Ndao	27,2	22,3	10,4
15	Manggarai Barat	15,1	15,9	6,3
16	Sumba Tengah	14,0	8,7	3,7

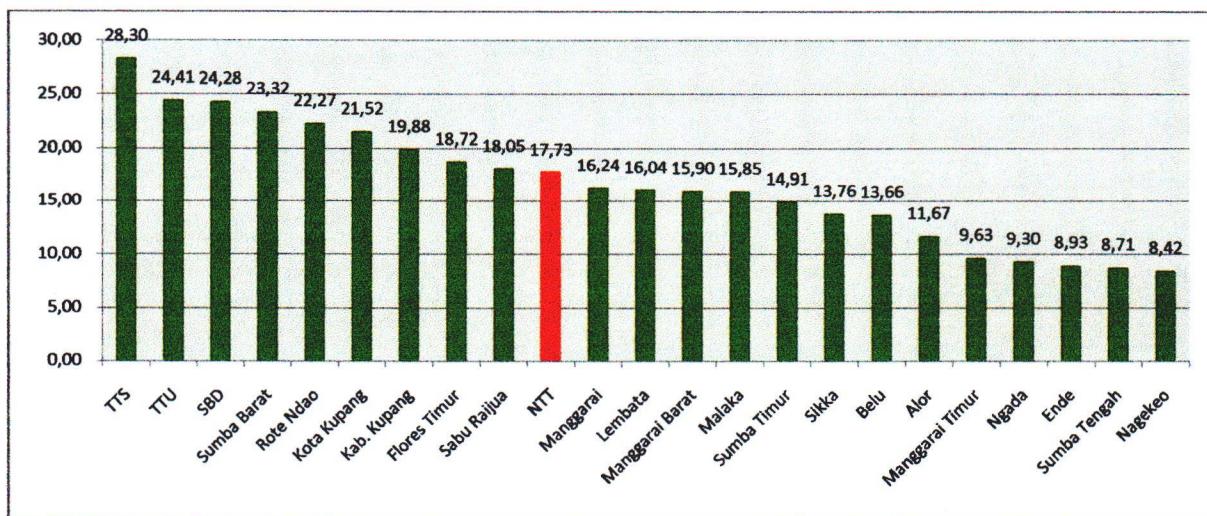
17	Sumba Barat Daya	20,7	24,3	7,2
18	Nagekeo	17,8	8,4	7,9
19	Manggarai Timur	9,0	9,6	4,5
20	Sabu Raijua	30,5	18,1	8,9
21	Malaka	22,9	15,9	11,2
22	Kota Kupang	20,5	21,5	11,2
Nusa Tenggara Timur		20,5	17,7	8,5

Sumber: Hasil Pemantauan Pertumbuhan melalui ePPGBM Tahun 2022

Data Pemantauan Pertumbuhan melalui elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Tahun 2022 menunjukkan bahwa NTT merupakan salah satu provinsi dengan status gizi balita terburuk di Indonesia, dilihat dari indikator prevalensi stunting, wasting dan underweight. Prevalensi balita stunting di NTT sebesar 17,7%, NTT merupakan provinsi dengan angka prosentase stunting dan underweight tertinggi di Indonesia, meskipun untuk prevalensi stunting menunjukkan adanya penurunan dari 20,9% di tahun 2021 (ePPGBM, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa status gizi balita di NTT masih menjadi permasalahan yang krusial untuk dituntaskan, terutama stunting. Oleh karena itu, penanganan stunting menjadi salah satu agenda pembangunan Provinsi NTT yang tercantum dalam dokumen RPJMD NTT 2018-2023.

Tabel 5.1 dan Gambar 5.2 menunjukkan bahwa pada tingkat kabupaten terdapat 2 kabupaten yang dikategorikan memiliki prevalensi stunting tinggi (30-39%) menurut klasifikasi WHO. Jumlah kabupaten dengan klasifikasi sangat tinggi berkurang dari yang sebelumnya berjumlah 2 kabupaten di tahun 2021 menjadi tidak ada masuk dalam klasifikasi sangat tinggi menurut WHO. Demikian juga jumlah kabupaten yang masuk ke dalam kategori prevalensi stunting tinggi (20-29%) berkurang dari yang sebelumnya 10 kabupaten di tahun 2021 menjadi 6 kabupaten di tahun 2022. Kabupaten Sumba Baratdaya dan TTSmerupakan kabupaten yang mengalami perbaikan status, dari prevalensi stunting kategori tinggi di tahun 2021 ke kategori sedang di tahun 2022.Serta kabupaten Kupang, Flores Timur, Sabu Raijua, Manggarai dan Lembata merupakan kabupaten yang mengalami perbaikan status dari prevalensi stunting kategori sedang di tahun 2021ke kategori rendah di tahun 2022.

Gambar 5.1. Prevalensi balita stunting menurut kabupaten/kota, 2022



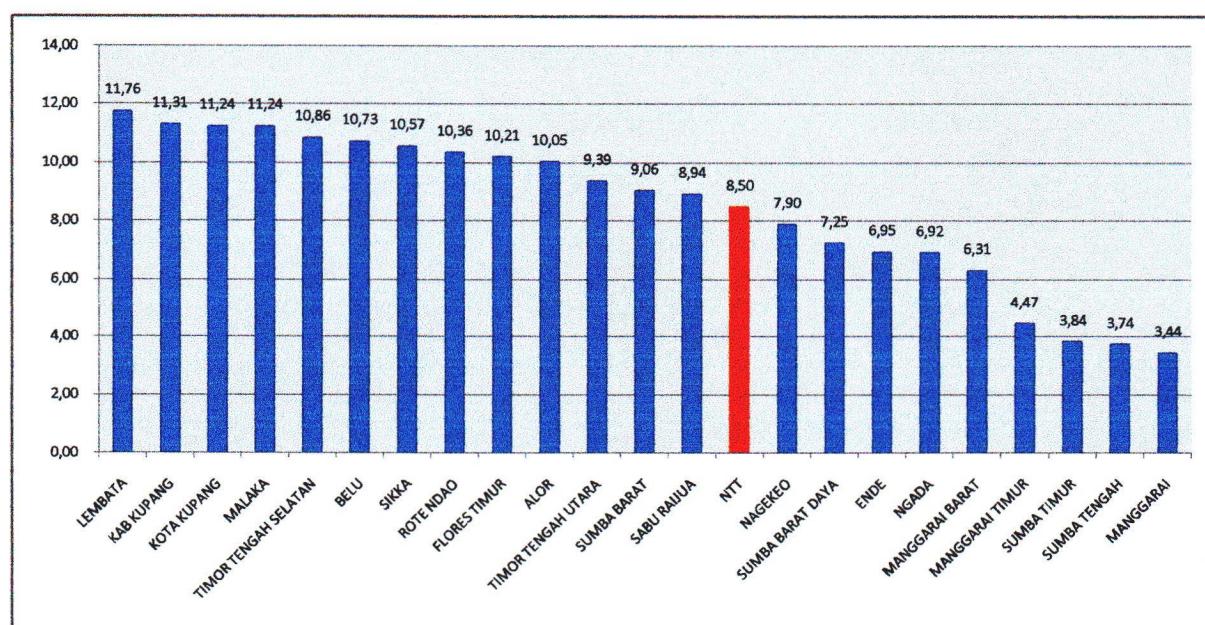
Sumber: Hasil Pemantauan Pertumbuhan melalui ePPGBM Tahun 2022

Prevalensi wasting di Provinsi NTT tahun 2021 sebesar 7,5% dan menurut klasifikasi WHO, masuk dalam kategori sedang (5 - <10%). Sebelumnya, angka wasting NTT di tahun 2020 masih berada di angka 9,8% (sedang). Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,3% dibandingkan kondisi tahun sebelumnya. Penurunan angka wasting di tahun 2022 tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan penurunan angka stunting. Hasil pemantauan pertumbuhan tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata dan Kab. Kupang merupakan 2 kabupaten dengan angka wasting tertinggi di NTT masing-masing sebesar 11,76 dan 11,31%, sedangkan angka terendah berada di 2 kabupaten yaitu Sumba Tengah dan Manggarai masing-masing sebesar 3,74% dan 3,44%. Mayoritas angka wasting

kabupaten di NTT masuk dalam kategori tinggi (10-<15%) (10 Kabupaten), kategori sedang (9 kabupaten) dan 4 kabupaten masuk dalam kategori rendah (2,5-<5%).

Buruknya kualitas pola konsumsi pangan atau ketidakmampuan secara fisik untuk menyerap zat-zat gizi dapat menyebabkan kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A dan yodium. Vitamin A merupakan zat gizi yang esensial bagi pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Kekurangan vitamin A pada anak dapat menyebabkan dapat menyebabkan kebutaan serta meningkatkan risiko kematian (Kemenkes, 2018). Selain itu, yodium juga berperan penting dalam perkembangan otak pada anak. Menurut WHO (2004), defisiensi yodium merupakan penyebab terbesar kerusakan otak pada anak yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya kemampuan intelektual dan kapasitas bekerja serta lemahnya performa anak di sekolah. Menurut hasil PSG 2017, sebanyak 75,80% rumah tangga di NTT sudah mengonsumsi garam beryodium. Angka tersebut masih berada di bawah rerata di tingkat nasional yaitu 92,90%. Rote Ndao merupakan kabupaten dengan persentase rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium terendah di NTT (20,60%), sedangkan angka tertinggi berada di Kabupaten Alor (99,70%). Kondisi ini perlu menjadi sorotan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten, guna mencegah timbulnya masalah kesehatan yang disebabkan defisiensi yodium.

Gambar 5.2. Prevalensi balita wasting menurut kabupaten/kota, 2022



Sumber: Hasil Pemantauan Pertumbuhan melalui ePPGBM Tahun 2022

Tabel 5.3. Sebaran jumlah kecamatan prevalensi balita *stunting*

Prioritas	Prevalensi Stunting (%)	Kategori	Jumlah	Persentase
Prioritas 1	≥ 40	Sangat Tinggi	7	2,22
Prioritas 2	35 - <40	Tinggi	31	9,84
Prioritas 3	30 - <35	Sedang	87	27,62
Prioritas 4	25 - < 30	Rendah	190	60,32
Total Jumlah Kecamatan			315	100

Sumber: Hasil analisis 2021

Berdasarkan hasil analisis tahun 2023, 315 kecamatan di NTT tersebar di 4 kategori berdasarkan klasifikasi WHO, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sebanyak 38 kecamatan (12%) masuk dalam kategori prevalensi *stunting* tinggi dan sangat tinggi (Tabel 5.3). Hal ini mengindikasikan bahwa prevalensi balita *stunting* di NTT masih dikategorikan tinggi. Namun, sebanyak 277 kecamatan (88%) telah masuk dalam kategori rendah, yaitu prevalensi di antara 25% hingga < 30%. Jumlah terbesar terdapat di Kabupaten TTS (14 kecamatan) dan disusul oleh TTU (9 kecamatan) serta Sumba Timur dan Kab. Kupang masing-masing 6 kecamatan.

5.2. Dampak dari Status Kesehatan

Kondisi ketahanan pangan memiliki kaitan dengan status kesehatan masyarakat. Penelitian Gunderson & Ziliak (2015) menjelaskan bahwa kondisi kerawanan pangan berasosiasi dengan tingginya risiko terkena penyakit seperti anemia dan asma, serta penyakit mental seperti depresi dan gangguan kognitif pada anak. Pada orang dewasa, kondisi kerawanan pangan berasosiasi dengan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes dan hiperlipidemia. Sub-bab ini akan membahas tentang status kesehatan di NTT ditinjau dari statistik angka kesakitan (*morbidity*) sebagai salah satu indikator komposit ketahanan pangan.

Penyakit Menular

Hasil Riskesdas 2018 mengindikasikan adanya penurunan pada prevalensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pneumonia di NTT. Prevalensi ISPA mengalami penurunan drastis dari 41,70% di tahun 2013 menjadi 15,4% di tahun 2017, sedangkan prevalensi pneumonia turun dari angka 10,30% ke angka 6,90%. Selain itu, prevalensi diare di NTT pada tahun 2017 juga ikut mengalami penurunan sebesar 4,30% dibanding tahun 2013, begitu pula dengan prevalensi malaria yang mengalami penurunan yang cukup jauh dari angka 10,30% di tahun 2013 menjadi 1,99% di tahun 2017. Ditinjau dari beberapa penyakit tersebut, dapat dilihat adanya penurunan angka prevalensi pada kelompok penyakit menular di NTT dibandingkan dengan tahun 2013.

Penyakit Tidak Menular

Selain penyakit menular, beberapa penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, asma dan hipertensi di NTT ikut ditinjau. Perbandingan hasil Riskesdas 2013 dan 2018 menunjukkan adanya sedikit penurunan pada prevalensi penyakit diabetes melitus pada umur ≥ 15 tahun di NTT, dari 1,20% di tahun 2013 menjadi 0,90 persen di tahun 2017. Penurunan juga terjadi pada penyakit asma. Prevalensi asma mengalami penurunan sebesar 5,80%. Sebaliknya, prevalensi hipertensi hasil pengukuran pada umur ≥ 18 tahun di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4,42% dibanding angka di tahun 2013. Beberapa hasil tersebut menunjukkan bahwa beberapa penyakit tidak menular di NTT mengalami penurunan prevalensi kecuali penyakit hipertensi.

Tabel 5.4. Sebaran jumlah kecamatan indikator angka kesakitan (*morbidity*)

Prioritas	% Angka Kesakitan	Kategori	Jumlah	Percentase
Prioritas 1	≥ 17	Sangat Buruk	118	37,46
Prioritas 2	14 - < 17	Buruk	29	9,21
Prioritas 3	12 - < 14	Agak Buruk	21	6,67
Prioritas 4	10 - < 12	Agak Baik	26	8,25
Prioritas 5	7 - < 10	Baik	52	16,51
Prioritas 6	< 7	Sangat Baik	69	21,90
Total Jumlah Kecamatan			315	100

Sumber: Hasil analisis FSVA NTT 2023 menggunakan data SAE dari SUSENAS Maret 2022.

Berdasarkan hasil analisis tahun 2023, sebanyak 37,46% kecamatan di NTT masuk dalam kategori sangat buruk, yaitu kecamatan dengan angka kesakitan $\geq 17\%$ (Tabel 5.4). Dari 315 kecamatan yang dianalisis terdapat 147 kecamatan yang masuk dalam gradasi warna hijau, yang terdiri dari 26 kecamatan kategori agak baik, 52 kecamatan kategori baik dan 69 kecamatan sangat baik. Kecamatan-kecamatan gradasi hijau tersebut tersebar di 22 kabupaten/kota, dengan jumlah kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Sikka (21 kecamatan).

5.3. Strategi untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

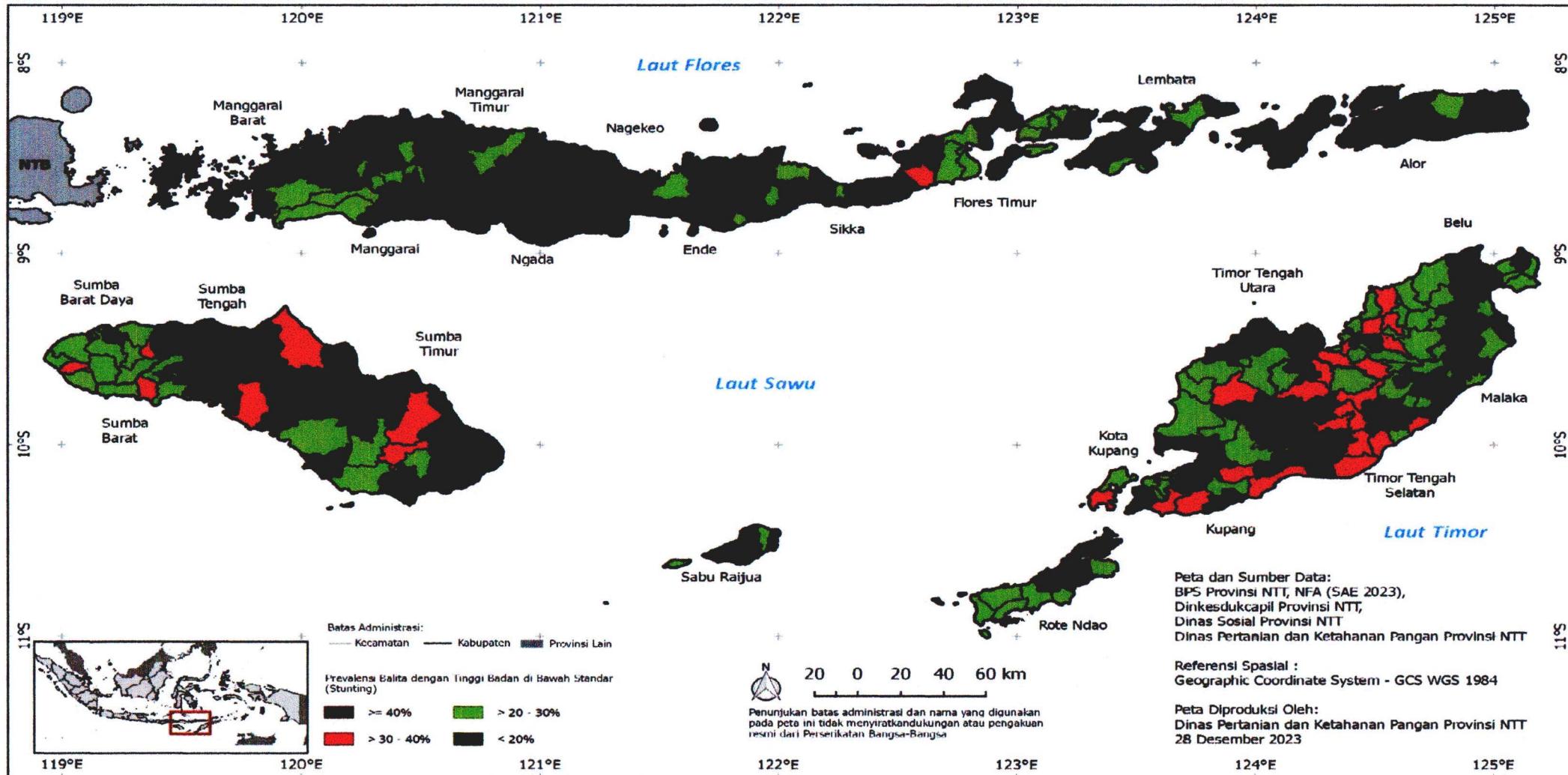
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2018-2023 telah mencantumkan penanggulangan masalah gizi balita dan kesehatan masyarakat sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai. Salah satu tujuan dalam Visi IV RPJMD NTT 2018-2023 adalah meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk. Berikut adalah sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD NTT 2018-2023:

1. Meningkatnya akses layanan kesehatan.
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan.
3. Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita.

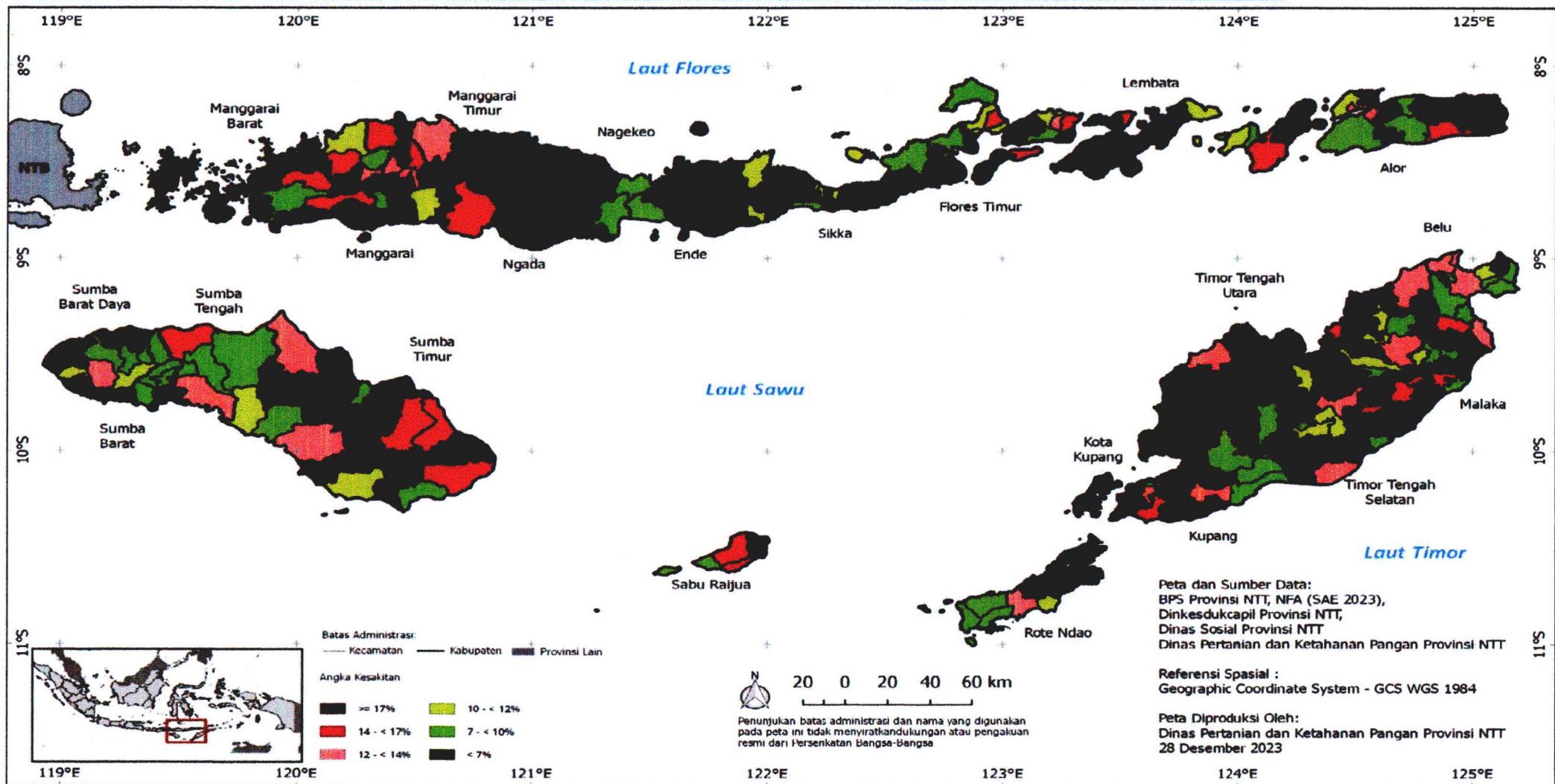
Terkait dengan penanggulangan masalah gizi balita, pemerintah Provinsi NTT dalam dokumen RPJMD Perubahan menargetkan untuk menurunkan prevalensi balita stunting menjadi 12% di tahun 2023. Selain itu, menurunkan prevalensi balita wasting dan underweight masing-masing ke angka 6% dan 14,2%. Berikut adalah beberapa strategi yang disusun untuk mencapai sasaran-saran tersebut.

1. Penyediaan Puskesmas Terapung dan Flying Health Care dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan pada wilayah terisolir.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
3. Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Penduduk, terutama Penduduk Miskin.
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan.
5. Peningkatan Kualitas Rumah Sakit dan Puskesmas.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
7. Perbaikan Status Gizi Ibu dan Anak.
8. Peningkatan Cakupan Imunisasi.
9. Pemenuhan SPM Kesehatan.

Prevalensi Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting)



Angka Kesakitan



BAB 6

FAKTOR IKLIM DAN LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN PANGAN

Kerentanan terhadap bencana alam dan gangguan mendadak lainnya dapat mempengaruhi



ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah baik bersifat sementara maupun jangka waktu panjang. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara sementara dikenal sebagai kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Bencana alam yang terjadi tiba-tiba, maupun perubahan harga atau goncangan terhadap pasar, epidemik penyakit, konflik sosial dan lain-lain dapat menyebabkan terjadinya kerawanan pangan transien (sementara). Kerawanan pangan transien dapat berpengaruh terhadap satu atau semua aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

Kerawanan pangan transien dapat dibagi menjadi dua yaitu: berulang (*cyclical*), di mana terdapat suatu pola yang berulang terhadap kondisi rawan pangan, misalnya, "musim paceklik" yang terjadi dalam periode sebelum panen, dan temporal (*temporary*) yang merupakan hasil dari suatu gangguan mendadak dari luar pada jangka pendek seperti kekeringan atau banjir. Konflik sipil juga termasuk dalam kategori guncangan (*shock*) temporal walaupun dampak negatifnya terhadap ketahanan pangan dapat berlanjut untuk jangka waktu lama. Dengan kata lain, kerawanan pangan transien dapat mempengaruhi orang-orang yang berada pada kondisi rawan pangan kronis dan juga orang-orang yang berada pada keadaan tahan pangan.

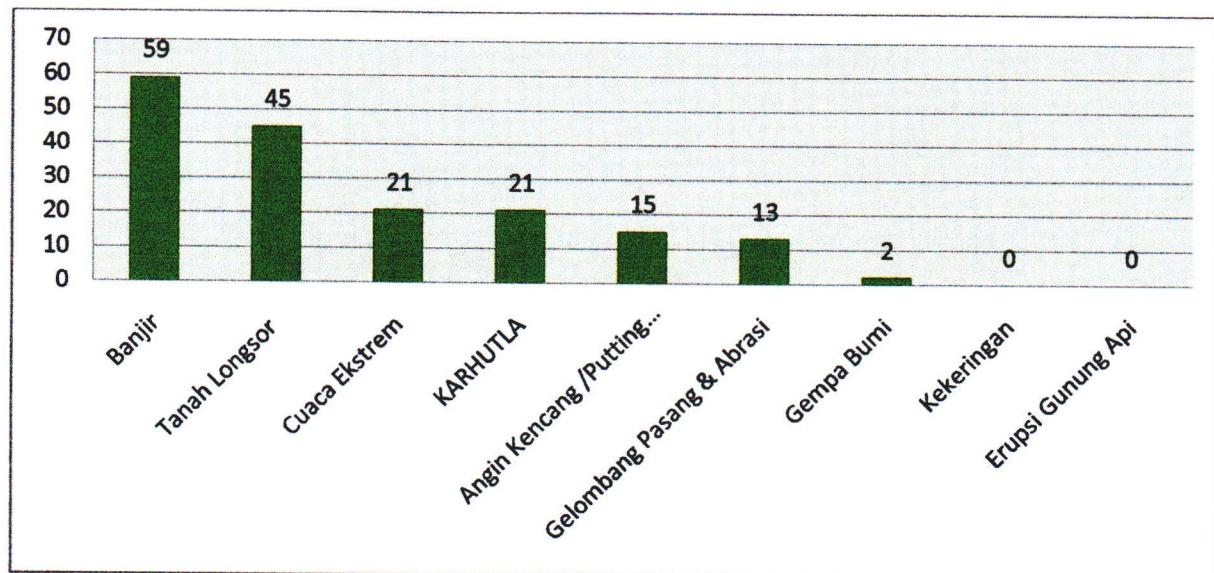
Di dalam bab ini kerawanan pangan dianalisa dari segi iklim dan lingkungan. Faktor iklim dan lingkungan serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi goncangan sangat menentukan apakah suatu negara atau wilayah dapat mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan gizinya. Tinjauan ketahanan pangan dan gizi ini berdasarkan pada dampak dari berbagai bencana alam dan degradasi lingkungan terhadap ketersediaan dan akses pangan. Deforestasi hutan, variabilitas curah hujan dan daerah yang terkena banjir dan tanah longsor, merupakan beberapa indikator yang digunakan untuk menjelaskan kerawanan pangan transien di Provinsi NTT.

Guna melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi iklim yang mempengaruhi kerawanan pangan transien, empat faktor utama dianalisis dalam FSVA NTT 2020 yaitu: i) data kejadian bencana alam yang terjadi di tingkat kabupaten; ii) estimasi kehilangan produksi padi akibat banjir dan kekeringan; iii) kekuatan pengaruh *El Niño/Southern Oscillation* (ENSO) yang menyebabkan variabilitas curah hujan; dan iv) tingkat deforestasi hutan.

6.1. Bencana Alam dan Variabilitas Curah Hujan

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana alam, khususnya kekeringan, banjir, dan angin puting beliung. BPBD Provinsi NTT mencatat 402 kejadian bencana alam klimatologis sepanjang tahun 2020. Bencana klimatologis merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor iklim (tidak mengikutsertakan konflik sosial, kebakaran rumah, dan erupsi gunung berapi). Kejadian bencana klimatologis tahun 2020 didominasi oleh angin puting beliung (169 kejadian), disusul oleh banjir dan longsor (masing-masing 53 kejadian) (lihat Gambar 6.1).

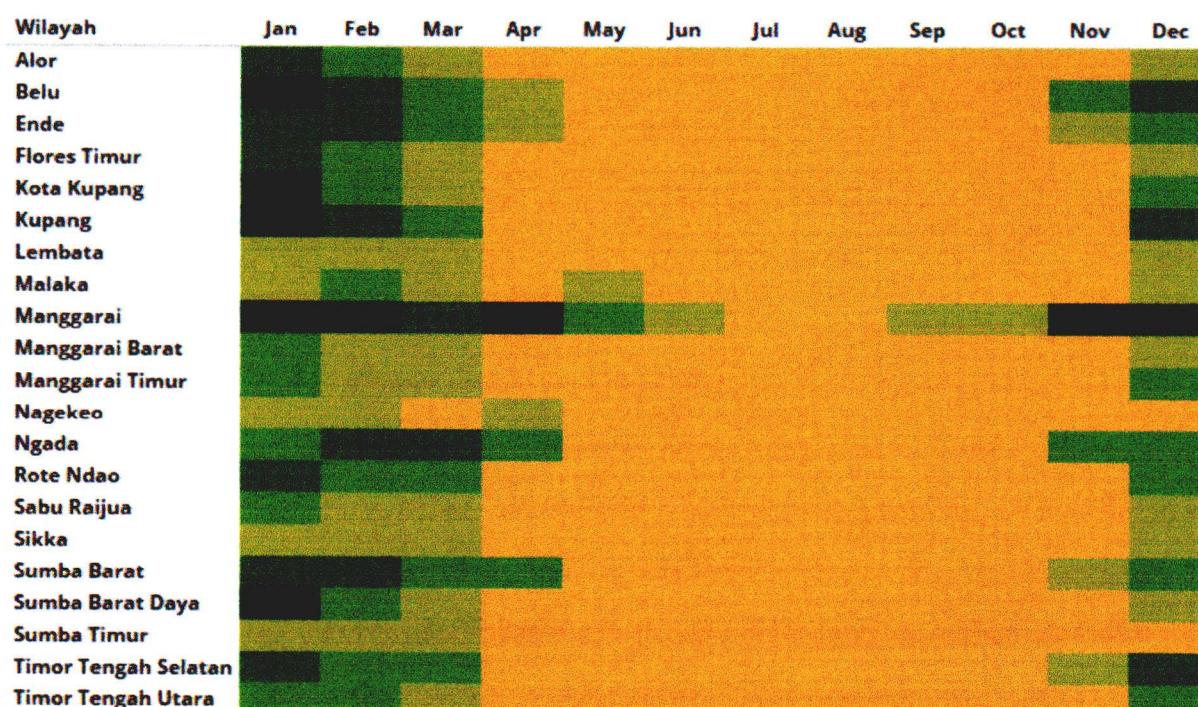
Gambar 6.1. Jumlah kejadian bencana alam klimatologis menurut jenis bencana, 2022



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT

Variabilitas iklim secara langsung mempengaruhi berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi, khususnya ketersediaan dan akses pangan. FAO (2008) menjelaskan bahwa pertanian sangat sensitif terhadap iklim. Variasi curah hujan merupakan salah satu elemen yang berkaitan dengan berbagai kejadian bencana alam seperti kekeringan, banjir, banjir bandang dan longsor. Variasi curah hujan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik global, regional maupun lokal. Faktor iklim global antara lain fenomena *El Niño*, *La Niña*, *Dipole Mode* dan *Madden Julian Oscillation* (MJO); sedangkan faktor regional diantaranya sirkulasi monsun Asia-Australia, daerah pertemuan angin antar tropis atau *Inter-Tropical Convergence Zone* (ITCZ) dan suhu permukaan laut (SPL) perairan Indonesia; dan faktor lokal yang berpengaruh adalah ketinggian tempat, posisi bentangan suatu pulau, sirkulasi angin darat dan angin laut serta tutupan lahan suatu wilayah.

Gambar 6.2. Heat map curah hujan per kabupaten/kota, 2014-2019



Berdasarkan analisis terhadap data curah hujan di wilayah NTT tahun 2014-2019 dari BMKG NTT, Provinsi NTT memasuki musim penghujan di bulan Desember, meskipun sebagian kabupaten telah menunjukkan peningkatan curah hujan di bulan November. Musim penghujan berlangsung hingga bulan Maret. Namun, beberapa kabupaten seperti Manggarai, Nagekeo, Ngada dan Sumba Barat dapat mencapai bulan April. Gambar 6.2 menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai memiliki jumlah bulan basah yang lebih banyak. Wilayah Flores masih memiliki rerata curah hujan lebih besar di banding wilayah lain ketika memasuki bulan April-Mei, saat wilayah lain telah mengalami penurunan curah hujan dan memasuki musim kemarau.

Menurut Kuswanto *et al.* (2019), kejadian iklim global yang paling berdampak buruk bagi wilayah NTT khususnya sektor pertanian adalah ENSO atau *El Niño-Southern Oscillation*. ENSO merupakan kombinasi kedua fase yaitu *El Niño* dan *La-Niña*. *El Niño* adalah fenomena peningkatan suhu permukaan laut yang terjadi di seluruh zona ekuatorial dan timur Samudera Pasifik, sedang *La-Niña* merupakan kebalikan dari *El Niño* (FAO dan World Bank, 2019). Fenomena ini dapat mempengaruhi sirkulasi atmosferik global dan dapat menyebabkan kegagalan produksi pertanian, khususnya tanaman pangan di NTT (Aris *et al.*, 2016).

Umumnya wilayah NTT memiliki pola hujan monsunal yakni wilayah-wilayah yang mengalami perbedaan curah hujan yang tegas antara musim hujan dengan musim kemarau. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sirkulasi angin monsun (Asia-Australia). Pada saat Monsun Asia terjadi angin baratan melewati Samudera Hindia dan membawa uap air ke daratan NTT sehingga pembentukan awan dan potensi terjadinya hujan relatif besar di permukaan wilayah NTT. Sebaliknya, ketika monsun Australia terjadi angin timur dengan kandungan uap sedikit melewati NTT sehingga sulit terbentuknya awan, potensi turunnya hujan kecil dan menyebabkan wilayah ini relatif kering.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap variasi curah hujan NTT adalah fluktuasi SPL baik di perairan Indonesia maupun SPL Samudera Pasifik Tengah. Apabila SPL perairan Indonesia panas maka uap air yang terangkat (penguapan) ke permukaan akan lebih banyak. Dalam waktu bersamaan, jika SPL Samudera Pasifik Tengah dingin (anomali negatif) dan terjadi *La Niña* 89 maka sirkulasi global (Walker) akan membawa uap air ke wilayah Indonesia. Dengan demikian uap air akan terakumulasi di wilayah ini, terbentuknya awan semakin banyak dan potensi turunnya akan lebih besar. Sebaliknya curah hujan di seluruh wilayah NTT akan relatif rendah ketika suhu perairannya lebih dingin dari keadaan normal. Pada periode *El Niño*, SST di Samudera Pasifik Tengah lebih hangat dari biasanya akan menyebabkan kegagalan pola angin normal yang biasanya membawa arus hangat ke Indonesia. Fenomena ini terlihat dari hubungan yang kuat antara kenaikan SPL di Samudera Pasifik Tengah (ukuran standar sinyal ENSO) dengan kekeringan di Indonesia. Kekeringan di NTT sering menyebabkan penurunan produksi pangan, mengingat sebagian besar wilayah NTT merupakan daerah tanpa irigasi. NTT membutuhkan pemantauan situasi ketahanan pangan yang serius selama musim kering, terutama di tahun *El Niño*.

Peta 6.2 menggambarkan perubahan curah hujan bulanan yang disebabkan oleh perubahan suhu permukaan laut (SPL) sebesar 1°C di Samudera Pasifik Tengah pada Niño 3.4. Daerah yang berwarna merah menunjukkan resiko berkurangnya curah hujan yang sangat tinggi sedangkan warna kuning muda menunjukkan resiko berkurangnya curah hujan yang sangat rendah. Setiap piksel pada peta mewakili daerah seluas $5,6 \times 5,6 \text{ km}$. Hampir seluruh kabupaten di NTT memiliki resiko berkurangnya curah hujan yang berkaitan dengan kejadian *El Niño*.

Peta 6.3 mengklasifikasikan kecamatan-kecamatan berdasarkan rata-rata penurunan curah hujan bulanan yang berhubungan dengan perubahan SPL di Samudera Pasifik Tengah. Kecamatan-kecamatan yang berwarna merah gelap memiliki perubahan negatif curah hujan terbesar yang berhubungan dengan kenaikan SPL yaitu Kabupaten Manggarai, diikuti oleh Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Ende. Mayoritas kabupaten yang mengalami penurunan curah hujan berada di Pulau Flores. Kabupaten-kabupaten ini membutuhkan pemantauan situasi ketahanan pangan khususnya dalam hubungannya dengan produksi pangan pada tahun-tahun *El Niño* (tahun kering). Variasi curah hujan cenderung akan merugikan pertanian berkelanjutan kecuali sistem irigasi dan penyimpanan air (waduk atau dam) diperbaiki. Tidak ada kecamatan yang diperkirakan akan mengalami peningkatan curah hujan yang disebabkan oleh kejadian *El Niño*.

6.2. Kehilangan Produksi yang Disebabkan oleh Kekeringan, Banjir dan OPT

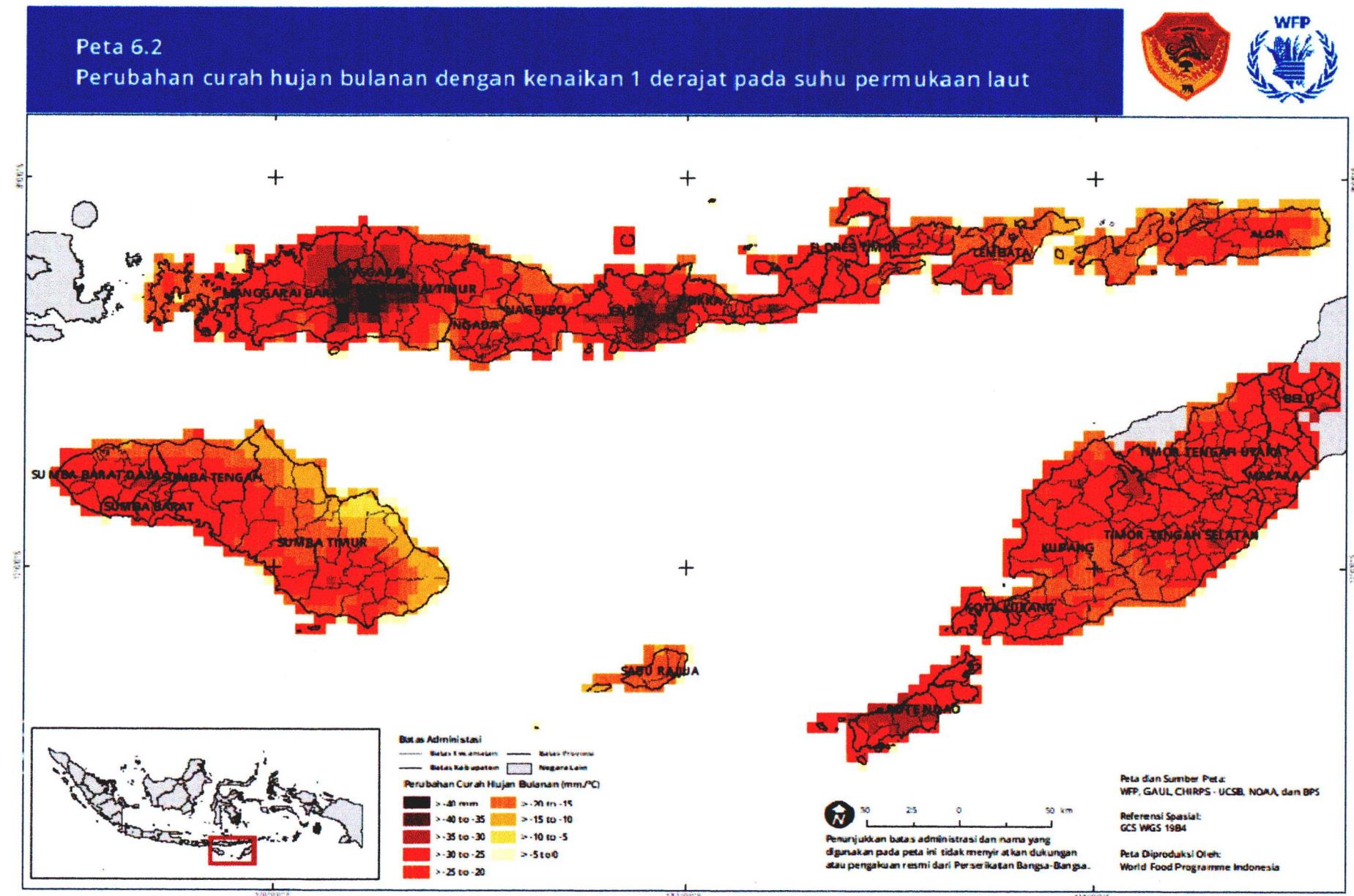
Daerah yang rusak didefinisikan sebagai suatu daerah yang produksi pangannya menurun akibat bencana alam (banjir, kekeringan) dan atau penularan hama oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Pengaruh iklim yang ekstrim pada musim hujan menyebabkan banjir, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan. Iklim juga dapat menyebabkan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara eksplisit: OPT yang berbeda dapat berkembang pada kondisi yang lebih basah atau lebih kering, yang dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak sempurna dan kemungkinan gagal panen (IPCC, 2014).

Tabel 6.1 menunjukkan luas kerusakan tanaman pada 4 komoditas serealia dan umbi-umbian utama (padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar) menurut kabupaten/kota sepanjang tahun 2022. Dari komoditas-komoditas tersebut, luas puso terbesar berada pada komoditas jagung dengan luas puso sebesar 54 hektar lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 10.908 hektar. Di sisi lain, luas puso pada tanaman padi sebesar 32 hektar lebih rendah dibanding luas puso tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.335 hektar. Luas puso tanaman padi lebih kecil 58,45% dari luas puso pada tanaman jagung. Luas puso tiap komoditas di masing-masing kabupaten bervariasi. Namun secara umum, Kabupaten Malaka, TTS dan Kab.Kupang merupakan wilayah dengan luas puso yang relatif besar untuk tiap kabupaten.

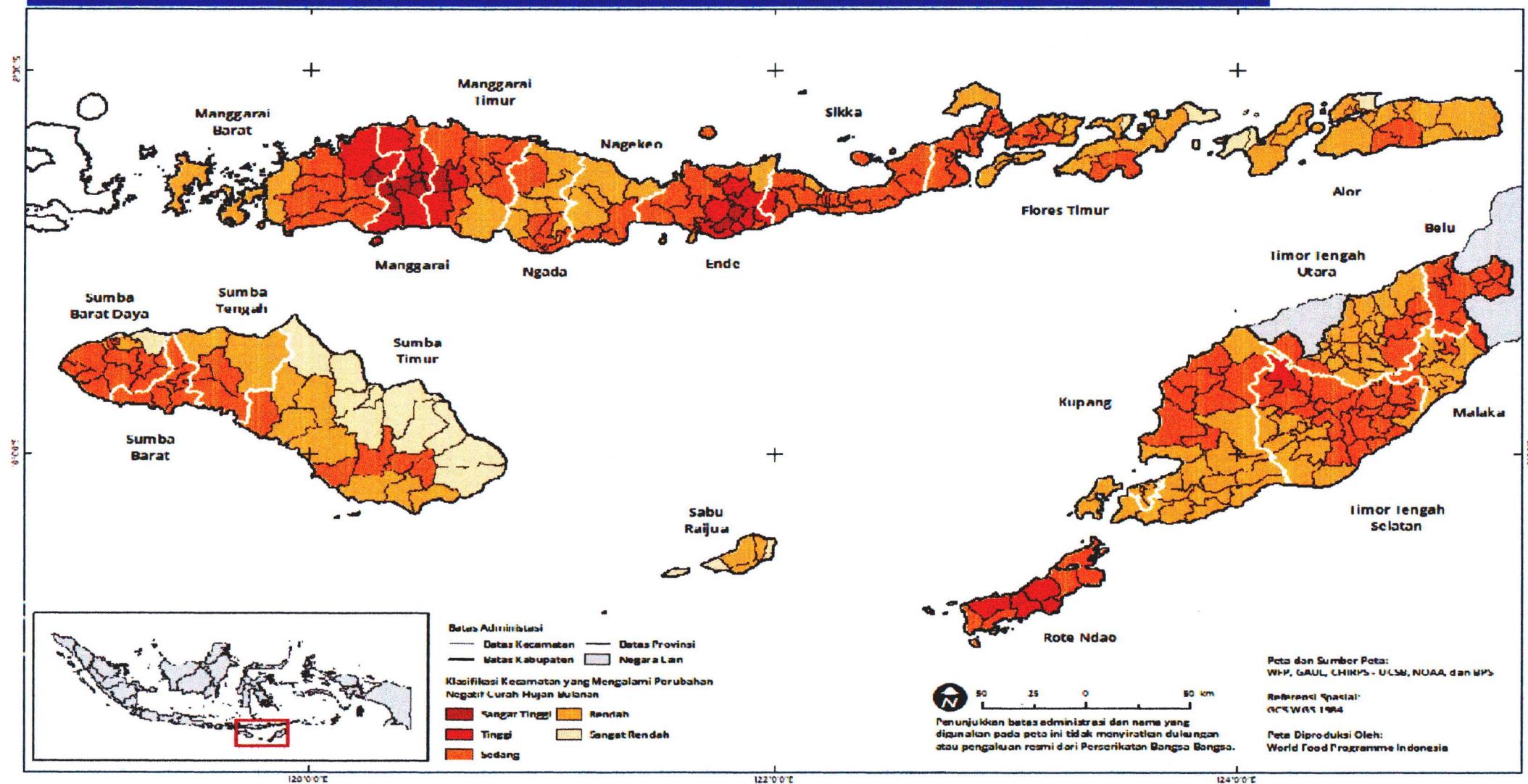
Tabel 6.1. Luas puso menurut komoditas dan kabupaten/kota, 2022

Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
Sumba Barat	-	-	-	-
Sumba Timur	-	-	-	-
Kupang	3	1,50	-	-
Timor Tengah Selatan	23	27	11	-
Timor Tengah Utara	-	-	-	-
Belu	-	-	-	-
Alor	-	-	-	-
Lembata	-	-	1	-
Flores Timur	5	1	-	-
Sikka	0,30	-	0,25	-
Ende	-	-	-	-
Ngada	-	0,11	-	-
Manggarai	-	-	-	-
Rote Ndao	-	-	-	-
Manggarai Barat	0,30	-	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	-
Nagekeo	-	-	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	-
Sabu Raijua	-	-	-	-
Malaka	-	24,45	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	32	54	12	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT



Peta 6.3
Klasifikasi Kecamatan yang Mengalami Perubahan Negatif Curah Hujan Bulanan



BAB 7

ANALISIS KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT



7.1. Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ketahanan pangan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menurut kaitannya dengan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food access*) dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Sebanyak 9 indikator yang mencakup 3 (tiga) dimensi ketahanan pangan telah ditetapkan untuk digunakan dalam FSVA NTT 2021, berdasarkan kelengkapan data dan kontinuitas data di tingkat kecamatan. Definisi indikator dapat dilihat pada Tabel 1.1 (Bab 1) sedangkan hubungan antara indikator dan ketahanan pangan dijelaskan secara rinci pada Bab 2 (Ketersediaan Pangan) sampai Bab 5 (Pemanfaatan Pangan).

Analisis ketahanan dan kerentanan pangan komposit pada FSVA NTT 2023 dilakukan dengan metode pembobotan pada 9 (sembilan) indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis. Penggunaan pembobotan dalam FSVA didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh indikator dalam menentukan status ketahanan pangan suatu wilayah. Penentuan bobot dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian para ahli (*expert judgement*). FSVA NTT 2023 ini menggunakan metode analisis indeks komposit yang sama dengan FSVA NTT 2021. Titik potong indikator individu maupun titik potong indeks komposit yang digunakan mengikuti FSVA NTT 2021. Perbedaan hanya terdapat pada perhitungan rasio normatif konsumsi terhadap ketersediaan pangan (NCPR), di mana perhitungan rasio mengikuti sertakan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD).

Kecamatan-kecamatan yang dianalisis diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kecamatan yang masuk dalam prioritas penanganan 1, 2 dan 3 dikategorikan sebagai rentan rawan pangan dengan klasifikasi prioritas 1 tingkat rentan tinggi, prioritas 2 rentan sedang, dan prioritas 3 rentan rendah. Kecamatan prioritas penanganan 4, 5, dan 6 dikategorikan tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi. Kecamatan dipetakan dalam warna merah untuk kelompok prioritas 1, 2, dan 3, dan warna hijau untuk prioritas 4, 5 dan 6 (Peta 7.1).

Sebagai catatan penting, tidak semua rumah tangga atau individu yang tinggal di kecamatan-kecamatan rentan rawan pangan (Prioritas 1 – 3) tergolong rawan pangan, demikian juga tidak semua rumah tangga di kecamatan-kecamatan prioritas rendah (Prioritas 4-6) tergolong tahan pangan. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk mengidentifikasi kecamatan yang lebih rentan terhadap kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Pada FSVA 2023 ini menganalisis sebanyak 315 kecamatan yang terdiri dari 309 kecamatan di wilayah kabupaten dan 6 kecamatan di Kota Kupang. Kecamatan di wilayah kabupaten dan kecamatan di wilayah kota dianalisis dengan menggunakan metode yang berbeda. Penjelasan terkait metode analisis dapat dilihat pada sub-bab metodologi (lihat Bab I).

Analisis Kecamatan Secara Umum

Berdasarkan hasil analisis indeks komposit ketahanan pangan tahun 2023, sebanyak 64 dari 315 (20,32%) kecamatan di Provinsi NTT dikategorikan rentan rawan pangan dan mayoritas kecamatan (94 kecamatan atau 29,84% dari total kecamatan) berada dalam Prioritas 5, seluruh kecamatan rentan rawan pangan (64 kecamatan) berada di wilayah kabupaten, sedangkan di Kota Kupang tidak terdapat kecamatan rentan.

Tabel 7.1. Sebaran kecamatan menurut prioritas dan wilayah, FSVA 2023

Prioritas Penanganan	Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Percentase
Prioritas Penanganan 1	4	1	4	1,27
Prioritas Penanganan 2	10	0	12	3,81
Prioritas Penanganan 3	65	0	48	15,24
Prioritas Penanganan 4	114	0	88	27,94
Prioritas Penanganan 5	88	1	94	29,84
Prioritas Penanganan 6	22	4	69	21,90
Jumlah	303	6	315	100

Sumber: Analisis FSVA NTT 2023

1. Analisis Kecamatan di Wilayah Kabupaten

Sebanyak 309 kecamatan di wilayah kabupaten dikelompokkan ke dalam enam kelompok prioritas dengan pembagian sebagai berikut: 4 kecamatan prioritas 1 (1,27%), 12 kecamatan prioritas 2 (3,81%), 48 kecamatan prioritas 3 (15,24%), 88 kecamatan prioritas 4 (27,94%), 93 kecamatan prioritas 5 (30,10%), dan 64 kecamatan prioritas 6 (20,71%). Total kecamatan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) berjumlah 64 kecamatan, sedangkan kecamatan tahan pangan (prioritas 4-6) berjumlah 245 kecamatan.

Tabel 7.2. Sebaran prioritas kecamatan di setiap kabupaten (dalam %)

Kabupaten	Prioritas Penanganan						Total
	1	2	3	4	5	6	
Sumba Barat	0	0	0	0	67	33	100
Sumba Timur	0	0	27	32	23	18	100
Kupang	0	0	25	29	29	17	100
Timor Tengah Selatan	0	0	6	31	47	16	100
Timor Tengah Utara	0	8	17	50	17	8	100
Belu	0	0	17	8	33	42	100
Alor	0	0	12	35	53	6	100
Lembata	0	11	33	44	0	11	100
Flores Timur	0	5	11	37	26	21	100
Sikka	0	5	10	24	29	33	100
Ende	0	10	14	33	33	10	100
Ngada	0	0	8	17	8	67	100
Manggarai	0	0	0	17	42	42	100
Rote Ndao	10	0	10	50	30	10	100
Manggarai Barat	0	0	0	17	42	42	100
Sumba Tengah	0	0	60	20	20	20	100
Sumba Barat Daya	0	18	36	18	27	0	100
Nagekeo	0	14	0	0	29	57	100

Manggarai Timur	11	0	56	56	11	0	100
Sabu Raijua	33	33	17	17	0	0	100
Malaka	0	0	8	17	50	25	100
Total	1	4	16	29	31	21	100

Sumber: Analisis FSVA NTT 2023

Tabel 7.2. menunjukkan sebaran prioritas kecamatan di setiap kabupaten. Kecamatan Prioritas 1 (paling rentan) tersebar di 3 kabupaten dengan proporsi terbesar terdapat di Kabupaten Sabu Raijua di mana 33% kecamatan di kabupaten tersebut masuk dalam kategori tersebut. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Kecamatan Prioritas 2 tersebar di 8 kabupaten dengan proporsi terbesar pada Kabupaten Sabu Raijua sebesar 33%, serta kecamatan Prioritas 3 tersebar di 17 kabupaten dengan proporsi terbesar pada Kabupaten Sumba Tengah sebesar 60%. Selain itu, dari seluruh kabupaten, hanya Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Nagekeo yang tidak memiliki kecamatan rentan.

Secara umum, karakteristik kerentanan di 64 kecamatan rentan di wilayah kabupaten meliputi:

- Tingginya Angka Kemiskinan
- rendahnya akses terhadap air bersih dan tingginya angka kesakitan
- rendahnya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih seralia dan umbi-umbian (NCPR)
- rendahnya lama sekolah perempuan > 18 tahun dan tingginya persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan yang tinggi serta tingginya prevalensi balita *stunting*

Namun, perlu diperhatikan bahwa indikator-indikator tersebut merupakan gambaran umum dari seluruh kecamatan prioritas rentan. Setiap kecamatan rentan dapat memiliki karakteristik faktor penyebab kerentanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, intervensi daerah rentan rawan pangan perlu memperhatikan secara rinci satu per satu karakteristik kerentanan tiap kecamatan.

Tabel 7.3. Rata-rata skor indikator kelompok kecamatan rentan dan tahan di kabupaten

Indikator	Rentan	Tahan
Rasio konsumsi normatif konsumsi per kapita terhadap ketersediaan	63,96	84,43
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	21,45	66,61
Persentase RT dengan Pengeluaran Makanan >65% dari Total	48,59	58,15
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik	91,52	93,90
Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih	37,95	63,70
Angka Kesakitan	52,53	65,78
Rasio Jumlah Penduduk per Tenkes terhadap Kepadatan Penduduk	88,81	90,16
Rerata Lama Sekolah Perempuan Berusia > 15 Tahun	42,17	46,94
Prevalensi Balita dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting)	65,35	68,20

Sumber: Analisis FSVA NTT 2023

Rata-rata skor terstandarisasi untuk tiap indikator di kecamatan rentan dan tahan pangan ditampilkan pada Tabel 7.3. Semakin tinggi skor indikator, maka semakin baik kondisi indikator tersebut. Secara umum, situasi kecamatan kategori tahan pangan untuk seluruh indikator individu lebih baik dibandingkan kecamatan rentan rawan pangan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa skor untuk Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah skor terendah dari indikator yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di wilayah kabupaten membutuhkan perhatian untuk ditingkatkan. Selisih terbesar terlihat pada indikator Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan di ikuti

oleh persentase rumah tangga tanpa akses air bersih. Rata-rata skor indikator persentase rumah tangga tanpa akses air bersih dan NCPR di kecamatan-kecamatan rentan jauh lebih kecil dibanding kecamatan tahan. Artinya, kecamatan-kecamatan tahan pangan cenderung memiliki akses air bersih dan ketersediaan pangan yang lebih baik dibandingkan kecamatan rentan rawan pangan.

Analisis Kecamatan di Wilayah Kota (Kota Kupang)

Berdasarkan hasil analisis 2023, sebanyak 6 kecamatan di Kota Kupang hanya tersebar di 2 prioritas penanganan, yaitu prioritas 5 sebanyak 1 kecamatan dan prioritas 6 sebanyak 5 kecamatan. Dari seluruh kecamatan di Kota Kupang, tidak ada kecamatan yang dikategorikan rentan rawan pangan. Daftar kecamatan di Kota Kupang berdasarkan prioritas dan urutan ketahanan pangan dapat dilihat pada [Tabel 6.3](#).

Dari 8 indikator ketahanan pangan di wilayah kota, Kecamatan Alak telah memiliki 6 indikator yang telah dikategorikan baik. Namun, kecamatan tersebut masih menghadapi beberapa masalah, yaitu tingginya angka kesakitan, dan akses air bersih.

Tabel 7.4. Daftar kecamatan di Kota Kupang berdasarkan urutan ketahanan pangan

Kecamatan	Urutan	Prioritas Penanganan
Alak	6	5
Kelapa Lima	3	
Maulafa	2	
Oebobo	4	
Kota Lama	5	
Kota Raja	1	
Total	6 Kecamatan	

Sumber: Analisis FSVA NTT 2023

7.2. Perubahan Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan, 2022-2023

Analisis indeks komposit ketahanan pangan pada FSVA NTT 2023 menggunakan metode dan titik potong yang sama dengan FSVA NTT 2022, sehingga perbandingan dapat dilakukan. Secara umum, jumlah kecamatan rentan di Provinsi NTT mengalami penurunan dari 80 kecamatan pada FSVA NTT 2022 menjadi 64 kecamatan pada FSVA NTT 2023. Kecamatan kategori sangat rentan rawan pangan (Prioritas 1) menurun sebanyak 1 kecamatan, sedangkan kecamatan paling tahan pangan (Prioritas 6) mengalami peningkatan sebanyak 43 kecamatan ([Tabel 7.4](#)).

Tabel 7.5. Perbandingan jumlah kecamatan menurut prioritas, FSVA NTT 2022 vs 2023

Prioritas	FSVA NTT 2021		FSVA NTT 2022	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Prioritas 1	5	2%	4	1,27%
Prioritas 2	10	3%	12	3,81%
Prioritas 3	65	21%	48	15,24%
Prioritas 4	114	38%	88	27,94%
Prioritas 5	89	29%	94	29,84%
Prioritas 6	26	8%	69	21,90%
Total	309	100%	309	100%

Sumber: Analisis FSVA NTT 2023

Berdasarkan Tabel 7.6, Seluruh kabupaten memiliki kecamatan yang mengalami penurunan status kecamatan. Sebanyak 78 kecamatan mengalami penurunan status ketahanan pangan yang terbagi menjadi: 19 kecamatan turun 2 tingkat atau lebih dan 59 kecamatan turun 1 tingkat. Sebaliknya, 124 kecamatan mengalami peningkatan status ketahanan pangan dengan pembagian: 81 kecamatan naik 1 tingkat dan 43 kecamatan naik 2 tingkat atau lebih. Selain itu, terdapat 107 kecamatan yang tidak mengalami status ketahanan pangan dibandingkan tahun sebelumnya.

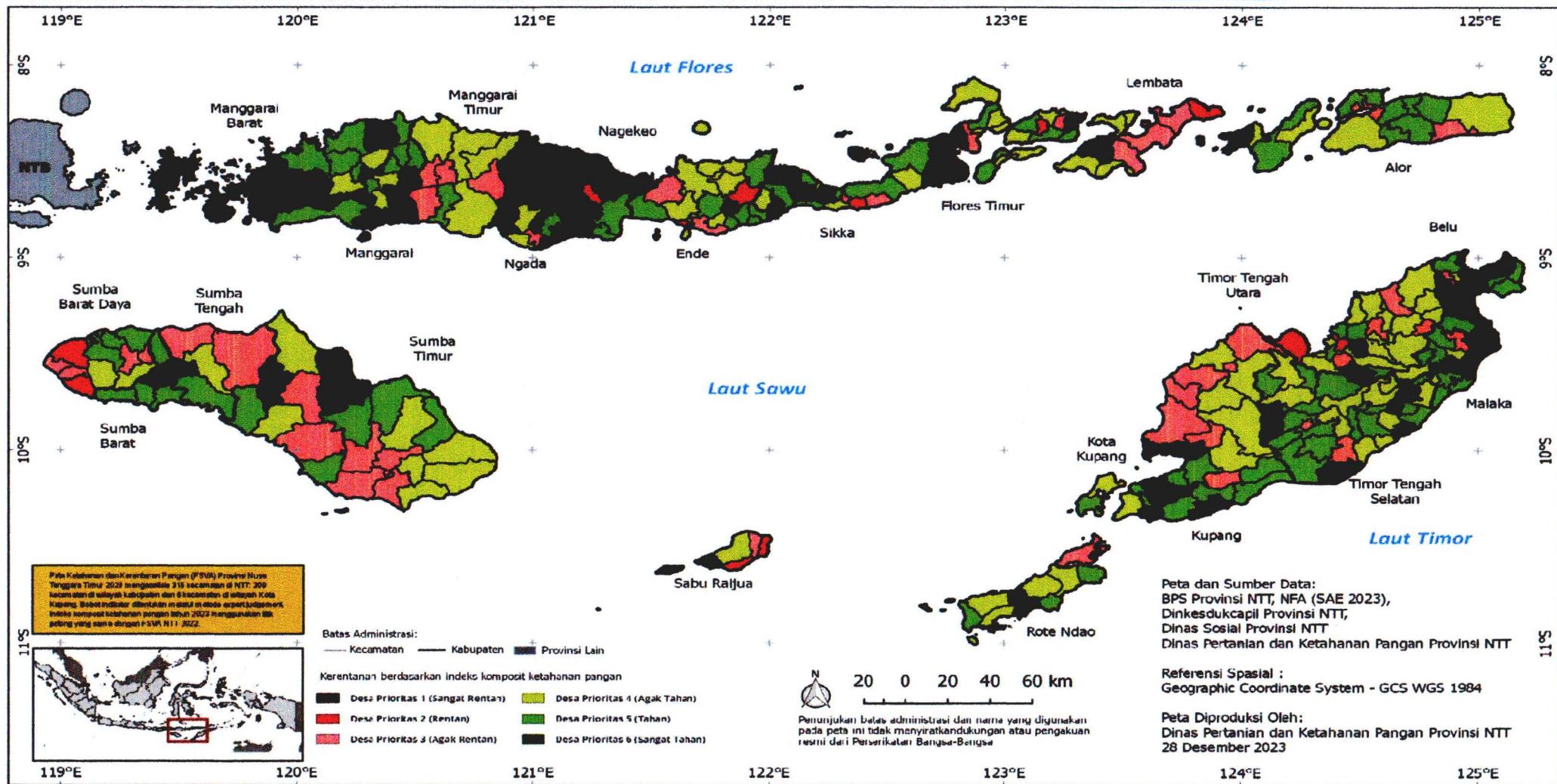
Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah dengan jumlah kecamatan yang mengalami penurunan status ketahanan pangan terbanyak (9 kecamatan), disusul oleh Timor Tengah Selatan (8 kecamatan) Kabupaten Kupang, Alor dan Sumba Barat Daya (7 kecamatan). Sebaliknya, wilayah dengan jumlah kecamatan yang mengalami perbaikan status terbanyak yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Ende (12 kecamatan).

Tabel 7.6. Perubahan tingkat prioritas kabupaten per kecamatan 2022 – 2023

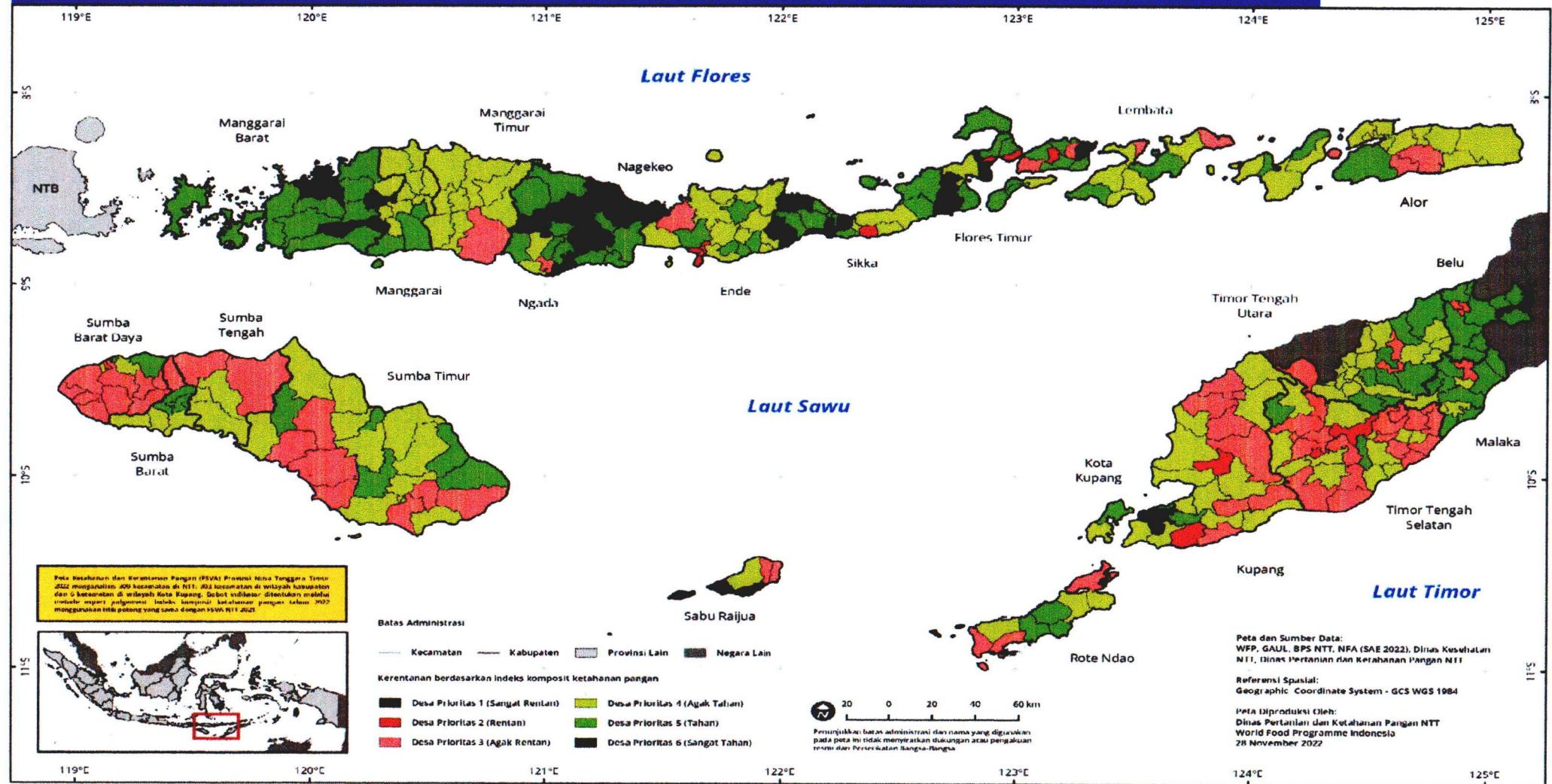
Kabupaten/Kota	-4 Tingkat	-3 Tingkat	-2 Tingkat	-1 Tingkat	Tetap	+1 Tingkat	+2 Tingkat	+3 Tingkat	+4 Tingkat
Sumba Barat	0	0	0	0	0	5	1	0	0
Sumba Timur	0	0	1	3	7	8	3	0	0
Kupang	0	0	0	4	5	10	3	2	0
Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	6	13	10	3	0
Timor Tengah Utara	0	0	3	6	9	6	0	0	0
Belu	0	0	0	1	5	6	0	0	0
Alor	0	0	0	4	5	6	3	0	0
Lembata	0	0	1	4	2	1	1	0	0
Flores Timur	0	1	0	4	10	2	2	0	0
Sikka	0	0	1	7	10	3	0	0	0
Ende	0	0	1	4	7	5	4	0	0
Ngada	0	0	0	0	7	5	0	0	0
Manggarai	0	0	0	0	2	8	2	0	0
Rote Ndao	1	0	0	1	4	3	1	0	1
Manggarai Barat	0	0	0	3	6	3	0	0	0
Sumba Tengah	0	0	0	0	4	1	1	0	0
Sumba Barat Daya	0	0	0	2	5	3	1	0	0
Nagekeo	0	1	0	0	5	1	0	0	0
Manggarai Timur	0	1	0	3	6	2	0	0	0
Sabu Raijua	0	0	0	1	4	1	0	0	0
Malaka	0	0	0	0	8	4	0	0	0
Kota Kupang	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Total	1	3	7	47	117	97	32	5	2
				58	117			136	

Sumber: Analisis FSVA NTT 2023

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022



BAB 8

STRATEGI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

8.1. Strategi Penanganan



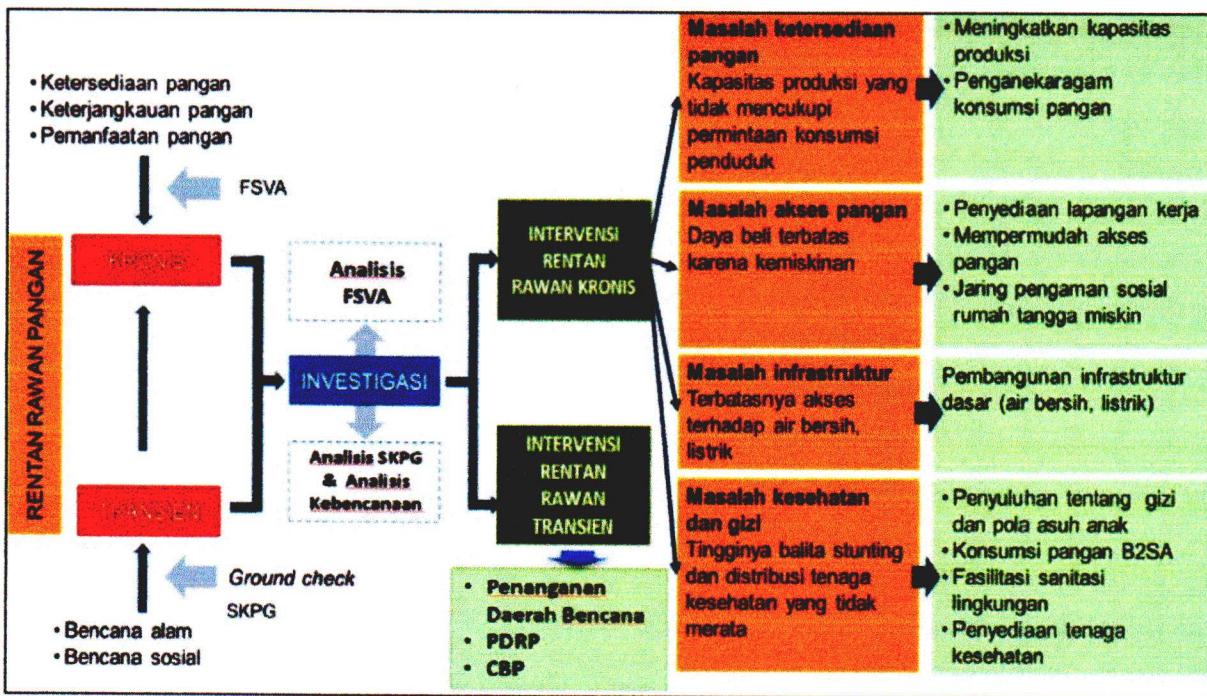
Definisi ketahanan pangan mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2012, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menggantikan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. Menurut UU Pangan yang baru, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas: i) kedaulatan; ii) kemandirian; iii) ketahanan; iv) keamanan; v) manfaat; vi) pemerataan; vii) berkelanjutan; dan viii) keadilan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengurangan kerentanan terhadap kerawanan pangan harus ditekankan pada penyelesaian akar utama penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan dengan mengacu kepada perubahan paradigma ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Fokus lokasi penanganan kerentanan terhadap kerawanan pangan perlu diprioritaskan pada kecamatan-kecamatan yang masih berada pada kategori rentan (prioritas 1-3). Mengacu pada hasil analisis FSVA NTT 2021, terdapat 62 kecamatan rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yang terdiri dari 61 kecamatan di wilayah kabupaten dan 1 kecamatan di wilayah kota. Kecamatan-kecamatan tersebut perlu menjadi sorotan dan menjadi sasaran utama program-program terkait dengan penanganan kerawanan pangan dan gizi.

Strategipenanganan daerah rentan rawan pangan akan berbeda-beda pada setiap kecamatan, sebab karakteristik kerentanan juga berbeda-beda. Sebuah kerangka kerja yang menyeluruh tentang penyebab dan jenis intervensi untuk mengentaskan daerah rentan rawan pangan digambarkan pada Gambar 8.1.

Gambar 8.1. Kerangka kerja pengentasan daerah rentan rawan pangan



Sumber: Badan Ketahanan Pangan.

Strategi peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan jalur ganda (*twin-track approaches*) yaitu:

1. **Pendekatan jangka pendek:** membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
2. **Pendekatan jangka menengah dan panjang:** memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan rawan pangan melalui pendekatan pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Hasil analisis pada FSVA 2023 mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap kerawanan pangan. Oleh karena itu, program pemerintah harus dapat mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah/kabupaten dapat diarahkan pada kegiatan:

- a. Penanganan *stunting* diantaranya melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak.
- b. Peningkatan akses listrik bagi masyarakat, melalui ekspansi jaringan listrik ke wilayah-wilayah yang memiliki persentase rumah tangga tanpa akses listrik yang tinggi.
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- d. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta fasilitas-fasilitas kesehatan masyarakat.
- f. Peningkatan penyediaan pangan di daerah nonsentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- g. Penurunan pangsa pengeluaran pangan melalui sosialisasi pola konsumsi pangan (B2SA) serta peningkatan kesempatan kerja.
- h. Peningkatan peningkatan pendidikan perempuan.

8.2. Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor

Ketahanan pangan merupakan isu multisektoral dan melibatkan banyak aspek pembangunan. Meskipun sektor pertanian merupakan hulu dari sebuah sistem pangan, namun untuk dapat mencapai serta meningkatkan ketahanan diperlukan keterlibatan aspek lainnya, seperti akses fisik untuk distribusi bahan pangan, akses ekonomi dan sosial (kemiskinan dan bantuan sosial) bahkan aspek kesehatan dan nutrisi guna menjamin seluruh rantai pasok pangan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mencapai status kesehatan dan gizi masyarakat yang baik.

Guna menciptakan arah pembangunan ketahanan pangan yang holistik, sebuah pendekatan melalui kerja sama lintas sektor menjadi penting untuk dilakukan. Kerjasama lintas program merupakan keterpaduan beberapa program yang dilakukan pada satu wilayah administrasi (desa). Kerjasama lintas program dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan tenaga kerja serta mempercepat pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kerjasama lintas sektor diartikan sebagai usaha bersama beberapa pihak seperti Kementerian/Dinasbahkan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilandasi oleh pemahaman yang sama bahwa ketahananpangan dan gizi bersifat multidimensi. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, perlu adanya syaratkankerjasama tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor.

8.3. Relevansi dengan RPJMD NTT 2018-2023

Penanganan kerentanan terhadap kerawanan pangan telah menjadi bagian perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT 2018-2023. RPJMD NTT 2018-2023 telah disinkronisasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk untuk Tujuan 2: Tanpa Kelaparan. Menurut dokumen RPJMD, implementasi SDGs Tujuan 2 diselaraskan dengan Misi 1 dari RPJMD, yaitu “Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil”. Beberapa sasaran dan strategi di dalam RPJMD yang diarahkan untuk menangani kerentanan terhadap kerawanan pangan (termasuk kerawanan pangan transien akibat faktor iklim dan lingkungan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Sasaran, strategi dan program terkait ketahanan pangan dan gizi di NTT

Sasaran	Pilar Ketahanan Pangan	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab/Program
Misi 1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN			
Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Ketersediaan dan Pemanfaatan	<p>1. Peningkatan Kapasitas Produksi</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi pertanian melalui: Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), Kelor/Marungga dan Hortikultura. Meningkatkan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. Meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (Ikan Kerapu dan Kakap Putih di Mulut Seribu, Wae Klambu, Hasan Maubesi dan Hada Kewa). Investasi di sektor Produktif dengan sumber pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berorientasi peningkatan PAD yang berbasis masyarakat. Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian. Pengembangan Produk Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial. 	<p>Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Program Penyuluhan pertanian <p>Dinas Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <p>Dinas Kelautan & Perikanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program pengelolaan perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan <p>Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Hutan
Berkurangnya kemiskinan	Akses Pangan	<p>1. Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya). Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan / kelompok disabilitas. Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga. Peningkatan pendapatan pekerja bebas pada sektor Pertanian dan non Pertanian (perkotaan). 	<p>Dinas Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana <p>Dinas PMD</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Akses Pangan	<p>2. Perbaikan Indeks Kedalaman dan Keparahan kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan skema Perlindungan sosial yang meliputi penyediaan data, bantuan sosial maupun jaminan sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah, sanitasi, air bersih listrik, dan akses terhadap pangan bergizi). Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu berbasis Desa (<i>One stop Service</i>). Memastikan tersedianya layanan dasar data kependudukan dan catatan sipil bagi penduduk miskin. Peningkatan Pendapatan kelompok penduduk miskin lapis bawah. <p>3. Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, APB Des dan sumber-sumber pembiayaan lain. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyediaan skim program dan pembiayaan bagi pekerja non upahan (pekerja keluarga), pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) serta kelompok penduduk miskin lapis bawah. 	<p>Dinas Sosial :</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial <p>Dinas PUPR</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman <p>Dinas Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Akses Pangan	<p>Peningkatan akses RT terhadap Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin. Pemantapan stok pangan pada saat krisis 	<p>Dinas Pertanian & Ketahanan pangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Pengawasan keamanan pangan

Sasaran	Pilar Ketahanan Pangan	Strategi	Perangkat Derah Penanggung Jawab/Program
Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pemanfaatan Pangan	<p>Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar. • Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dengan anak Baduta). 	Dinas Pertanian & Ketahanan pangan : Penanganan kerawanan pangan
Tersedianya Infrastruktur Pengairan yang mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Pemanfaatan Pangan	<p>1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternal (Pinjaman Daerah) secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pengairan. • Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan. <p>2. Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air. • Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras provinsi dan kabupaten. • Dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan. • Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin terselenggaranya tatakelola air yang baik. 	Dinas PUPR <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi Layak	Pemanfaatan Pangan	<p>1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan permukiman melalui Peningkatan jumlah Rumah Layak Huni. • Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan/atau yang membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya. • Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di perkotaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan peningkatan pelayanan. • Penyelenggaraan sinergi Air Minum dan Sanitasi di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Masyarakat. • Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur Air Minum dan Sanitasi. • Meningkatkan penyediaan dan pelayanan kualitas infrastruktur strategi. • Pengembangan Sistem Perumahan Publik di perkotaan termasuk Kawasan Industri. <p>2. Mengembangkan strategi pembiayaan alternatif dan skema lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi di Bidang Pembiayaan dengan Optimalisasi Pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPER). • Optimalisasi Partisipasi Swasta dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. • Pendataan Pengembang dan Asosiasi Pengembangan Perumahan melalui Sistem Informasi Registrasi Perumahan (SIREG). • Reformasi subsidi perumahan yang efisien dan berkelanjutan melalui skema subsidi yang progresif termasuk 'passing outskema' subsidi yang tidak tepat sasaran dan membebani keuangan negara dalam jangka panjang. • Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi. 	Dinas PUPR : <ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengembangan Permukiman • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Tersedianya Sumberdaya Kelistrikan yang Memadai dan Murah untuk Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi.	Akses Pangan	<p>1. Peningkatan Pasokan Sumberdaya Kelistrikan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Memenuhi Kebutuhan RT dan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya kelistrikan berbasis EBT. • Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelistrikan berbasis EBT pada tingkat komunitas. <p>1. Peningkatan Akses RT terhadap Sumberdaya Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan subsidi bagi RT untuk mengakses listrik PLN. • Pemanfaatan sumberdaya kelistrikan 	Dinas ESDM: Program Pengelolaan Energi Terbarukan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Sasaran	Pilar Ketahanan Pangan	Strategi	Perangkat Derah Penanggung Jawab/Program
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Faktor Iklim dan Lingkungan	<p>berbasis EBT skala mikro untuk pemenuhan kebutuhan RT daerah terpencil.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penanganan Sampah, Limbah dan Sungai melalui penyediaan tempat pembuangan sampah terpadu. Mendorong terbentuknya tempat pembuangan sampah (TPA) di setiap Kabupaten. Peningkatan fasilitasi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi. Peningkatan pembangunan Instalasi Air Limbah Domestik di semua Kabupaten. Peningkatan pengelolaan Sampah berbasis komunitas dan pengelolaan limbah berbasis komunitas. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pembangunan infrastruktur dengan peningkatan manajemen tata kelola pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Program Perencanaan lingkungan hidup Program Pengelolaan persampahan Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Faktor Iklim dan Lingkungan	<p>1. Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyebarluasan gerakan hemat energi, pengendalian penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah organik dan non organik. Perluasan Ruang Terbuka Hijau. Penanaman Pohon pada pekarangan pribadi maupun ruang publik. Peningkatan penggunaan EBT. 	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan : Program Pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber daya Alam hayati dan ekosistemnya
Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah	Faktor Iklim dan Lingkungan	<p>1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur. Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan. Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal. Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat. Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyebarluasan pesan kepada masyarakat. <p>2. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana. Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital. Penetapan jumlah Desa Tangguh Bencana. 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Program Penanggulangan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Mewujudkan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	Pemanfaatan Pangan	<p>. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari. Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah. <p>2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu</p> <p>Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan Beasiswa.</p>	Dinas Pendidikan & Kebudayaan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NTT	Pemanfaatan Pangan dan Peningkatan Gizi Masyarakat	<p>1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Laboratorium Biomolekuler, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional). Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan 	Dinas Kesehatan: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Sasaran	Pilar Ketahanan Pangan	Strategi	Perangkat Derah Penanggung Jawab/Program
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat NTT	Peningkatan Gizi Masyarakat	<p>kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan.</p> <p>2. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan). • Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal Health Care 100%). • Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan melalui Fasilitasi Layanan Rujukan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) sampai ke Rumah Sakit rujukan Provinsi. • Perbaikan sistem dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan. • Memastikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk. • Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total. <p>3. Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p> <p>4. Pencegahan stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan. • Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil. • Penyediaan subsidi untuk peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin. • Perbaikan perilaku hidup sehat. • Pemanfaatan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu. 	<p>Dinas Kesehatan:</p> <p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan</p>

Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

Lampiran 1. Data Indikator Individu dan Prioritas Ketahanan Pangan Komposit

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
Sumba Barat											
1	Lamboya	0,70	17,32	35,90	14,64	48,34	7,43	2,24	5,18	35,51	5
2	Wanokaka	0,44	7,40	45,03	9,88	49,17	17,13	1,61	6,88	22,01	5
3	Laboya Barat	0,50	16,31	36,60	29,73	56,00	6,21	4,48	7,13	25,15	5
4	Loli	0,62	8,86	22,55	8,83	45,35	8,26	1,81	7,79	23,61	6
5	Kota Waikabubak	0,81	12,96	27,26	5,88	24,95	8,33	0,71	8,71	16,83	6
6	Tana Righu	1,41	10,15	42,31	7,28	25,80	8,37	1,31	6,07	17,84	5
7	Lewa	0,16	14,36	25,76	5,65	38,70	22,11	4,69	7,78	13,60	6
Sumba Timur											
8	NggahaOriangu	0,29	28,14	49,81	6,28	93,64	36,36	4,55	7,10	15,12	3
9	Lewa Tidahu	0,13	28,90	25,98	7,71	24,55	11,75	7,16	7,33	31,22	5
10	Katala Hamu Lingu	0,20	41,01	31,00	8,96	16,74	8,27	16,18	6,61	13,51	4
11	Tabundung	0,31	42,90	32,36	5,45	85,69	13,40	7,56	6,95	24,59	3
12	Pinupahar	0,47	11,15	33,28	8,55	100,00	3,12	5,73	6,43	8,32	5
13	Paberiwai	0,38	43,74	31,60	5,88	68,69	19,83	4,16	7,76	37,17	3
14	Karera	0,27	37,54	27,25	7,85	100,00	10,54	7,12	8,23	28,36	3
15	Matawai La Pawu	0,17	51,44	58,76	6,69	81,41	19,64	9,43	7,41	21,11	3
16	Kahaungu Eti	0,32	26,80	17,80	7,45	76,56	15,96	12,84	7,45	33,06	4
17	Mahu	0,28	55,06	53,61	6,09	59,28	6,82	6,78	6,80	23,29	4
18	Ngadu Ngala	0,37	51,35	66,85	5,91	100,00	18,99	4,62	6,85	13,26	3
19	Pahunga Lodu	0,28	39,34	34,81	10,61	55,69	16,44	5,73	7,00	18,30	4
20	WulaWaijelu	0,47	27,75	27,15	7,00	100,00	7,84	3,82	9,06	13,28	4
21	Rindi	0,24	33,51	29,45	5,59	40,19	4,54	7,64	7,32	12,62	4
22	Umalulu	0,37	32,48	37,71	6,70	10,82	14,19	3,90	7,55	7,56	5
23	Pandawai	0,42	25,16	25,50	11,43	35,14	5,59	5,98	7,64	9,21	5
24	KambataMapambuhang	0,29	63,26	39,33	5,69	29,88	4,42	6,55	6,71	6,56	5
25	Kota Waingapu	0,63	9,84	18,71	3,73	6,18	5,71	0,78	9,89	3,77	6

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
26	Kambera	0,46	16,72	15,71	3,33	19,17	8,64	0,80	9,18	3,17	6
27	Haharu	0,41	28,97	65,62	6,19	50,12	12,17	9,25	5,96	31,90	4
28	Kanatang	0,55	17,74	24,36	4,40	19,78	17,86	4,05	8,14	9,19	6
Kabupaten Kupang											
29	Semau	1,02	20,62	36,69	4,14	49,59	26,04	5,31	8,19	20,85	4
30	Semau Selatan	0,64	21,02	19,39	4,45	0,00	80,55	5,28	8,68	35,96	5
31	Kupang Barat	1,09	11,36	19,59	3,18	71,72	34,52	1,37	9,28	17,09	4
32	Nekameise	1,33	6,22	43,33	3,61	0,00	16,39	1,69	8,53	33,85	6
33	Kupang Tengah	1,82	11,11	2,64	2,75	36,97	17,71	0,73	9,45	10,79	5
34	Taebenu	1,48	8,76	9,38	4,54	23,11	6,22	1,35	9,49	13,63	6
35	Amarasi	1,44	8,04	33,01	3,27	37,31	12,48	2,98	7,94	20,67	5
36	Amarasi Barat	1,90	10,12	31,80	4,89	26,96	18,63	4,65	6,88	34,13	5
37	Amarasi Selatan	0,92	5,53	5,34	2,57	17,90	22,73	3,32	6,84	18,87	6
38	Amarasi Timur	1,07	12,78	66,94	5,48	31,46	9,29	4,29	7,22	30,80	5
39	Kupang Timur	0,37	4,50	22,33	4,27	79,87	33,47	5,29	7,98	9,71	5
40	AmabiOefeto Timur	1,75	22,07	43,48	5,09	10,16	9,80	4,30	7,39	11,68	5
41	AmabiOefeto	0,65	27,57	16,43	5,10	91,99	25,07	2,75	8,41	32,55	3
42	Sulamu	0,39	4,84	14,53	4,12	57,52	19,48	2,48	7,71	12,77	6
43	Fatuleu	2,41	11,47	22,44	7,14	38,37	9,80	3,86	6,23	25,47	4
44	Fatuleu Tengah	1,09	16,09	21,54	7,55	100,00	29,53	3,27	6,78	22,68	3
45	Fatuleu Barat	0,36	33,81	30,13	24,03	69,89	18,50	17,12	6,84	23,16	3
46	Takari	1,31	15,08	44,66	11,11	51,23	28,70	5,08	7,75	12,01	4
47	Amfoang Selatan	1,24	15,49	23,66	4,34	100,00	5,75	11,73	6,69	32,98	4
48	Amfoang Barat Daya	2,60	34,37	27,82	5,40	14,95	18,30	5,78	8,18	29,17	3
49	Amfoang Tengah	0,50	12,89	28,33	9,25	100,00	33,37	5,81	6,25	25,17	4
50	Amfoang Utara	1,59	37,15	21,40	6,60	23,13	12,34	9,28	7,72	13,96	4
51	Amfoang Barat Laut	1,56	48,30	39,73	10,31	17,26	31,64	11,91	6,48	28,48	3
52	Amfoang Timur	0,38	41,10	48,64	8,11	34,97	28,28	3,81	6,08	10,95	3

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
Timor Tengah Selatan											
53	Mollo Utara	0,76	18,88	32,22	8,50	37,09	40,06	2,17	6,49	35,97	4
54	Fatumnasi	0,85	6,09	38,57	8,73	49,86	38,14	6,62	5,40	12,09	4
55	Tobu	0,58	0,28	46,28	6,64	73,30	11,87	2,06	6,47	31,54	5
56	Nunbena	0,15	16,99	37,70	6,06	31,93	38,93	5,17	6,96	28,49	5
57	Mollo Selatan	1,31	4,76	6,50	6,73	10,47	21,47	3,42	8,71	46,44	5
58	Polen	0,72	16,20	5,30	8,36	33,02	23,87	3,53	6,71	28,14	5
59	Mollo Barat	0,34	8,93	7,94	12,87	21,42	9,05	5,90	6,93	45,88	6
60	Mollo Tengah	0,66	10,82	38,98	8,24	25,83	22,78	1,44	6,58	44,59	5
61	Kota Soe	5,00	4,19	61,32	3,51	14,99	7,16	0,59	10,08	10,09	3
62	Amanuban Barat	1,02	7,29	51,39	5,69	45,13	11,90	1,97	8,47	37,82	5
63	Batu Putih	0,49	17,41	23,68	8,30	31,11	43,87	2,05	6,49	14,33	5
64	Kuatnana	0,68	17,56	12,95	12,33	76,21	10,22	2,62	6,37	39,27	4
65	Amanuban Selatan	0,49	7,19	22,89	11,86	15,82	37,95	3,88	6,70	42,92	5
66	Noebeba	1,01	3,57	49,26	13,08	25,06	29,04	4,23	7,03	9,84	5
67	Kuan Fatu	1,11	19,96	56,88	11,99	33,18	34,73	2,68	6,87	34,45	3
68	Kualin	0,58	15,42	9,05	12,40	5,57	13,80	4,55	7,59	37,88	6
69	Amanuban Tengah	0,89	6,95	8,44	7,30	29,49	38,35	1,31	7,61	44,11	5
70	Kolbano	1,20	14,90	27,75	7,09	34,38	34,01	1,24	6,55	36,50	4
71	Oenino	0,63	20,82	11,03	10,66	89,26	13,82	3,69	6,18	37,25	4
72	Amanuban Timur	0,50	6,13	34,58	10,72	87,80	18,93	2,87	6,17	27,86	4
73	Fautmolo	0,71	9,04	21,49	10,16	89,91	16,23	1,13	6,47	15,52	5
74	Fatukopa	0,40	7,27	73,29	8,92	100,00	27,21	1,82	5,70	12,59	4
75	Kie	0,68	5,74	59,57	9,85	38,70	22,09	2,76	5,99	10,33	5
76	Kot'olin	0,82	18,69	29,76	10,37	72,41	8,51	1,51	6,75	24,75	4
77	Amanatun Selatan	1,24	9,59	46,12	11,48	50,96	24,54	0,98	5,82	11,94	4
78	Boking	1,44	1,48	51,00	14,55	44,34	18,15	1,93	7,26	10,23	5
79	Nunkolo	0,75	13,28	74,41	12,31	0,00	5,13	1,54	6,47	31,35	6

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
80	Noebana	0,38	5,78	64,10	10,27	10,59	21,04	1,99	6,63	24,63	6
81	Santian	0,21	0,00	63,99	24,63	32,21	62,88	1,05	6,24	27,27	5
82	Amanatun Utara	0,69	6,21	38,14	13,24	7,26	16,74	1,79	6,78	16,92	6
83	Toianas	0,76	24,52	61,12	18,63	75,62	6,50	2,42	5,74	11,49	4
84	Kokbaun	0,49	24,27	51,76	6,77	44,53	14,35	1,32	8,04	11,63	5
Timor Tengah Utara											
85	Miomaffo Barat	0,38	21,43	56,24	3,18	45,94	35,23	3,22	7,09	33,10	4
86	Miomaffo Tengah	0,97	33,86	67,53	4,21	41,23	51,35	1,74	7,32	23,60	3
87	Musi	0,31	22,49	46,46	2,64	15,53	17,57	1,42	7,33	34,00	5
88	Mutis	0,47	38,43	64,32	4,52	79,63	73,54	2,21	7,26	42,40	2
89	Miomaffo Timur	0,72	21,05	42,07	4,18	11,74	21,59	2,07	8,98	30,40	5
90	Noemuti	0,43	14,07	46,37	2,86	5,57	6,94	1,41	6,40	30,60	6
91	Bikomi Selatan	0,48	31,72	57,84	4,48	27,78	11,36	0,75	6,56	23,50	4
92	Bikomi Tengah	0,41	35,50	76,94	4,94	71,64	36,35	1,10	6,95	40,10	2
93	BikomiNilulat	0,34	28,04	53,79	3,48	51,00	20,32	1,82	6,19	25,50	4
94	Bikomi Utara	0,56	27,72	58,77	4,70	19,60	15,59	1,22	8,59	26,00	5
95	Naibenu	0,37	33,21	55,86	4,42	7,89	21,48	1,96	7,40	20,80	4
96	Noemuti Timur	0,17	29,16	68,87	4,58	0,00	8,88	1,19	8,65	20,10	5
97	Kota Kefamenanu	0,97	8,21	16,23	2,08	27,97	21,11	0,90	10,50	11,30	6
98	Insana	0,38	34,97	40,10	2,75	20,80	13,14	3,92	8,19	20,10	4
99	Insana Utara	0,47	30,06	69,82	4,36	7,72	21,94	0,83	8,35	31,00	4
100	Insana Barat	0,34	35,69	52,15	3,19	0,00	21,14	1,44	6,54	31,50	4
101	Insana Tengah	0,26	36,24	32,94	5,28	28,21	10,10	1,77	7,83	25,60	4
102	Insana Fafinesu	0,41	32,03	68,62	4,48	50,08	18,05	0,83	7,53	34,80	3
103	Biboki Selatan	0,64	33,15	73,89	5,33	23,91	7,26	3,16	8,58	26,90	4
104	Biboki Tanpah	0,19	37,87	56,01	4,29	52,02	37,15	2,16	6,60	25,70	3
105	BibokiMoenleu	0,25	35,68	56,42	3,48	77,27	18,81	1,45	7,51	22,20	3
106	Biboki Utara	0,25	38,73	51,97	3,41	23,85	21,11	2,10	6,88	12,30	4

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
107	Biboki Anleu	0,31	46,41	57,70	6,97	19,48	13,44	2,61	8,10	28,90	4
108	BibokiFeotleu	0,24	43,03	51,46	5,22	43,46	18,94	2,54	8,02	20,10	4
Belu											
109	Rai Manuk	0,39	21,24	33,12	7,80	21,13	16,98	3,59	6,57	17,50	5
110	Tasifeto Barat	0,46	11,25	35,89	5,57	53,36	9,69	4,67	7,66	4,10	6
111	KakulukMesak	1,21	10,44	45,98	3,82	23,04	12,06	2,64	7,96	19,00	5
112	NanaetDuabesi	0,23	17,96	41,20	6,15	9,62	9,28	1,34	6,33	21,50	6
113	Atambua	3,94	8,78	6,45	2,80	57,90	7,09	0,48	9,21	8,30	4
114	Atambua Barat	5,00	3,87	5,28	1,88	28,75	31,85	0,26	10,01	9,70	3
115	Atambua Selatan	5,00	11,05	7,98	2,17	42,40	21,60	0,22	9,48	10,30	3
116	Tasifeto Timur	0,39	9,35	39,96	4,92	36,45	12,81	2,35	7,43	12,90	6
117	Raihat	0,31	14,46	54,88	5,13	31,18	3,81	1,98	6,29	8,80	6
118	Lasiolat	0,32	5,71	42,47	3,32	24,38	10,67	1,79	9,13	25,90	6
119	Lamaknen	0,34	21,58	28,26	5,40	35,13	7,43	2,65	7,75	25,00	5
120	Lamaknen Selatan	0,27	29,30	22,19	5,62	0,00	8,31	3,50	7,01	25,10	5
Alor											
121	Pantar	0,57	14,56	45,81	1,90	50,89	30,02	2,00	8,36	5,20	5
122	Pantar Barat	0,86	19,95	54,59	2,73	96,38	9,94	1,07	6,97	15,60	4
123	Pantar Timur	1,10	14,66	53,97	1,90	53,23	18,94	1,72	8,10	18,80	4
124	Pantar Barat Laut	0,86	11,98	34,84	7,89	10,49	10,60	4,17	7,68	11,50	6
125	Pantar Tengah	0,49	8,30	56,91	3,42	68,83	14,65	3,78	7,33	14,40	5
126	Alor Barat Daya	1,83	19,61	48,67	6,43	45,16	7,49	2,01	7,30	19,00	4
127	Mataru	0,85	11,92	32,70	12,97	75,02	19,81	1,61	8,11	18,40	5
128	ABAD SELATAN	1,06	38,54	66,50	2,08	20,83	15,00	4,05	7,47	15,40	4
129	Alor Selatan	0,60	14,03	60,49	9,23	53,92	7,18	2,57	7,44	19,40	5
130	Alor Timur	0,55	12,54	64,11	3,68	65,84	24,95	6,40	6,70	6,30	4
131	Alor Timur Laut	0,57	17,40	72,98	4,35	38,29	17,08	2,94	7,18	20,90	5
132	Pureman	0,18	28,20	67,27	1,68	100,00	14,02	3,52	7,02	11,50	3

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
133	Teluk Mutiara	5,00	6,86	24,22	0,99	60,11	12,84	0,56	9,68	6,00	3
134	Kabola	0,82	9,53	56,18	1,28	67,06	5,22	0,42	8,66	10,50	5
135	Alor Barat Laut	0,86	6,99	57,04	1,79	44,37	11,49	0,58	7,29	9,70	5
136	Alor Tengah Utara	0,66	9,21	46,68	2,34	55,83	17,63	0,91	7,36	4,60	5
137	Pulau Pura	2,16	3,82	68,20	1,70	16,87	22,37	1,94	6,80	8,00	4
138	Lembur	0,34	14,67	58,99	0,98	87,53	9,73	0,54	8,02	16,20	5
Lembata											
139	Nagawutung	0,38	36,83	24,98	1,80	32,79	27,36	2,73	7,66	10,70	4
140	Wulandoni	0,56	44,00	43,06	1,81	14,86	52,51	1,90	7,35	20,58	4
141	Atadei	0,20	39,01	49,50	2,28	82,78	36,40	2,64	7,06	14,25	3
142	Ile Ape	0,89	28,76	14,22	2,80	40,21	20,72	1,11	8,10	8,91	4
143	Ile Ape Timur	1,27	42,64	8,14	1,52	32,78	15,28	0,75	8,16	7,76	4
144	Lebatukan	1,11	36,91	25,99	1,62	65,31	35,32	3,97	7,45	14,91	3
145	Nubatukan	1,41	10,93	13,99	1,36	7,16	19,48	1,04	8,54	15,24	6
146	Omesuri	2,08	53,08	34,99	2,91	57,29	6,57	1,33	7,07	27,10	3
147	Buyasari	2,40	59,52	27,97	4,28	82,05	10,71	1,26	6,33	14,07	2
Flores Timur											
148	Wulanggitang	0,47	10,81	47,87	2,27	23,96	19,57	2,82	8,64	20,44	6
149	Titehena	0,56	10,97	19,99	1,54	50,87	9,91	1,37	8,80	21,57	6
150	Ileburu	0,62	12,00	73,81	1,20	0,00	5,35	1,62	8,38	21,97	6
151	Tanjung Bunga	1,17	24,17	26,17	5,66	82,44	7,28	2,53	8,03	19,48	4
152	Lewo Lema	1,10	15,47	29,74	1,92	56,88	11,11	1,24	8,36	13,61	5
153	Larantuka	5,00	12,73	18,43	0,82	0,00	10,46	0,37	9,36	14,00	4
154	Ile Mandiri	2,58	7,54	51,18	2,37	53,72	16,42	1,00	8,46	13,78	4
155	Demon Pagong	5,00	9,15	48,57	1,63	0,00	20,65	1,47	8,32	17,69	3
156	Solor Barat	0,83	19,64	41,84	1,91	17,90	5,17	2,10	8,02	18,56	5
157	Solor Selatan	1,94	17,96	47,99	1,69	34,06	22,90	0,73	5,40	18,09	4
158	Solor Timur	2,22	15,33	30,54	1,95	29,40	15,43	0,77	7,43	26,61	4

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
159	Adonara Barat	1,87	10,27	34,38	1,29	0,00	29,60	0,82	7,27	22,98	5
160	Wotan Ulu Mado	1,94	20,60	26,77	1,44	36,80	26,35	1,27	8,15	20,20	4
161	Adonara Tengah	4,80	6,55	59,96	2,46	27,45	27,79	0,49	6,47	26,11	2
162	Adonara Timur	2,86	14,33	32,40	1,90	8,91	7,61	0,64	6,90	14,67	5
163	Ile Boleng	1,47	7,76	25,42	1,52	85,26	5,30	0,44	6,66	18,20	5
164	Witihama	0,74	9,68	31,97	1,69	16,47	16,40	0,99	7,30	18,65	6
165	Kelubagolit	5,00	5,30	22,81	1,04	17,68	13,17	0,41	7,69	19,04	3
166	Adonara	3,64	10,61	44,15	1,70	19,33	11,11	0,59	7,74	22,98	4
Sikka											
167	Paga	0,45	12,24	27,76	6,00	11,84	1,55	1,17	6,71	7,98	6
168	Mego	0,71	22,09	45,98	6,59	30,29	0,74	1,12	7,25	11,91	5
169	Tana Wawo	0,86	33,49	35,82	7,68	43,93	0,04	1,56	5,96	26,91	4
170	Lela	1,25	18,65	21,31	4,34	46,02	7,23	0,42	6,61	6,01	5
171	Bola	0,42	27,19	68,02	5,35	51,29	4,78	1,11	6,36	17,21	4
172	Doreng	5,00	34,44	14,18	11,22	9,94	2,50	0,52	6,76	17,61	2
173	Mapitara	0,99	40,37	47,33	12,63	61,71	0,42	2,08	7,10	13,82	3
174	Talibura	0,80	28,11	46,63	5,92	19,33	8,80	1,90	7,66	17,64	5
175	Waigete	1,35	18,10	44,80	7,74	18,62	0,70	2,11	6,95	8,34	5
176	Waiblama	0,63	35,48	33,06	10,55	42,70	2,96	2,53	6,16	33,47	4
177	Kewapante	1,35	14,15	26,24	3,81	45,37	11,04	0,32	8,87	9,08	5
178	Hewokloang	1,74	33,23	29,62	9,42	87,09	3,33	0,30	6,87	9,05	3
179	Kangae	0,40	16,30	9,83	3,14	28,37	5,36	0,40	8,30	20,10	6
180	Palue	1,50	11,40	62,18	11,31	100,00	1,01	0,62	5,74	10,82	4
181	Koting	0,72	5,63	26,61	4,11	0,00	2,68	0,51	7,80	1,22	6
182	Nelle	0,49	7,78	13,78	2,49	29,45	0,04	0,26	6,50	0,24	6
183	Nita	1,76	16,17	25,42	5,09	0,00	4,23	1,37	7,73	13,71	6
184	Magepanda	0,40	12,78	13,24	4,05	0,00	2,04	3,26	7,95	24,20	6
185	Alok	5,00	4,61	14,37	3,00	0,00	11,57	0,22	8,45	16,84	4

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
186	Alok Barat	3,61	8,20	11,06	6,54	0,00	2,64	1,12	9,58	9,74	5
187	Alok Timur	1,67	6,08	13,41	3,05	12,80	11,48	1,59	8,94	9,85	6
Ende											
188	Nangapanda	1,12	20,34	32,06	0,40	44,40	9,50	1,45	7,69	7,97	5
189	Pulau Ende	0,14	14,18	84,13	0,26	12,55	5,38	0,19	6,68	9,22	6
190	Maukaro	0,51	28,91	49,71	0,46	89,73	21,76	2,93	7,26	20,55	3
191	Ende	1,31	24,80	32,64	4,25	63,73	6,62	1,03	8,23	10,64	4
192	Ende Selatan	5,00	13,11	10,04	0,25	5,42	2,30	0,26	8,66	3,86	4
193	Ende Timur	5,00	12,52	20,92	0,29	0,00	24,14	0,34	10,85	2,80	4
194	Ende Tengah	5,00	4,06	17,99	0,28	0,00	30,02	0,04	10,93	8,24	3
195	Ende Utara	5,00	17,64	15,03	0,30	28,50	25,61	0,20	8,77	4,25	2
196	Nدونa	3,25	18,39	47,36	0,32	0,00	38,21	1,44	5,92	7,89	3
197	Nدونa Timur	0,90	40,43	70,82	0,31	0,00	21,48	1,29	7,91	14,40	4
198	Wolowaru	1,50	25,49	51,14	0,58	0,00	2,55	0,83	7,83	5,48	5
199	Wolojita	1,13	17,44	32,19	0,26	0,00	33,07	0,74	8,17	22,80	5
200	Lio Timur	0,93	29,58	26,99	0,26	14,55	11,93	0,96	8,70	18,32	5
201	Kelimutu	0,65	20,04	18,44	0,26	0,00	5,19	1,04	6,10	7,05	6
202	Ndori	1,33	30,61	22,56	0,25	13,04	1,30	0,67	5,26	15,31	5
203	Maurole	0,57	26,40	42,97	5,16	24,90	26,50	2,67	8,04	9,18	4
204	Kotabaru	0,72	37,06	36,27	0,46	14,05	10,55	2,15	8,62	8,93	5
205	Detukeli	1,07	37,70	23,49	6,42	30,34	18,24	1,90	8,38	6,68	4
206	LepembusuKelisoke	0,68	46,00	69,74	0,38	72,66	35,32	3,35	7,59	16,02	2
207	Detusoko	0,84	21,77	29,85	0,28	23,18	25,24	1,20	7,96	13,52	5
208	Wewaria	0,33	31,00	59,75	5,23	42,96	21,36	2,32	7,34	5,77	4
Ngada											
209	Aimere	2,01	12,79	11,85	4,20	16,53	3,29	1,27	8,71	8,79	6
210	Jerebuu	3,76	18,61	25,73	6,89	72,46	2,08	0,73	7,87	11,29	3
211	Inerie	2,89	14,55	12,97	3,73	55,73	3,31	1,55	6,35	5,01	4

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
212	Bajawa	4,28	5,65	16,69	3,22	14,77	0,99	0,68	9,54	10,82	4
213	Golewa	1,16	17,72	25,43	4,58	17,94	66,69	0,64	9,50	7,28	5
214	Golewa Selatan	0,61	10,94	8,62	6,22	0,00	2,61	1,08	7,95	7,59	6
215	Golewa Barat	0,66	11,33	23,77	2,63	47,22	2,05	1,15	8,36	10,44	6
216	Bajawa Utara	0,25	18,45	27,28	5,57	10,56	0,22	5,07	8,14	7,56	6
217	Soa	0,15	15,72	49,84	3,48	10,53	5,20	1,34	7,63	11,20	6
218	Riung	0,25	11,79	58,49	4,04	10,22	0,11	1,96	7,51	5,27	6
219	Riung Barat	0,17	20,40	19,06	7,22	44,71	0,04	3,16	8,07	11,80	6
220	Wolomeze	0,21	21,81	35,73	5,09	7,27	0,00	2,52	9,93	15,69	6
Manggarai											
221	Satar Mese	0,35	15,25	25,04	5,07	5,66	20,00	0,79	7,67	15,35	6
222	Satar Mese Barat	0,32	13,33	52,05	6,18	16,93	20,91	0,78	7,91	13,23	6
223	Satar Mese Utara	2,70	13,91	41,73	5,24	40,88	8,40	0,71	7,43	12,48	4
224	Langke Rempong	1,96	6,76	18,94	2,21	0,00	19,88	0,13	9,69	4,72	6
225	Ruteng	0,66	14,25	57,79	3,68	34,12	36,96	0,33	7,33	28,91	4
226	WaeRii	0,60	9,95	41,58	3,64	0,00	13,55	0,30	7,49	22,28	6
227	Lelak	0,47	18,22	48,51	6,30	13,19	20,79	0,44	7,67	22,98	5
228	Rahong Utara	0,65	22,36	45,98	5,12	11,13	12,61	0,55	6,25	9,48	5
229	Cibal	0,52	16,21	43,96	6,01	28,72	16,99	0,51	7,01	19,80	5
230	Cibal Barat	0,64	12,46	24,78	8,00	41,01	21,47	0,78	6,96	23,30	5
231	Reok	0,86	13,45	22,25	7,22	17,84	30,21	1,03	8,91	8,04	5
232	Reok Barat	0,35	10,78	57,23	11,68	0,00	15,61	1,91	6,21	19,58	6
Rote Ndao											
233	Rote Barat Daya	0,86	62,19	11,97	8,41	32,60	7,78	1,22	8,13	23,08	4
234	Rote Barat Laut	0,52	51,75	31,56	1,43	57,74	8,66	1,35	7,84	22,06	4
235	Loaholu	4,50	61,87	19,66	1,82	47,46	19,61	0,95	6,54	30,85	1
236	Lobalain	0,91	16,14	19,63	2,56	26,07	13,55	1,52	9,30	20,48	6
237	Rote Tengah	0,45	40,30	28,99	1,07	23,75	17,02	2,36	8,18	13,05	4

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
238	Rote Selatan	0,82	32,89	8,86	1,18	0,00	11,98	1,79	6,93	21,27	5
239	Pantai Baru	0,61	43,59	27,81	3,26	48,43	6,18	3,04	7,82	16,31	4
240	Rote Timur	0,67	34,46	33,59	3,28	18,81	4,15	1,76	8,73	21,00	5
241	Landu Leko	0,83	45,68	49,67	1,02	71,94	5,23	4,85	7,25	14,29	3
242	Rote Barat	0,37	21,01	55,64	0,84	19,08	8,49	1,62	7,86	26,19	5
243	Ndao Nuse	0,51	33,56	51,02	2,26	53,12	16,55	0,46	8,50	12,25	4
Manggarai Barat											
244	Komodo	0,64	1,83	12,30	4,46	10,99	19,62	2,87	9,52	10,88	6
245	Boleng	0,17	17,28	41,63	7,66	76,42	20,86	4,31	8,77	19,29	5
246	Sano Nggoang	0,25	13,01	29,95	4,39	49,31	7,33	5,81	7,42	29,33	6
247	Mbeliling	0,20	6,09	23,23	3,54	37,07	15,98	2,29	8,11	10,63	6
248	Lembor	0,26	9,55	20,77	5,63	12,28	15,74	0,96	8,44	20,71	6
249	Welak	0,30	22,33	49,46	4,71	69,16	21,30	2,60	8,26	18,91	4
250	Lembor Selatan	0,33	14,46	38,46	5,84	33,25	24,07	1,85	7,77	22,62	5
251	Kuwus	0,23	10,35	35,71	3,27	36,70	13,40	0,91	7,36	12,52	6
252	Ndoso	0,29	16,19	67,14	8,74	85,95	9,76	1,21	5,78	9,86	4
253	KUWUS BARAT	0,98	14,43	30,62	4,96	33,50	20,69	0,51	8,47	22,61	5
254	MacangPacar	0,15	8,94	38,57	7,60	82,21	10,37	1,96	7,32	11,14	5
255	PACAR	0,30	18,91	21,73	4,75	37,18	16,08	1,18	8,26	12,17	5
Sumba Tengah											
256	Katikutana	0,55	15,10	38,85	5,26	13,10	8,91	0,62	8,17	4,19	6
257	Katikutana Selatan	0,29	21,89	42,38	10,70	34,53	12,11	4,33	6,78	10,67	5
258	Umbu Ratu Nggay Barat	0,35	35,16	35,15	19,13	54,74	7,07	4,61	8,72	9,34	4
259	Umbu Ratu Nggay	0,49	32,99	33,90	16,60	86,71	7,88	7,40	7,37	11,65	3
260	Umbu Ratu Nggay Tengah	1,15	59,40	39,52	9,67	84,85	7,88	3,61	5,83	8,58	3
261	Mamboro	0,84	40,50	41,32	7,32	53,77	14,20	3,48	7,39	10,93	3
Sumba Barat Daya											
262	Kodi Bangedo	0,44	84,41	65,48	13,81	64,35	11,25	0,62	6,92	34,32	3

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
263	Kodi Balaghar	0,24	46,54	74,44	26,88	78,10	31,34	2,19	6,33	21,04	2
264	Kodi	0,42	46,41	74,62	17,95	90,41	4,48	0,87	6,38	23,87	3
265	Kodi Utara	0,78	68,11	73,07	67,69	73,55	18,74	1,82	5,36	26,48	2
266	Wewewa Selatan	0,27	29,28	47,49	19,01	73,16	12,74	1,22	7,32	26,74	4
267	Wewewa Barat	0,29	16,04	70,05	14,67	70,01	8,26	1,11	6,54	21,55	5
268	Wewewa Timur	0,27	22,26	49,99	9,07	70,81	10,09	1,89	7,17	29,96	4
269	Wewewa Tengah	0,80	28,85	54,05	16,15	92,60	8,10	1,28	6,18	20,47	3
270	Wewewa Utara	0,17	39,63	73,92	13,77	71,85	8,62	1,38	6,41	34,75	3
271	Loura	0,29	20,08	29,65	6,63	28,98	19,27	1,47	8,40	23,58	5
272	Kota Tambolaka	0,56	11,48	30,47	4,62	49,99	22,60	1,15	9,00	10,44	5
Nagekeo											
273	Mauponggo	0,23	12,25	30,20	4,15	23,14	6,99	1,07	7,33	12,37	6
274	Keo Tengah	0,82	16,07	31,94	3,66	50,21	3,76	0,66	8,08	15,86	5
275	Nangaroro	0,20	17,17	38,82	4,22	49,62	7,09	2,11	7,77	16,92	5
276	Boawae	0,84	14,02	16,12	5,01	59,36	1,52	1,95	7,51	5,33	6
277	Aesesa Selatan	3,04	25,86	13,69	3,41	75,12	19,47	1,37	7,95	11,57	2
278	Aesesa	0,43	9,84	15,82	2,85	41,92	0,44	3,38	8,92	3,75	6
279	Wolowae	0,55	7,58	7,96	1,16	65,35	9,95	3,87	9,11	1,34	6
Manggarai Barat											
280	Borong	0,73	24,30	40,17	3,91	33,95	24,71	0,54	8,54	5,86	5
281	Rana Mese	0,75	38,81	73,09	10,02	53,38	10,96	1,20	7,85	17,90	3
282	Kota Komba	0,36	33,39	53,73	13,47	61,08	16,42	1,33	7,97	4,64	4
283	KOTA KOMBA UTARA	5,00	29,63	65,53	4,82	57,72	11,51	1,10	7,57	7,45	1
284	Elar	0,55	38,06	56,31	7,37	69,16	3,00	1,87	7,16	21,18	4
285	Elar Selatan	0,31	37,91	58,57	17,53	84,33	0,21	1,62	7,23	17,61	3
286	Sambi Rampas	0,24	28,15	65,75	4,77	51,57	5,56	1,91	6,90	10,14	4
287	CONGKAR	1,57	30,11	31,36	9,85	45,99	8,06	0,95	7,90	11,60	4
288	Poco Ranaka	0,63	37,44	50,02	3,13	74,68	19,26	0,54	8,38	4,39	3

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
289	Poco Ranaka Timur	0,63	35,64	68,03	4,91	83,58	3,23	0,63	7,28	7,57	3
290	Lamba Leda	0,41	35,89	66,71	13,74	8,16	12,66	0,89	6,95	7,54	4
291	LAMBA LEDA UTARA	2,82	33,66	37,05	10,43	36,68	4,05	1,86	7,61	10,11	3
Sabu Raijua											
292	Raijua	5,00	44,93	76,07	13,95	71,24	7,52	0,51	6,67	24,33	1
293	Hawu Mehara	5,00	47,11	69,48	6,25	30,22	7,38	0,91	6,38	19,44	1
294	Sabu Liae	2,96	45,83	42,82	7,64	53,20	16,20	0,77	6,31	18,04	2
295	Sabu Barat	1,10	38,96	27,92	5,60	42,00	16,33	1,87	9,13	14,94	4
296	Sabu Tengah	0,57	56,10	6,42	7,97	93,04	5,66	1,27	6,40	20,63	3
297	Sabu Timur	2,05	36,82	20,27	4,45	69,05	31,51	0,65	7,24	17,49	2
Malaka											
298	Wewiku	0,51	13,81	46,78	4,70	57,81	19,72	0,69	7,79	13,94	5
299	Malaka Barat	0,84	9,85	44,06	4,82	75,40	8,49	0,82	7,41	23,65	5
300	Weliman	0,52	18,26	44,31	3,60	23,58	15,52	0,80	7,80	11,17	5
301	Rinhat	0,36	27,67	43,11	7,34	68,76	5,53	0,97	6,24	27,80	4
302	Io Kufeu	0,35	18,40	68,40	5,78	22,81	11,68	1,13	5,64	27,61	5
303	Sasita Mean	0,47	14,46	55,94	3,63	80,47	9,55	1,07	7,35	12,03	5
304	Malaka Tengah	0,62	11,74	24,52	7,74	41,48	3,56	0,88	8,02	7,19	6
305	BotinLeobele	0,42	22,22	63,75	7,67	82,62	8,34	0,98	8,21	8,35	4
306	Laen Manen	0,44	24,73	35,76	7,43	28,95	6,12	0,89	7,49	15,77	5
307	Malaka Timur	1,04	31,25	26,73	12,31	42,82	27,30	1,16	6,40	8,80	3
308	Kobalima	0,17	18,06	40,12	4,89	43,19	5,18	1,26	7,86	21,09	6
309	Kobalima Timur	0,31	11,42	58,30	5,48	15,16	12,56	1,43	7,65	13,60	6
Kota Kupang											
310	Alak	0	11,83	19,04	5,20	57,35	17,83	0,33	10,17	21,45	5
311	Maulafa	0	11,35	9,21	0,00	19,43	12,34	0,31	11,74	24,02	6
312	Oebobo	0	5,97	13,16	0,00	15,93	8,24	0,09	11,96	20,01	6
313	Kota Raja	0	7,36	10,53	0,00	25,49	20,75	0,07	10,77	15,25	6

NO	KECAMATAN	NCPR	POV	FOOD	ELECT	WATER	MORBID	HEALTH	SCHOOL	STUNTING	PRIORITAS
314	Kelapa Lima	0	8,23	13,34	0,00	35,81	14,71	0,21	12,11	26,88	6
315	Kota Lama	0	5,00	6,55	0,00	11,39	15,39	0,02	10,87	16,05	6

Keterangan:

- NCPR** Rasio Konsumsi Normatif Per Kapita Terhadap Ketersediaan Bersih Serealia
- POV** Penduduk Hidup Dibawah Garis Kemiskinan
- FOOD** Persentase Rumah Tangga dengan Pengeluaran Pangan >65%
- ELECT** Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik (%)
- WATER** Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih (%)
- MORBID** Angka Kesakitan (%)
- HEALTH** Rasio Tenaga Kesehatan Per Penduduk terhadap Kepadatan Penduduk
- SCHOOL** Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di Atas 15 Tahun (Tahun)
- STUNTING** Prevalensi Balita Stunting

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G.L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k